



**PUSAT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

AREA 1

MANAJEMEN PERUBAHAN

i. Komitmen dalam perubahan

- a. Agen perubahan telah membuat perubahan yang konkret di Instansi (dalam 1 tahun)

MANAJEMEN PERUBAHAN

ANGGOTA TIM KERJA AREA 1



Sigit Purnomo
Penanggung Jawab



Nor Rosyid Ardani
Ketua



Mundiri
Ketua



Maria Ulfah Kusumaastuti
Sekretaris



Yogi Djatnika
Sekretaris



Tarnoto
Anggota



Debby
Anggota



Agung Wisnu Laksono
Anggota



Aria Yudha
Anggota

DAFTAR ISI

1. SK Agen Perubahan 2024
2. Undangan Narasumber Bimtek Hukum Acara PHPU bagi Partai Buruh - Widy Hastowahyudi 2023
3. ST Penataan ICT di Ruang Sidang Pleno 1-3 Sept 2023-Widy Hastowahyudi
4. Nodin Pengadaan Monitor Ruang Sidang PPK-Pokja 2023
5. KAK Monitor Ruang Sidang 2023
6. E-katalog monitor dll ruang sidang 2023
7. ST Pengembangan Website 2024-Ishak Purnama
8. Jadwal Sidang MKRI
9. Pengisian Bangku Sidang
10. Pengisian kehadiran para pihak secara online
11. Putusan MKRI
12. Case Tracking Perkara MKRI
13. Pengembangan Aplikasi E-Bukutamu dan SIMPPK
14. SK Pembuatan Sistem Informasi Pelayanan Informasi MK-Ishak Purnama 2023
15. ST Narasumber Bimtek Hukum Acara PHPU bagi KPU -Ishak Purnama 2023



**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

**KEPUTUSAN
SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 68.3 TAHUN 2024**

**TENTANG
AGEN PERUBAHAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)
DILINGKUNGAN PUSAT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI
TAHUN 2024**

SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik sebagai bagian dari pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, perlu mengusulkan Agen Perubahan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi tentang Penetapan Agen Perubahan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);



2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 158);
4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020 – 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan



Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;

9. Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 68.1 Tahun 2024 tentang Penetapan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Kepaniteraan dan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG AGEN PERUBAHAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) DI LINGKUNGAN PUSAT TEKNOLOGI DAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Agen Perubahan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini;

KEDUA : Agen Perubahan Pembangunan Zona Integritas bertugas sebagai penggerak dan pendorong kepada pegawai ke arah yang lebih baik terkait dengan pelaksanaan pembangunan Zona Integritas Unit Kerja Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Tahun 2024;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth,

1. Y.M. Ketua Mahkamah Konstitusi;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Februari 2024

**SEKRETARIS JENDERAL,
HERU SETIAWAN**



Lampiran Surat Keputusan Sekretaris
Jenderal Mahkamah Konstitusi
Nomor : 68.3 Tahun 2024
Tanggal : 2 Februari 2024

**AGEN PERUBAHAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) DI LINGKUNGAN
PUSAT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI KEPANITERAAN DAN
SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI
TAHUN 2024**

NO.	NAMA	PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN
1.	Widy Hastowahyudi NIP. 198308312007121001	Penata Tingkat I / III d	Pranata Komputer Ahli Muda
2.	Ishak Purnama NIK. 198509262023211014	Penata Muda / III a	Pranata Komputer Ahli Pertama

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Februari 2024
SEKRETARIS JENDERAL,
HERU SETIAWAN



Digital Signature
mk-418177511240604084327



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 420/DK.06.00/03/2023
Lampiran : -
Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

08 Maret 2023

Kepada Ykh. Saudara:

1. Widy Hastowahyudi, S.Kom.

2. Hafidz Ikhsan Baihaki

di Tempat

Dalam rangka persiapan Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Buruh** yang akan diselenggarakan pada tanggal 13 s.d. 16 Maret 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Saudara untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Selasa, 14 Maret 2023
Waktu : 13.00 s.d. 15.00 WIB
Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor
Materi : **Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik**

Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Saudara, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,
Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Elisabeth

Tembusan Yth.:

1. Plt. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Plt. Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi.



Digital Signature
mk-1275733949230307023924



**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

SURAT TUGAS

NOMOR 7339/2400/RT/09/2023

- Menimbang : a. bahwa dalam melaksanakan pendampingan penataan sistem audio ruang sidang pleno Mahkamah Konstitusi Tahun Anggaran 2023;
b. Bahwa untuk mendukung maksud sebagaimana tersebut pada huruf **a**, perlu menerbitkan Surat Tugas kepada beberapa pegawai yang namanya tersebut dalam surat tugas ini;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;
2. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2019.
3. Perjanjian Kerja Pegawai Kontrak untuk waktu Tertentu/Kontrak Tahun 2023.

Memberi Tugas

- Kepada : Daftar Nama Terlampir
- Untuk : 1. Melaksanakan pendampingan penataan sistem audio di Ruang Sidang Pleno di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi
Hari/tanggal : Jumat s/d Minggu, 1 s/d 3 September 2023
Jam : 09:00 s.d selesai
Tempat : Ruang Sidang Pleno Gedung Pusat Mahkamah Konstitusi
2. Kepada Pegawai tersebut untuk diberikan penggantian uang harian/transport yang dibebankan pada mata anggaran Biro Umum.
3. Melaksanakan tugas ini dengan seksama dan penuh tanggung jawab.

Jakarta, 01 September 2023
Kepala Biro Umum,
Elisabeth

Tembusan:

1. Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi
2. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan
3. Inspektur
4. Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan
5. Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi
6. Plt. Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol



Kepala Biro Umum
Elisabeth - NIP:196409061986032004
Digital Signature
mk-1808268548230831080823

Jln. Medan Merdeka Barat No.6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23329000 Fax: 021-3520177
Email: Office@mkri.id

DAFTAR NAMA PEGAWAI

Nomor Surat Tugas : 7339/2400/RT/09/2023

No	Nama	Waktu Penugasan
1	Novena Jati Nugraha	1-3 September 2023
2	Nur Rakhman	1-3 September 2023
3	Muhammad Ridho Ihsan	2 September 2023
4	Widy Hastowahyudi	3 September 2023
5	Muhamad Aussie	3 September 2023
6	Nur Khafid	1-3 September 2023
7	Yok Banu Prihatno	1-3 September 2023
8	Rahmat Basuki	3 September 2023
9	Rezky Widiyanto	3 September 2023





MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

NOTA DINAS

Nomor 9404.1/2700/PL.00.02/10/2023

Kepada : Ketua Kelompok Kerja Pengadaan Barang/Jasa
Dari : Pejabat Pembuat Komitmen VII Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MKRI
Perihal : Pengadaan monitor dan perangkat delegate (lengkap) ruang sidang TA 2023

Bersama ini disampaikan bahwa Mahkamah Konstitusi RI akan melaksanakan pengadaan monitor dan perangkat delegate (lengkap) ruang sidang TA 2023.

Sehubungan dengan pentingnya kegiatan tersebut, diharapkan kepada Kelompok Kerja Pengadaan Barang/Jasa agar memilih Mendampingi pemilihan Penyedia melalui E-Katalog yang dianggap mampu untuk melaksanakan pekerjaan dimaksud.

Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Jakarta, 23 Oktober 2023
Pejabat Pembuat Komitmen VII,

SIGIT PURNOMO



Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi
Sigit Purnomo - NIP:196805181992031002

Digital Signature
[mk2073680325231130025440](#)

Jln. Medan Merdeka Barat No.6 Jakarta Pusat 10110

Telp: 021-23329000 Fax: 021-3520177

Email: Office@mkri.id

KERANGKA ACUAN KERJA

PENGADAAN BARANG/JASA

PENGEMBANGAN DAN SARANA PRASARANA ICT

(MONITOR DAN PERANGKAT DELEGATE RUANG SIDANG)

DI LINGKUNGAN KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

MAHKAMAH KONSTITUSI RI

TAHUN ANGGARAN 2023



KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

MAHKAMAH KONSTITUSI



I. PENDAHULUAN

Pengadaan Pengembangan dan Sarana Prasarana ICT (Monitor Dan Perangkat Delegate Ruang Sidang) perlu diadakan karena sebagai bentuk untuk mendukung pelaksanaan tugas dan wewenang MK dalam mengawal konstitusi sebagai lembaga peradilan konstitusi. MK tidak hanya mengemban tugas memutus perkara, tetapi juga memudahkan akses masyarakat untuk menjangkau dan mendapatkan keadilan.

Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi secara optimal. Sesuai dengan Visi MK “Mengawal tegaknya Konstitusi melalui Peradilan yang modern dan Terpercaya” keberadaan teknologi informasi merupakan motivasi untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat dalam memperoleh informasi seluas-luasnya mengenai MK, maka penyediaan fasilitas sarana dan prasarana yang memadai serta mencukupi harus dapat dilakukan terutama perangkat teknologi yang mumpuni untuk memenuhi kelancaran penanganan perkara.

II. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 158);
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta aturan turunannya;
6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
7. Peraturan Menteri Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Reformasi Birokrasi nomor 59 tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
8. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

III. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud

Kerangka Acuan Kerja (KAK) merupakan sebagai salah satu syarat dilaksanakannya Kegiatan Pengadaan Pengembangan dan Sarana Prasarana ICT (Monitor Dan Perangkat Delegate Ruang Sidang) dalam mewujudkan hasil pekerjaan yang baik dan sesuai dengan rencana kerja Pusat TIK.



b. Tujuan

Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini merupakan petunjuk bagi Penyedia yang memuat masukan, spesifikasi teknis dan keluaran yang harus dipenuhi dan diperhatikan serta diinterpretasikan ke dalam pelaksanaan tugas Pengadaan Peremajaan Perangkat Infrastruktur dan Sarana Prasarana ICT.

IV. SASARAN

Sasaran dari pelaksanaan Pengadaan Pengembangan dan Sarana Prasarana ICT (Monitor Dan Perangkat Delegate Ruang Sidang) di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Mahkamah Konstitusi RI adalah terwujudnya untuk mewujudkan pelayanan prima MK dalam pelaksanaan persidangan.

V. NAMA ORGANISASI DAN KEGIATAN

1. Unit Kerja : Mahkamah Konstitusi RI
2. Program : Program Dukungan Manajemen
3. Kegiatan : Penyelenggaraan Kerumahtanggaan, Pengamanan, Pengadaan Perlengkapan, Perlengkapan, Arsip dan Ekspedisi
4. Pekerjaan : Pengadaan Pengembangan dan Sarana Prasarana ICT (Monitor Dan Perangkat Delegate Ruang Sidang).
5. Sumber Pendanaan: Sumber Dana melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Mahkamah Konstitusi Tahun 2023 dengan nilai Harga Perkiraan Sendiri sebesar Rp. 991,861,259 (Sembilan ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus enam puluh satu ribu dua ratus lima puluh sembilan rupiah) pada mata anggaran 077.01.WA.3369.CAN.001.051.A.532111.
6. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Nama : Sigit Purnomo
Jabatan Struktural : Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi.
PPK VII : Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi.

VI. METODE DAN JANGKA WAKTU

Metode pemilihan penyedia yang akan dilaksanakan adalah metode e-katalog dan dilaksanakan pada bulan Juli 2023. Jangka waktu pengerjaan 60 hari kalender Tahun Anggaran 2023.

VII. RUANG LINGKUP KEGIATAN

Ruang lingkup dalam kegiatan Pekerjaan Pengembangan dan Sarana Prasarana ICT (Monitor Dan Perangkat Delegate Ruang Sidang) di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Mahkamah Konstitusi RI Tahun Anggaran 2023 yang akan dilaksanakan Penyedia Jasa adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pengadaan dilakukan berdasarkan dokumen pelelangan yang telah disusun oleh user (peralatan dan spesifikasi teknis), dengan segala tambahan dan perubahannya pada saat penjelasan pekerjaan pelelangan, serta ketentuan teknis (pedoman dan standar teknis yang dipersyaratkan).
2. Pelaksanaan pengadaan dilakukan sesuai dengan kualitas masukan, kualitas proses, yang tercantum dalam spesifikasi teknis.



3. Pelaksanaan kerja akan didahului dengan penandatanganan Kontrak Kerja dan selanjutnya dibuat laporan kemajuan pekerjaan hingga berita acara serah terima pekerjaan yang dilanjutkan pemeriksaan pekerjaan oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan.
4. Semua administrasi pelaksanaan pengadaan mengikuti ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta aturan turunannya.
5. Masa pekerjaan untuk kegiatan ini adalah 69 hari kalender sesuai rincian dalam Bill of Quantity (BoQ).
6. Menyediakan, melakukan pengiriman, pemasangan perangkat termasuk material pendukung sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah ditentukan oleh MK yang berlokasi di Gedung MKRI Jakarta.
7. Melakukan Instalasi, Commissioning dan Testing tiap perangkat agar dapat saling terintegrasi sesuai fungsinya.
8. Menyediakan perangkat pendukung implementasi seperti kabel koneksi antar perangkat hingga keseluruhan perangkat dapat berfungsi sebagai mana mestinya.
9. Melakukan relokasi dan rekonfigurasi terhadap perangkat di Ruang Sidang.
10. Dokumentasi meliputi Salinan dari Running Config, Serial Number, dan informasi lainnya yang dapat menjadi bahan dokumen perubahan alat.
11. Dukungan Engineer datang ke tempat (untuk pemecahan masalah);
12. Penggantian Barang yang rusak dalam 24 Jam x 7 hari x 4 Minggu;
13. Dukungan Engineer datang ke tempat untuk melakukan penggantian barang semasa garansi;
14. Termasuk seluruh biaya pengiriman barang sampai barang berada ditempat yang ditentukan dan berfungsi kembali;
15. Respons dalam 30 menit Telefon setelah pelaporan;
16. Dalam waktu 30 menit sudah dapat memberikan diagnose dari peralatan Teknologi Informasi yang mengalami kerusakan;
17. Memberikan laporan analisa tertulis maximum 1 hari setelah fungsi alat sudah kembali sebagai mana mestinya dari log-log masing – masing alat yang mengalami kerusakan;
18. Waktu yang dibutuhkan setelah pendiagnosaan kerusakan barang sampai pengiriman barang pengganti berfungsi kembali adalah Jakarta 4 Jam;
19. Engineer menyediakan barang-barang yang diperlukan untuk melakukan perbaikan.
20. Menyediakan masa garansi dan pemeliharaan/service support untuk perangkat seperti melakukan rekonfigurasi, serta penggantian suku cadang terhadap seluruh perangkat terhitung sejak Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BAST) sampai dengan masa garansi habis.
21. Masa pekerjaan untuk kegiatan ini adalah 69 hari kalender sesuai rincian dalam Bill of Quantity (BoQ).

VIII. KUALIFIKASI CALON PENYEDIA

Peserta yang dapat mendaftar dalam pengadaan ini adalah:

1. Badan usaha berbentuk Perseroan Terbatas;
2. Memiliki NIB dengan KBLI 46521, 46511;
3. Bersedia mengikuti seluruh persyaratan dan jadwal yang telah ditentukan;



4. Memiliki pengalaman kerja dalam di bidang multimedia dan sejenisnya di pemerintah atau BUMN dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir yang dapat dibuktikan dengan kontrak dari pemberi kerja dan berita acara serah terima pekerjaan;
5. Peserta yang diperbolehkan mendaftar dalam pelelangan pengadaan ini adalah perusahaan yang sedang tidak dinyatakan pailit, atau kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan, atau tidak sedang menjalani sanksi pidana, atau sedang dalam pengawasan pengadilan.

IX. KELUARAN

Adapun keluaran yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah tersedianya Sarana Prasarana ICT (Monitor Dan Perangkat Delegate Ruang Sidang) di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Mahkamah Konstitusi RI Tahun Anggaran 2023.

X. SPESIFIKASI TEKNIS PEKERJAAN PENGADAAN

Berikut ini merupakan spesifikasi teknis pekerjaan Pengadaan Pengembangan dan Sarana Prasarana ICT (Monitor Dan Perangkat Delegate Ruang Sidang) di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Mahkamah Konstitusi RI Tahun Anggaran 2023:

Spesifikasi Peralatan pendukung Ruang sidang

1. Monitor ASUS VT229H Touch Monitor - 21.5" = 9 unit

Display

- Panel Size (inch) : 21.5
- Aspect Ratio : 16:9
- Display Viewing Area (H x V): 476.64 x 268.11 mm
- Display Surface : Glare
- Backlight Type : LED
- Panel Type : IPS
- Viewing Angle (CR \geq 10, H/V) : 178°/ 178°
- Pixel Pitch : 0.248mm
- Resolution : 1920x1080
- Brightness (Typ.) : 250cd/m²
- Contrast Ratio (Typ.) : 1000:1
- ASUS Smart Contrast Ratio (ASCR) : 100000000:1
- Display Colors : 16.7M
- Response Time : 5ms (GTG)
- Refresh Rate (Max) : 60Hz
- Touch : Yes (PCAP Touch)
- Protection Glass : Yes
- Flicker-free : Yes

Video Feature

- Trace Free Technology : Yes
- SPLENDID Technology : Yes
- Color Temp. Selection : Yes (4 modes)
- QuickFit : Yes
- HDCP : Yes
- Low Blue Light : Yes
- Audio Feature
- Speaker : Yes (1.5Wx2)



I/O Ports

- HDMI(v1.4) x 1
- VGA x 1
- Earphone Jack : Yes

Power Consumption

- Power Consumption : 18.56W
- Power Saving Mode : <0.5W
- Power Off Mode : <0.5W
- Voltage : 100-240V, 50/60Hz

Garansi 3 Tahun

2. ASUS Mini PC PN63-S1 (Garansi 3 Tahun) = 15 unit
 - Processor Intel Core I5 Gen 11
 - RAM 16 GB, DDR4
 - Storage 256 GB SSD
 - Sistem Operasi Windows 11 Home
 - Konektivitas Wifi and Bluetooth
 - VGA Integrated Graphics
 - Garansi 3 Tahun
3. Switcher KRAMER VS-211H2 = 18 unit
 - VS-211H2 is a high-performance auto switcher for 4K@60Hz (4:4:4) HDMI video signals. Offering priority and last-connected auto switching scheme options, it automatically switches input signals to output connection, according to the selected switching scheme, and based on active video signals detection.
 - Inputs = 2 HDMI: On female HDMI connectors; Outputs = 1 HDMI: On a female HDMI connector
 - Garansi 1 Tahun
4. KRAMER RC-20TB = 18 unit
 - RC-20TB Wall Plate Insert — 2-Button Contact Closure Switch For use with VP-81SIDN Supported by: K-Config Only
 - > Two-Button Faceplate — 2 momentary buttons; > Output Connectors — Terminal block; Size — Single slot wall plate insert.
 - Garansi 1 Tahun
5. KRAMER FRAME-1G FRAME FOR WALL PLATE INSERT = 18 unit
 - Frame for Wall Plate Inserts - 1 Gang
6. BRACKET FOR MONITOR 21.5INCH VT229H (CUSTOM) = 9 unit
 - Bracket custom for Monitor 21.5inch
7. TELEVIC CONFIDEA DD G3 = 3 unit
 - Televic Wireless delegate unit with built-in loudspeaker, microphone connector.
 - Features : » Built-in high-quality loudspeaker which is automatically muted when the microphone is active, to prevent acoustic feedback. » Microphone On/Off or request-to-speak button with two signalling LEDs » Two headphone outputs » One headphone volume adjustment
 - Garansi 2 tahun



8. TELEVIC CONFIDEA CD G3 = 4 unit
 - Televic Wireless chairman unit with built-in loudspeaker, microphone connector, prior and next button
 - Features = Built-in high-quality loudspeaker which is automatically muted when the microphone is active, to prevent acoustic feedback. » Microphone On/Off or request-to-speak button with two signaling LEDs » Two headphone outputs » One headphone volume adjustment » Priority button » Next-in-line button
 - Garansi 2 tahun

9. TELEVIC PLIXUS AUDIO ENGINE (AER) = 1 unit
 - The Plixus Audio Engine with recording capabilities is a 19" rack-mountable device that provides all the processing and signal handling required for an audio-only system
 - Connectivity = 2 Power connectors » 4 Conference network ports » DLP switch » 2 Dante ports (not usable) » 1 USB 2.0 ports » LAN port » 1 Balanced XLR audio input » 1 Balanced XLR audio output » 2 Unbalanced Cinch audio inputs » 2 Unbalanced Cinch audio outputs
 - Garansi 2 tahun

10. TELEVIC D-MIC 40 SL = 7 unit
 - Televic GSM immune gooseneck microphone of 40cm with bi-colour ledring
 - Material = Brass ; Color = Matt Black, RAL 9011
 - Garansi 2 tahun

11. TELEVIC CONFIDEA BP G3 = 27 unit
 - Confidea Battery Pack
 - Supply voltage 15 V; Capacity 6600 mAh ; Autonomy 28 hours; Max/min output voltage 8.4/5.9 VDC; Nominal output voltage 7.2 VDC; Charging time 4 hours; Quick charge to 50% 1 hour
 - Garansi 2 tahun

XI. PENUTUP

Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini menjadi pedoman secara umum bagi penyedia dalam melaksanakan pekerjaan. Hal-hal teknis yang diperlukan hendaknya bisa dipersiapkan secara matang agar pelaksanaan pekerjaan dapat selesai sesuai jadwal yang ditentukan dengan kualitas sesuai yang telah ditetapkan.

Jakarta, 17 Oktober 2023
Pejabat Pembuat Komitmen VII
Sigit Purnomo



Informasi Paket

Etalase Produk	: Peralatan Elektronik dan Pendukungnya	Tanggal Buat	: 24 Oktober 2023
ID Paket	: LTN-P2310-7735350	Tanggal Ubah	: 25 Oktober 2023
Jenis Paket	: Purchasing	Jumlah Produk	: 11
Nama Paket	: Pengembangan dan Sarana Prasarana ICT	Harga Total	: Rp 991.854.059,00
Instansi	: Mahkamah Konstitusi Ri		Sembilan Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Delapan Ratus Lima Puluh Empat Ribu Lima Puluh Sembilan Rupiah
Satuan Kerja	: MAHKAMAH KONSTITUSI RI	Kurs	: IDR
Alamat Satuan Kerja	: Jl. Medan Merdeka Barat 6 Jakarta 10110, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta	Nilai Kurs	: 1.00
NPWP	: 00.123.873.2-025000	Tanggal Kurs	: 24-10-2023
Sumber Dana	: APBN (077.01. WA.3369.CAN.001.051.A. 532111)	Tahun Anggaran	: 2023

PP/Pemesan	PPK	Penyedia	Distributor/Reseller/Pelaksana Pekerjaan/Pengirim Barang
Sigit Purnomo 02123529000 ppbmn@mkri.id	Sigit Purnomo 02123529000 ppbmn@mkri.id	PT. Mitsindo Visual Pratama Puri Deltamas Blok I no. 46-47, jl. bandengan selatan no. 43, jakarta sales@mitsindo.co.id 021-668 2033	PT. Mitsindo Visual Pratama Puri Deltamas Blok I no. 46-47, jl. bandengan selatan no. 43, jakarta sales@mitsindo.co.id

Daftar Pesanan

Nama Produk	VS-211H2
Manufaktur	kramer
Kuantitas	18
Harga Satuan	Rp 9.500.000,00
Perkiraan Ongkos Kirim	Rp 0,00
Tanggal Pengiriman	22-12-2023 (22 Desember 2023)
Total Harga	Rp 171.000.000,00
Catatan	<p>Switcher KRAMER VS-211H2</p> <ul style="list-style-type: none">• VS211H2 is a highperformance auto switcher for 4K@60Hz (4:4:4) HDMI video signals. Offering priority and lastconnected auto switching scheme options, it automatically switches input signals to output connection, according to the selected switching scheme, and based on active video signals detection.• Inputs = 2 HDMI: On female HDMI connectors; Outputs = 1 HDMI: On a female HDMI connector• Garansi 1 Tahun <ol style="list-style-type: none">1. Menyediakan, melakukan pengiriman, pemasangan perangkat termasuk material pendukung sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah ditentukan oleh MK yang berlokasi di Gedung MKRI Jakarta.2. Melakukan Instalasi, Commissioning dan Testing tiap perangkat agar dapat saling terintegrasi sesuai fungsinya.3. Menyediakan perangkat pendukung implementasi seperti kabel koneksi antar perangkat hingga keseluruhan perangkat dapat berfungsi sebagai mana mestinya.4. Melakukan relokasi dan rekonfigurasi terhadap perangkat di Ruang Sidang.5. Dokumentasi meliputi Salinan dari Running Config, Serial Number, dan informasi lainnya yang dapat menjadi bahan dokumen perubahan alat.6. Dukungan Engineer datang ke tempat (untuk pemecahan masalah);7. Penggantian Barang yang rusak dalam 24 Jam x 7 hari x 4 Minggu;8. Dukungan Engineer datang ke tempat untuk melakukan penggantian barang semasa garansi;9. Termasuk seluruh biaya pengiriman barang sampai barang berada ditempat yang ditentukan dan berfungsi kembali;10. Respons dalam 30 menit Telefon setelah pelaporan;11. Dalam waktu 30 menit sudah dapat memberikan diagnose dari peralatan

Teknologi Informasi yang mengalami kerusakan;

12. Memberikan laporan analisa tertulis maximum 1 hari setelah fungsi alat sudah kembali sebagai mana mestinya dari log-log masing – masing alat yang mengalami kerusakan;
13. Waktu yang dibutuhkan setelah pendiagnosaan kerusakan barang sampai pengiriman barang pengganti berfungsi kembali adalah Jakarta 4 Jam;
14. Engineer menyediakan barang-barang yang diperlukan untuk melakukan perbaikan.
15. Menyediakan masa garansi dan pemeliharaan/service support untuk perangkat seperti melakukan rekonfigurasi, serta penggantian suku cadang terhadap seluruh perangkat terhitung sejak Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BAST) sampai dengan masa garansi habis.

Nama Produk	RC-20TB
Manufaktur	kramer
Kuantitas	18
Harga Satuan	Rp 2.190.000,00
Perkiraan Ongkos Kirim	Rp 0,00
Tanggal Pengiriman	22-12-2023 (22 Desember 2023)
Total Harga	Rp 39.420.000,00
Catatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyediakan, melakukan pengiriman, pemasangan perangkat termasuk material pendukung sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah ditentukan oleh MK yang berlokasi di Gedung MKRI Jakarta. 2. Melakukan Instalasi, Commissioning dan Testing tiap perangkat agar dapat saling terintegrasi sesuai fungsinya. 3. Menyediakan perangkat pendukung implementasi seperti kabel koneksi antar perangkat hingga keseluruhan perangkat dapat berfungsi sebagai mana mestinya. 4. Melakukan relokasi dan rekonfigurasi terhadap perangkat di Ruang Sidang. 5. Dokumentasi meliputi Salinan dari Running Config, Serial Number, dan informasi lainnya yang dapat menjadi bahan dokumen perubahan alat. 6. Dukungan Engineer datang ke tempat (untuk pemecahan masalah); 7. Penggantian Barang yang rusak dalam 24 Jam x 7 hari x 4 Minggu;

8. Dukungan Engineer datang ke tempat untuk melakukan penggantian barang semasa garansi;
9. Termasuk seluruh biaya pengiriman barang sampai barang berada ditempat yang ditentukan dan berfungsi kembali;
10. Respons dalam 30 menit Telefon setelah pelaporan;
11. Dalam waktu 30 menit sudah dapat memberikan diagnose dari peralatan Teknologi Informasi yang mengalami kerusakan;
12. Memberikan laporan analisa tertulis maximum 1 hari setelah fungsi alat sudah kembali sebagai mana mestinya dari log-log masing – masing alat yang mengalami kerusakan;
13. Waktu yang dibutuhkan setelah pendiagnosaan kerusakan barang sampai pengiriman barang pengganti berfungsi kembali adalah Jakarta 4 Jam;
14. Engineer menyediakan barang-barang yang diperlukan untuk melakukan perbaikan.
15. Menyediakan masa garansi dan pemeliharaan/service support untuk perangkat seperti melakukan rekonfigurasi, serta penggantian suku cadang terhadap seluruh perangkat terhitung sejak Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BAST) sampai dengan masa garansi habis.

KRAMER RC-20TB

- RC-20TB Wall Plate Insert — 2-Button Contact Closure Switch For use with VP-81SIDN Supported by: K-Config Only
- > Two-Button Faceplate — 2 momentary buttons; > Output Connectors — Terminal block; Size — Single slot wall plate insert.
- Garansi 1 Tahun

Nama Produk	FRAME-1G Frame For Wall Plate Insert
Manufaktur	kramer
Kuantitas	18
Harga Satuan	Rp 620.000,00
Perkiraan Ongkos Kirim	Rp 0,00
Tanggal Pengiriman	22-12-2023 (22 Desember 2023)
Total Harga	Rp 11.160.000,00
Catatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyediakan, melakukan pengiriman, pemasangan perangkat termasuk material pendukung sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah ditentukan oleh MK yang berlokasi di Gedung MKRI Jakarta. 2. Melakukan Instalasi, Commissioning dan Testing tiap perangkat agar dapat saling terintegrasi sesuai fungsinya. 3. Menyediakan perangkat pendukung implementasi seperti kabel koneksi antar perangkat hingga keseluruhan perangkat dapat berfungsi sebagai mana mestinya. 4. Melakukan relokasi dan rekonfigurasi terhadap perangkat di Ruang Sidang. 5. Dokumentasi meliputi Salinan dari Running Config, Serial Number, dan informasi lainnya yang dapat menjadi bahan dokumen perubahan alat. 6. Dukungan Engineer datang ke tempat (untuk pemecahan masalah); 7. Penggantian Barang yang rusak dalam 24 Jam x 7 hari x 4 Minggu; 8. Dukungan Engineer datang ke tempat untuk melakukan penggantian barang semasa garansi; 9. Termasuk seluruh biaya pengiriman barang sampai barang berada ditempat yang ditentukan dan berfungsi kembali; 10. Respon dalam 30 menit Telepon setelah pelaporan; 11. Dalam waktu 30 menit sudah dapat memberikan diagnose dari peralatan Teknologi Informasi yang mengalami kerusakan; 12. Memberikan laporan analisa tertulis maximum 1 hari setelah fungsi alat sudah kembali sebagai mana mestinya dari log-log masing – masing alat yang mengalami kerusakan; 13. Waktu yang dibutuhkan setelah pendiagnosaan kerusakan barang sampai pengiriman barang pengganti berfungsi kembali adalah Jakarta 4 Jam; 14. Engineer menyediakan barang-barang yang diperlukan untuk melakukan perbaikan. 15. Menyediakan masa garansi dan pemeliharaan/service support untuk perangkat seperti melakukan rekonfigurasi, serta penggantian suku cadang terhadap seluruh

perangkat terhitung sejak Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BAST) sampai dengan masa garansi habis.

- KRAMER FRAME-1G FRAME FOR WALL PLATE INSERT
- Frame for Wall Plate Inserts - 1 Gang dan bergaransi

Nama Produk	Mini PC PN63-S1 - i5 - 16GB - 256GB SSD - Win 11 Home - Garansi 3 Tahun
Manufaktur	ASUS
Kuantitas	15
Harga Satuan	Rp 10.000.000,00
Perkiraan Ongkos Kirim	Rp 0,00
Tanggal Pengiriman	22-12-2023 (22 Desember 2023)
Total Harga	Rp 150.000.000,00
Catatan	<ol style="list-style-type: none">1. Menyediakan, melakukan pengiriman, pemasangan perangkat termasuk material pendukung sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah ditentukan oleh MK yang berlokasi di Gedung MKRI Jakarta.2. Melakukan Instalasi, Commissioning dan Testing tiap perangkat agar dapat saling terintegrasi sesuai fungsinya.3. Menyediakan perangkat pendukung implementasi seperti kabel koneksi antar perangkat hingga keseluruhan perangkat dapat berfungsi sebagai mana mestinya.4. Melakukan relokasi dan rekonfigurasi terhadap perangkat di Ruang Sidang.5. Dokumentasi meliputi Salinan dari Running Config, Serial Number, dan informasi lainnya yang dapat menjadi bahan dokumen perubahan alat.6. Dukungan Engineer datang ke tempat (untuk pemecahan masalah);7. Penggantian Barang yang rusak dalam 24 Jam x 7 hari x 4 Minggu;8. Dukungan Engineer datang ke tempat untuk melakukan penggantian barang semasa garansi;9. Termasuk seluruh biaya pengiriman barang sampai barang berada ditempat yang ditentukan dan berfungsi kembali;10. Respon dalam 30 menit Telepon setelah pelaporan;11. Dalam waktu 30 menit sudah dapat memberikan diagnose dari peralatan Teknologi Informasi yang mengalami kerusakan;

12. Memberikan laporan analisa tertulis maximum 1 hari setelah fungsi alat sudah kembali sebagai mana mestinya dari log-log masing – masing alat yang mengalami kerusakan;
13. Waktu yang dibutuhkan setelah pendiagnosaan kerusakan barang sampai pengiriman barang pengganti berfungsi kembali adalah Jakarta 4 Jam;
14. Engineer menyediakan barang-barang yang diperlukan untuk melakukan perbaikan.
15. Menyediakan masa garansi dan pemeliharaan/service support untuk perangkat seperti melakukan rekonfigurasi, serta penggantian suku cadang terhadap seluruh perangkat terhitung sejak Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BAST) sampai dengan masa garansi habis.

ASUS Mini PC PN63-S1 (Garansi 3 Tahun)

- Processor Intel Core I5 Gen 11
- RAM 16 GB, DDR4
- Storage 256 GB SSD
- Sistem Operasi Windows 11 Home
- Konektivitas Wifi and Bluetooth
- VGA Integrated Graphics
- Garansi 3 Tahun

Nama Produk	Confidea DD G3
Manufaktur	TELEVIC
Kuantitas	3
Harga Satuan	Rp 26.460.000,00
Perkiraan Ongkos Kirim	Rp 0,00
Tanggal Pengiriman	22-12-2023 (22 Desember 2023)
Total Harga	Rp 79.380.000,00
Catatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyediakan, melakukan pengiriman, pemasangan perangkat termasuk material pendukung sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah ditentukan oleh MK yang berlokasi di Gedung MKRI Jakarta. 2. Melakukan Instalasi, Commissioning dan Testing tiap perangkat agar dapat saling terintegrasi sesuai fungsinya.

3. Menyediakan perangkat pendukung implementasi seperti kabel koneksi antar perangkat hingga keseluruhan perangkat dapat berfungsi sebagai mana mestinya.
4. Melakukan relokasi dan rekonfigurasi terhadap perangkat di Ruang Sidang.
5. Dokumentasi meliputi Salinan dari Running Config, Serial Number, dan informasi lainnya yang dapat menjadi bahan dokumen perubahan alat.
6. Dukungan Engineer datang ke tempat (untuk pemecahan masalah);
7. Penggantian Barang yang rusak dalam 24 Jam x 7 hari x 4 Minggu;
8. Dukungan Engineer datang ke tempat untuk melakukan penggantian barang semasa garansi;
9. Termasuk seluruh biaya pengiriman barang sampai barang berada ditempat yang ditentukan dan berfungsi kembali;
10. Respons dalam 30 menit Telefon setelah pelaporan;
11. Dalam waktu 30 menit sudah dapat memberikan diagnose dari peralatan Teknologi Informasi yang mengalami kerusakan;
12. Memberikan laporan analisa tertulis maximum 1 hari setelah fungsi alat sudah kembali sebagai mana mestinya dari log-log masing – masing alat yang mengalami kerusakan;
13. Waktu yang dibutuhkan setelah pendiagnosaan kerusakan barang sampai pengiriman barang pengganti berfungsi kembali adalah Jakarta 4 Jam;
14. Engineer menyediakan barang-barang yang diperlukan untuk melakukan perbaikan.
15. Menyediakan masa garansi dan pemeliharaan/service support untuk perangkat seperti melakukan rekonfigurasi, serta penggantian suku cadang terhadap seluruh perangkat terhitung sejak Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BAST) sampai dengan masa garansi habis.

TELEVIC CONFIDEA DD G3

- Televic Wireless delegate unit with built-in loudspeaker, microphone connector.
- Features : » Built-in high-quality loudspeaker which is automatically muted when the microphone is active, to prevent acoustic feedback. » Microphone On/Off or request-to-speak button with two signalling LEDs » Two headphone outputs » One headphone volume adjustment
- Garansi 2 tahun

Nama Produk	Confidea CD G3
Manufaktur	TELEVIC
Kuantitas	4
Harga Satuan	Rp 27.439.920,00
Perkiraan Ongkos Kirim	Rp 0,00
Tanggal Pengiriman	22-12-2023 (22 Desember 2023)
Total Harga	Rp 109.759.680,00
Catatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyediakan, melakukan pengiriman, pemasangan perangkat termasuk material pendukung sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah ditentukan oleh MK yang berlokasi di Gedung MKRI Jakarta. 2. Melakukan Instalasi, Commissioning dan Testing tiap perangkat agar dapat saling terintegrasi sesuai fungsinya. 3. Menyediakan perangkat pendukung implementasi seperti kabel koneksi antar perangkat hingga keseluruhan perangkat dapat berfungsi sebagai mana mestinya. 4. Melakukan relokasi dan rekonfigurasi terhadap perangkat di Ruang Sidang. 5. Dokumentasi meliputi Salinan dari Running Config, Serial Number, dan informasi lainnya yang dapat menjadi bahan dokumen perubahan alat. 6. Dukungan Engineer datang ke tempat (untuk pemecahan masalah); 7. Penggantian Barang yang rusak dalam 24 Jam x 7 hari x 4 Minggu; 8. Dukungan Engineer datang ke tempat untuk melakukan penggantian barang semasa garansi; 9. Termasuk seluruh biaya pengiriman barang sampai barang berada ditempat yang ditentukan dan berfungsi kembali; 10. Respon dalam 30 menit Telepon setelah pelaporan; 11. Dalam waktu 30 menit sudah dapat memberikan diagnose dari peralatan Teknologi Informasi yang mengalami kerusakan; 12. Memberikan laporan analisa tertulis maximum 1 hari setelah fungsi alat sudah kembali sebagai mana mestinya dari log-log masing – masing alat yang mengalami kerusakan; 13. Waktu yang dibutuhkan setelah pendiagnosaan kerusakan barang sampai pengiriman barang pengganti berfungsi kembali adalah Jakarta 4 Jam; 14. Engineer menyediakan barang-barang yang diperlukan untuk melakukan perbaikan. 15. Menyediakan masa garansi dan pemeliharaan/service support untuk perangkat seperti melakukan rekonfigurasi, serta penggantian suku cadang terhadap seluruh

perangkat terhitung sejak Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BAST) sampai dengan masa garansi habis.

TELEVIC CONFIDEA CD G3

- Televic Wireless chairman unit with built-in loudspeaker, microphone connector, prior and next button
- Features = Built-in high-quality loudspeaker which is automatically muted when the microphone is active, to prevent acoustic feedback. » Microphone On/Off or request-to-speak button with two signaling LEDs » Two headphone outputs » One headphone volume adjustment » Priority button » Next-in-line button
- Garansi 2 tahun

Nama Produk	Plixus Audio Engine (AER)
Manufaktur	TELEVIC
Kuantitas	1
Harga Satuan	Rp 118.365.600,00
Perkiraan Ongkos Kirim	Rp 0,00
Tanggal Pengiriman	22-12-2023 (22 Desember 2023)
Total Harga	Rp 118.365.600,00
Catatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyediakan, melakukan pengiriman, pemasangan perangkat termasuk material pendukung sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah ditentukan oleh MK yang berlokasi di Gedung MKRI Jakarta. 2. Melakukan Instalasi, Commissioning dan Testing tiap perangkat agar dapat saling terintegrasi sesuai fungsinya. 3. Menyediakan perangkat pendukung implementasi seperti kabel koneksi antar perangkat hingga keseluruhan perangkat dapat berfungsi sebagai mana mestinya. 4. Melakukan relokasi dan rekonfigurasi terhadap perangkat di Ruang Sidang. 5. Dokumentasi meliputi Salinan dari Running Config, Serial Number, dan informasi lainnya yang dapat menjadi bahan dokumen perubahan alat. 6. Dukungan Engineer datang ke tempat (untuk pemecahan masalah); 7. Penggantian Barang yang rusak dalam 24 Jam x 7 hari x 4 Minggu; 8. Dukungan Engineer datang ke tempat untuk melakukan penggantian barang semasa garansi;

9. Termasuk seluruh biaya pengiriman barang sampai barang berada ditempat yang ditentukan dan berfungsi kembali;
10. Respons dalam 30 menit Telefon setelah pelaporan;
11. Dalam waktu 30 menit sudah dapat memberikan diagnose dari peralatan Teknologi Informasi yang mengalami kerusakan;
12. Memberikan laporan analisa tertulis maximum 1 hari setelah fungsi alat sudah kembali sebagai mana mestinya dari log-log masing – masing alat yang mengalami kerusakan;
13. Waktu yang dibutuhkan setelah pendiagnosaan kerusakan barang sampai pengiriman barang pengganti berfungsi kembali adalah Jakarta 4 Jam;
14. Engineer menyediakan barang-barang yang diperlukan untuk melakukan perbaikan.
15. Menyediakan masa garansi dan pemeliharaan/service support untuk perangkat seperti melakukan rekonfigurasi, serta penggantian suku cadang terhadap seluruh perangkat terhitung sejak Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BAST) sampai dengan masa garansi habis.

TELEVIC PLIXUS AUDIO ENGINE (AER)

- The Plixus Audio Engine with recording capabilities is a 19" rack-mountable device that provides all the processing and signal handling required for an audio-only system
- Connectivity = 2 Power connectors » 4 Conference network ports » DLP switch » 2 Dante ports (not usable) » 1 USB 2.0 ports » LAN port » 1 Balanced XLR audio input » 1 Balanced XLR audio output » 2 Unbalanced Cinch audio inputs » 2 Unbalanced Cinch audio outputs
- Garansi 2 tahun

Nama Produk	D-Mic 40 SL
Manufaktur	TELEVIC
Kuantitas	7
Harga Satuan	Rp 5.597.597,00
Perkiraan Ongkos Kirim	Rp 0,00
Tanggal Pengiriman	22-12-2023 (22 Desember 2023)
Total Harga	Rp 39.183.179,00
Catatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyediakan, melakukan pengiriman, pemasangan perangkat termasuk material pendukung sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah ditentukan oleh MK yang berlokasi di Gedung MKRI Jakarta. 2. Melakukan Instalasi, Commissioning dan Testing tiap perangkat agar dapat saling terintegrasi sesuai fungsinya. 3. Menyediakan perangkat pendukung implementasi seperti kabel koneksi antar perangkat hingga keseluruhan perangkat dapat berfungsi sebagai mana mestinya. 4. Melakukan relokasi dan rekonfigurasi terhadap perangkat di Ruang Sidang. 5. Dokumentasi meliputi Salinan dari Running Config, Serial Number, dan informasi lainnya yang dapat menjadi bahan dokumen perubahan alat. 6. Dukungan Engineer datang ke tempat (untuk pemecahan masalah); 7. Penggantian Barang yang rusak dalam 24 Jam x 7 hari x 4 Minggu; 8. Dukungan Engineer datang ke tempat untuk melakukan penggantian barang semasa garansi; 9. Termasuk seluruh biaya pengiriman barang sampai barang berada ditempat yang ditentukan dan berfungsi kembali; 10. Respon dalam 30 menit Telepon setelah pelaporan; 11. Dalam waktu 30 menit sudah dapat memberikan diagnose dari peralatan Teknologi Informasi yang mengalami kerusakan; 12. Memberikan laporan analisa tertulis maximum 1 hari setelah fungsi alat sudah kembali sebagai mana mestinya dari log-log masing – masing alat yang mengalami kerusakan; 13. Waktu yang dibutuhkan setelah pendiagnosaan kerusakan barang sampai pengiriman barang pengganti berfungsi kembali adalah Jakarta 4 Jam; 14. Engineer menyediakan barang-barang yang diperlukan untuk melakukan perbaikan. 15. Menyediakan masa garansi dan pemeliharaan/service support untuk perangkat seperti melakukan rekonfigurasi, serta penggantian suku cadang terhadap seluruh

perangkat terhitung sejak Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BAST) sampai dengan masa garansi habis.

TELEVIC D-MIC 40 SL

- Televic GSM immune gooseneck microphone of 40cm with bi-colour ledring
- Material = Brass ; Color = Matt Black, RAL 9011
- Garansi 2 tahun

Nama Produk	Monitor Touchscreen 21.5 inch VT229H
Manufaktur	ASUS
Kuantitas	9
Harga Satuan	Rp 4.900.000,00
Perkiraan Ongkos Kirim	Rp 0,00
Tanggal Pengiriman	22-12-2023 (22 Desember 2023)
Total Harga	Rp 44.100.000,00
Catatan	<ol style="list-style-type: none">1. Menyediakan, melakukan pengiriman, pemasangan perangkat termasuk material pendukung sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah ditentukan oleh MK yang berlokasi di Gedung MKRI Jakarta.2. Melakukan Instalasi, Commissioning dan Testing tiap perangkat agar dapat saling terintegrasi sesuai fungsinya.3. Menyediakan perangkat pendukung implementasi seperti kabel koneksi antar perangkat hingga keseluruhan perangkat dapat berfungsi sebagai mana mestinya.4. Melakukan relokasi dan rekonfigurasi terhadap perangkat di Ruang Sidang.5. Dokumentasi meliputi Salinan dari Running Config, Serial Number, dan informasi lainnya yang dapat menjadi bahan dokumen perubahan alat.6. Dukungan Engineer datang ke tempat (untuk pemecahan masalah);7. Penggantian Barang yang rusak dalam 24 Jam x 7 hari x 4 Minggu;8. Dukungan Engineer datang ke tempat untuk melakukan penggantian barang semasa garansi;9. Termasuk seluruh biaya pengiriman barang sampai barang berada ditempat yang ditentukan dan berfungsi kembali;10. Respon dalam 30 menit Telefon setelah pelaporan;11. Dalam waktu 30 menit sudah dapat memberikan diagnose dari peralatan

Teknologi Informasi yang mengalami kerusakan;

12. Memberikan laporan analisa tertulis maximum 1 hari setelah fungsi alat sudah kembali sebagai mana mestinya dari log-log masing – masing alat yang mengalami kerusakan;

13. Waktu yang dibutuhkan setelah pendiagnosaan kerusakan barang sampai pengiriman barang pengganti berfungsi kembali adalah Jakarta 4 Jam;

14. Engineer menyediakan barang-barang yang diperlukan untuk melakukan perbaikan.

15. Menyediakan masa garansi dan pemeliharaan/service support untuk perangkat seperti melakukan rekonfigurasi, serta penggantian suku cadang terhadap seluruh perangkat terhitung sejak Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BAST) sampai dengan masa garansi habis.

Monitor ASUS VT229H Touch Monitor - 21.5"

Display

- Panel Size (inch) : 21.5
- Aspect Ratio : 16:9
- Display Viewing Area (H x V): 476.64 x 268.11 mm
- Display Surface : Glare
- Backlight Type : LED
- Panel Type : IPS
- Viewing Angle (CR10, H/V) : 178°/ 178°
- Pixel Pitch : 0.248mm
- Resolution : 1920x1080
- Brightness (Typ.) : 250cd/
- Contrast Ratio (Typ.) : 1000:1
- ASUS Smart Contrast Ratio (ASCR) : 100000000:1
- Display Colors : 16.7M
- Response Time : 5ms (GTG)
- Refresh Rate (Max) : 60Hz
- Touch : Yes (PCAP Touch)
- Protection Glass : Yes
- Flicker-free : Yes

Video Feature

- Trace Free Technology : Yes
- SPLENDID Technology : Yes
- Color Temp. Selection : Yes (4 modes)
- QuickFit : Yes
- HDCP : Yes
- Low Blue Light : Yes
- Audio Feature
- Speaker : Yes (1.5Wx2)

I/O Ports

- HDMI(v1.4) x 1
- VGA x 1
- Earphone Jack : Yes
- Power Consumption
- Power Consumption : 18.56W
- Power Saving Mode : <0.5W
- Power Off Mode : <0.5W
- Voltage : 100-240V, 50/60Hz
- Garansi 3 Tahun

Nama Produk	Bracket for Monitor 21.5inch VT229H (Custom)
Manufaktur	
Kuantitas	9
Harga Satuan	Rp 2.000.000,00
Perkiraan Ongkos Kirim	Rp 0,00
Tanggal Pengiriman	22-12-2023 (22 Desember 2023)
Total Harga	Rp 18.000.000,00
Catatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyediakan, melakukan pengiriman, pemasangan perangkat termasuk material pendukung sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah ditentukan oleh MK yang berlokasi di Gedung MKRI Jakarta. 2. Melakukan Instalasi, Commissioning dan Testing tiap perangkat agar dapat saling terintegrasi sesuai fungsinya. 3. Menyediakan perangkat pendukung implementasi seperti kabel koneksi antar perangkat hingga keseluruhan perangkat dapat berfungsi sebagai mana mestinya. 4. Melakukan relokasi dan rekonfigurasi terhadap perangkat di Ruang Sidang. 5. Dokumentasi meliputi Salinan dari Running Config, Serial Number, dan informasi lainnya yang dapat menjadi bahan dokumen perubahan alat. 6. Dukungan Engineer datang ke tempat (untuk pemecahan masalah); 7. Penggantian Barang yang rusak dalam 24 Jam x 7 hari x 4 Minggu; 8. Dukungan Engineer datang ke tempat untuk melakukan penggantian barang semasa garansi; 9. Termasuk seluruh biaya pengiriman barang sampai barang berada ditempat yang ditentukan dan berfungsi kembali;

10. Respons dalam 30 menit Telefon setelah pelaporan;
11. Dalam waktu 30 menit sudah dapat memberikan diagnose dari peralatan Teknologi Informasi yang mengalami kerusakan;
12. Memberikan laporan analisa tertulis maximum 1 hari setelah fungsi alat sudah kembali sebagai mana mestinya dari log-log masing – masing alat yang mengalami kerusakan;
13. Waktu yang dibutuhkan setelah pendiagnosaan kerusakan barang sampai pengiriman barang pengganti berfungsi kembali adalah Jakarta 4 Jam;
14. Engineer menyediakan barang-barang yang diperlukan untuk melakukan perbaikan.
15. Menyediakan masa garansi dan pemeliharaan/service support untuk perangkat seperti melakukan rekonfigurasi, serta penggantian suku cadang terhadap seluruh perangkat terhitung sejak Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BAST) sampai dengan masa garansi habis.

BRACKET FOR MONITOR 21.5INCH VT229H (CUSTOM)

- Bracket custom for Monitor 21.5inch

Nama Produk	Confidea BP
Manufaktur	TELEVIC
Kuantitas	27
Harga Satuan	Rp 7.832.800,00
Perkiraan Ongkos Kirim	Rp 0,00
Tanggal Pengiriman	22-12-2023 (22 Desember 2023)
Total Harga	Rp 211.485.600,00
Catatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyediakan, melakukan pengiriman, pemasangan perangkat termasuk material pendukung sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah ditentukan oleh MK yang berlokasi di Gedung MKRI Jakarta. 2. Melakukan Instalasi, Commissioning dan Testing tiap perangkat agar dapat saling terintegrasi sesuai fungsinya. 3. Menyediakan perangkat pendukung implementasi seperti kabel koneksi antar perangkat hingga keseluruhan perangkat dapat berfungsi sebagai mana mestinya. 4. Melakukan relokasi dan rekonfigurasi terhadap perangkat di Ruang Sidang.

5. Dokumentasi meliputi Salinan dari Running Config, Serial Number, dan informasi lainnya yang dapat menjadi bahan dokumen perubahan alat.
6. Dukungan Engineer datang ke tempat (untuk pemecahan masalah);
7. Penggantian Barang yang rusak dalam 24 Jam x 7 hari x 4 Minggu;
8. Dukungan Engineer datang ke tempat untuk melakukan penggantian barang semasa garansi;
9. Termasuk seluruh biaya pengiriman barang sampai barang berada ditempat yang ditentukan dan berfungsi kembali;
10. Respons dalam 30 menit Telefon setelah pelaporan;
11. Dalam waktu 30 menit sudah dapat memberikan diagnose dari peralatan Teknologi Informasi yang mengalami kerusakan;
12. Memberikan laporan analisa tertulis maximum 1 hari setelah fungsi alat sudah kembali sebagai mana mestinya dari log-log masing – masing alat yang mengalami kerusakan;
13. Waktu yang dibutuhkan setelah pendiagnosaan kerusakan barang sampai pengiriman barang pengganti berfungsi kembali adalah Jakarta 4 Jam;
14. Engineer menyediakan barang-barang yang diperlukan untuk melakukan perbaikan.
15. Menyediakan masa garansi dan pemeliharaan/service support untuk perangkat seperti melakukan rekonfigurasi, serta penggantian suku cadang terhadap seluruh perangkat terhitung sejak Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BAST) sampai dengan masa garansi habis.

TELEVIC CONFIDEA BP G3

- Confidea Battery Pack
- Supply voltage 15 V; Capacity 6600 mAh ; Autonomy 28 hours; Max/min output voltage 8.4/5.9 VDC; Nominal output voltage 7.2 VDC; Charging time 4 hours; Quick charge to 50% 1 hour
- Garansi 2 tahun



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

SURAT TUGAS Nomor 2.1/2700/01/2024

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memberikan informasi yang lebih luas dan interaktif kepada masyarakat dan meningkatkan aksesibilitas dan transparansi dalam proses pengadilan, serta memberikan informasi yang lebih detail dan akurat tentang putusan-putusan Mahkamah Konstitusi, maka perlu menugaskan Pegawai Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk melakukan pengembangan pada laman Mahkamah Konstitusi;
- b. bahwa untuk mendukung maksud sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu menerbitkan Surat Tugas kepada pegawai yang untuk menjadi bagian tim dimaksud.
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 158);
2. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029;
3. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
4. *Grand Design* Teknologi Peradilan Konstitusi Tahun 2023 – 2027.

Memberi Tugas:

- Kepada : Nama terlampir
- Untuk : 1. Melaksanakan tugas pembuatan desain dan pengembangan laman Mahkamah Konstitusi, terhitung mulai tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan Maret 2024;
2. Melaksanakan tugas dengan penuh tanggungjawab dan melaporkan hasilnya.

Jakarta, 10 Januari 2024
Kepala Pusat Teknologi Informasi dan
Komunikasi
Sigit Purnomo

Tembusan Yth.:

1. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan;
2. Kepala Biro SDMO.



Digital Signature
mk995553633240709080646

Lampiran Surat Tugas
Nomor : 2.1/2700/01/2024
Tanggal : 10 Januari 2024

DAFTAR NAMA

NO	NAMA	JABATAN
1.	Sigit Purnomo	Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi
2.	Tarnoto	Pranata Komputer Ahli Muda
3.	Ishak Purnama	Pranata Komputer Ahli Pertama
4.	Rachman Karim	Pranata Komputer Ahli Pertama
5.	Hafidz Ikhsan Baihaki	Pranata Komputer Ahli Pertama
6.	Debby	Pranata Komputer Ahli Pertama





**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**



**LEMBAGA NEGARA
PENGAWAL KONSTITUSI**

PERKARA

PROSEDUR PERMOHONAN (<INDEX.PHP?PAGE=WEB.PENDAFTARANPEMOHONAN&MENU=4>)

PERMOHONAN ONLINE (<HTTP://SIMPEL.MKRI.ID>)

TAHAPAN PERKARA

PENGAJUAN PERMOHONAN (<INDEX.PHP?PAGE=WEB.PERMOHONAN&MENU=4>)

PEMERIKSAAN KELENGKAPAN (<INDEX.PHP?PAGE=WEB.PEMERIKSAANKELENGKAPAN&MENU=4>)

PERBAIKAN PERMOHONAN (<INDEX.PHP?PAGE=WEB.PERBAIKANPERMOHONAN&MENU=4>)

REGISTRASI (<INDEX.PHP?PAGE=WEB.REGISTRASI2&MENU=4>)

PENYAMPAIAN SALINAN PERMOHONAN DAN PEMBERITAHUAN SIDANG PERTAMA (<INDEX.PHP?PAGE=WEB.SALINANPERMOHONANDANSIDANG&MENU=4>)

PEMERIKSAAN PENDAHULUAN (<INDEX.PHP?PAGE=WEB.PEMERIKSAANPENDAHULUAN&MENU=4>)

PEMERIKSAAN PERSIDANGAN (<INDEX.PHP?PAGE=WEB.PEMERIKSAANPERKARA&MENU=4>)

SIDANG PENGUCAPAN PUTUSAN (<INDEX.PHP?PAGE=WEB.PUTUSAN&ID=1&KAT=1&MENU=5>)

PENYERAHAN SALINAN PUTUSAN (<INDEX.PHP?PAGE=WEB.SALINANPUTUSAN&MENU=4>)

PERSIDANGAN

JADWAL SIDANG (<INDEX.PHP?PAGE=WEB.JADWALSIDANG&ID=1&KAT=1&MENU=4>)

RISALAH (<INDEX.PHP?PAGE=WEB.RISALAHSIDANG&ID=1&KAT=1&MENU=4>)

ANOTASI (<INDEX.PHP?PAGE=WEB.ANOTASI&ID=3&PAGES=1&MENU=4>)

REKAPITULASI PERKARA

REKAPITULASI PERKARA PUU (<INDEX.PHP?PAGE=WEB.REKAPPUU&MENU=4>)

REKAPITULASI PERKARA SKLN (<INDEX.PHP?PAGE=WEB.REKAPSKLN&MENU=4>)

REKAPITULASI PERKARA PHPKADA (<INDEX.PHP?PAGE=WEB.REKAPPHPUD&MENU=4>)

REKAPITULASI PERKARA PHPU (<INDEX.PHP?PAGE=WEB.REKAPPHPU&MENU=4>)

Rekapitulasi Putusan

No	Perkara	Jumlah	Persentase
----	---------	--------	------------

1	PUU	1801	45.70%
2	SKLN	29	0.74%
3	PHPU	975	24.74%
4	PHPKADA	1136	28.83%
Total		3941	100%

Grafik PUU



FusionCharts XT Trial

Grafik SKLN



FusionCharts XT Trial

Grafik PHPU



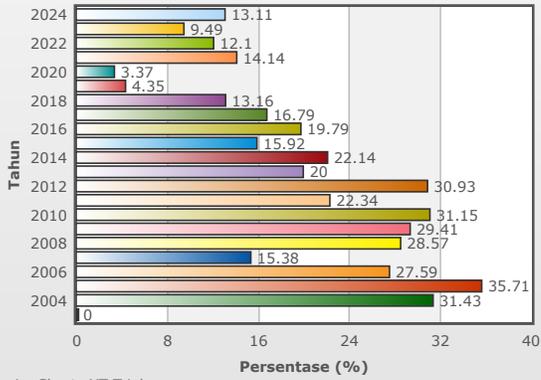
FusionCharts XT Trial

Grafik PHPKADA



FusionCharts XT Trial

Grafik Putusan PUU Kabul (317)
rata-rata: (17.60%)



BERANDA (INDEX.PHP?PAGE=WEB.BERANDA) > INFORMASI PERSIDANGAN > JADWAL SIDANG

JADWAL SIDANG

PANEL ALL

Copy CSV Print

Cari:

Tanggal	Perkara	Pemohon	Kuasa	Acara	Keterangan
Rabu 03 Juli 2024, 09:00 WIB	38/PUU-XXII/2024 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara	M. Robin Salam, Ir.	Mohammad Erzad Kasshiraghi	Perbaikan Permohonan (II)	Tempat: Gd. MKRI 1 Lantai 2 Tracking Tracking (https://tracking.mkri.id/index.php?page=web.Trac
Rabu 03 Juli 2024, 09:30 WIB	39/PUU-XXII/2024 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	Muhammad Kahfi Andhika Bayu Adji		Perbaikan Permohonan (II)	Tempat: Gd. MKRI 1 Lantai 2 Tracking Tracking (https://tracking.mkri.id/index.php?page=web.Trac

Tanggal ⇅	Perkara ⇅	Pemohon ⇅	Kuasa ⇅	Acara ⇅	Keterangan
Rabu 03 Juli 2024, 10:00 WIB	40/PUU-XXII/2024 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional	Indonesia Food Security Review, dll.	Glory Harimas Sihombing, I Dewa Made Agung Kertha Nugraha, Winda Purnama Ningsih	Perbaikan Permohonan (II)	Tempat: Gd. MKRI 1 Lantai 2 Tracking Tracking (https://tracking.mkri.id/index.php?page=web.Trac
Rabu 03 Juli 2024, 10:30 WIB	42/PUU-XXII/2024 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara	ERWIN EDISON	M. MAULANA BUNGARAN, SH, MH YUNICO SYAHRIR, SH RAKA GANI PISSANI, SH, MH	Pemeriksaan Pendahuluan (I)	Tempat: Gd. MKRI 1 Lantai 2 Tracking Tracking (https://tracking.mkri.id/index.php?page=web.Trac
Rabu 03 Juli 2024, 13:30 WIB	45/PUU-XXII/2024 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap UUD 1945	Ir. H. Didi Apriadi	Ridwan Bakar, S.H. dan M. Malik Ibrohim, S.H., M.H.	Pemeriksaan Pendahuluan (I)	Tempat: Gd. MKRI 1 Lantai 2 Tracking Tracking (https://tracking.mkri.id/index.php?page=web.Trac
Kamis 04 Juli 2024, 10:30 WIB	87/PUU-XXI/2023 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana	Gugum Ridho Putra, S.H., M.H.	Muhammad Iqbal Sumarlan Putra, S.H, M.H. Dega Kautsar Pradana, S,H., M.Si (Han) Yolis Suhadi, S.H.,M.H Gatot Priadi.,S.H..M.H Irfan Maulana Muharam S.H	Mendengarkan Keterangan Panglima TNI, Keterangan Tambahan dari PJI, Ahli dari Pihak Terkait Panglima TNI, dan Ahli dari Pihak Terkait PJI (IX)	Tempat: Gd. MKRI 1 Lantai 2 Tracking Tracking (https://tracking.mkri.id/index.php?page=web.Trac

Tanggal ⇅	Perkara ⇅	Pemohon ⇅	Kuasa ⇅	Acara ⇅	Keterangan
Kamis 04 Juli 2024, 13:30 WIB	47/PUU-XXII/2024 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan	Elrodo Natama Sihaloho; Ir. Pierre W.G. Abraham; Andry Hendarsyah, S.T.; Saiful Alamsyah; dan Usman			Pemeriksaan Pendahuluan (I) Tempat: Gd. MKRI 1 Lantai 4 Tracking Tracking (https://tracking.mkri.id/index.php?page=web.Trac
Kamis 04 Juli 2024, 13:30 WIB	54/PUU-XXII/2024 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang	Aditya Anugrah Moha, S. Ked.	M Imam Nasef, SH., MH		Pemeriksaan Pendahuluan (I) Tempat: Gd. MKRI 1 Lantai 2 Tracking Tracking (https://tracking.mkri.id/index.php?page=web.Trac

Tanggal	Perkara	Pemohon	Kuasa	Acara	Keterangan
Kamis 04 Juli 2024, 15:00 WIB	48/PUU-XXII/2024 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Perwakilan Rakyat Daerah dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	H. Ahmad Kanedi, S.H., M.H. (Pemohon I); Dewi Sartika Hemeto, S.E. (Pemohon II); M. Fadhil Rahmi (Pemohon III); Ir. H. Iskandar Muda Baharuddin Lopa (Pemohon IV); Zainal Arifin (Pemohon V); Prof. Dr. HJ. Sylviana Murni, S.H., M.Si. (Pemohon VI); Djafar Alkatiri (Pemohon VII); dan Edwin Pratama Putra, S.H.	MAKHFUD, S.H.,M.H. AGUSTAM RACHMAN, S,H,M.APS	Pemeriksaan Pendahuluan (I)	Tempat: Gd. MKRI 1 Lantai 2 Tracking Tracking (https://tracking.mkri.id/index.php?page=web.Trac
Jum'at 05 Juli 2024, 09:00 WIB	52/PUU-XXII/2024 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang	Ahmad Farisi (Pemohon I) dan A Fahrur Rozi (Pemohon II)		Pemeriksaan Pendahuluan (I)	Tempat: Gd. MKRI 1 Lantai 2 Tracking Tracking (https://tracking.mkri.id/index.php?page=web.Trac

Showing 1 to 10 of 25 entries

Previous 1 2 3 Next

klik disini untuk Jadwal Sidang Versi Lama (<http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.JadwalSidang2&id=1&kat=1&menu=4>)

2352-9000

KIRIM SURAT

([index.php?page=web.SendEmail&menu=2](#))

TANYA JAWAB

([index.php?page=web.Pengaduan&id=1&kat=1&cari=&menu=7](#))

WHISTLEBLOWING

([http://wbs.mkri.id](#))

HUBUNGI MK

([https://contactmk.mkri.id/](#))

MEDIA SOSIAL

([http://www.facebook.com/officialMK](#))

([https://twitter.com/officialMKRI](#))

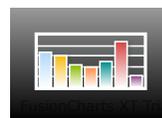
([http://www.youtube.com/mahkamal](#))

([https://www.instagram.com/mahkar](#))

([https://play.google.com/store/apps/id=mkri.go.id](#))

([https://itunes.apple.com/us/app/clicmk/id1448150873?ls=1&mt=8](#))

PENGUNJUNG



DOKUMENTASI FITUR JURU PANGGIL DAN BANGKU SIDANG PADA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PENANGANAN PERKARA KONSTITUSI

simppbaru.mki.id/index.php?page=phpu.jurpangDaftarSurat&id=3776&noper=09-01-14-11%2FPHPU.DPR-DPRD-XXII%2F2024

SIMPP MAHKAMAH KONSTITUSI

Hakim Search

Jeklin Indriani Purba

Setting Dashboard

KALENDER KEGIATAN

AKTA & FILE

PERMOHONAN

PERKARA

LAPORAN PHPU 2024

KONSULTASI PHPU

Juru Panggil

Perkara Nomor 09-01-14-11/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

Jenis Surat : Pilih

Para Pihak : Pilih

Surat Baru

NO.	TANGGAL SURAT	TUJUAN	JUDUL SURAT	STATUS	ACTION
1	2024-06-04 07:08:21	Pihak Terkait Partai NasDem	Panggilan Sidang nomor 968/Sid.Put/DPR-DPRD/Pan.MK/06/2024	<ul style="list-style-type: none"> Approve Koord. Panel Digital Signature Send Email Send WA 	<ul style="list-style-type: none"> Preview EDIT Delete
2	2024-06-04 07:07:33	Pemohon	Panggilan Sidang nomor 968/Sid.Put/DPR-DPRD/Pan.MK/06/2024	<ul style="list-style-type: none"> Approve Koord. Panel Digital Signature Send Email Send WA 	<ul style="list-style-type: none"> Preview EDIT Delete

simppbaru.mki.id/index.php?page=sidang.php.LayoutSidang2&id=10680,10686,10689,10692,10697,10700,10707,10715,10718,10722,10729,10731,10734,&idj=3&panel=PLENO

SIMPP MAHKAMAH KONSTITUSI

Jeklin Indriani Purba

Setting Dashboard

KALENDER KEGIATAN

AKTA & FILE

PERMOHONAN

PERKARA

LAPORAN PHPU 2024

KONSULTASI PHPU

ZONA A

Baris 1

A1 PEMOHON Putu Brava Timothy, S.H., M.H. 191-01-03- 22/PHPU.DPR-DPRD- XXII/2024	A2 PEMOHON 193-01-03- 22/PHPU.DPR-DPRD- XXII/2024	A3 PEMOHON Harunuddin S.H. 196-01-16- 22/PHPU.DPR-DPRD- XXII/2024	A4 PEMOHON Muhammad Rizki Bersyah, S.H., M.H. 196-01-14- 22/PHPU.DPR-DPRD- XXII/2024	A5 PEMOHON La Ode Muhammad Rusliadi Suhi 177-01-16- 22/PHPU.DPR-DPRD- XXII/2024	A6 PEMOHON Ahmad Kallani 177-01-16- 22/PHPU.DPR-DPRD- XXII/2024	A7 PEMOHON Sodik Edson Marpaung 177-01-03-22/PHPU.DPR- DPRD-XXII/2024	A8 PEMOHON Amnia Dwa Pricessa 177-01-03-22/PHPU.DPR- DPRD-XXII/2024
---	--	---	---	--	---	--	--

Baris 2

A9 PEMOHON MUHAMMAD MUALIMIN 199-01-14- 22/PHPU.DPR-DPRD- XXII/2024	A10 PEMOHON NATHANIEL HUTAGAL 199-01-16- 22/PHPU.DPR-DPRD- XXII/2024	A11 PEMOHON Heri Perdana Tarigan, S.H., M.H. 140-01-03- 22/PHPU.DPR-DPRD- XXII/2024	A12 PEMOHON 140-01-03- 22/PHPU.DPR-DPRD- XXII/2024	A13 PEMOHON Heru Juanta, S.H. 202-01-08- 22/PHPU.DPR-DPRD- XXII/2024	A14 PEMOHON Edius Pratama, S.H. 202-01-08- 22/PHPU.DPR-DPRD- XXII/2024	A15 PEMOHON Samuel David, S.H. 170-01-03- 22/PHPU.DPR-DPRD- XXII/2024	A16 PEMOHON 170-01-03- 22/PHPU.DPR-DPRD- XXII/2024	A17 PEMOHON ERRY ARUDHANSYAH, S.H., M.H. 166-01-01- 24/PHPU.DPR-DPRD- XXII/2024	A18 PEMOHON RAENI ADIDAMMO PRIMODI, S.H. 166-01-01- 24/PHPU.DPR-DPRD- XXII/2024	A19 PEMOHON Sabhat Hidayat 166-01-01-24/PHPU.DPR- DPRD-XXII/2024
---	--	--	---	--	--	---	---	--	--	---

A20 PEMOHON
198-01-01-26/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024

Baris 3

A21 PEMOHON La Ode Muhammad Rusliadi Suhi 188-02-16- 22/PHPU.DPR-DPRD- XXII/2024	A22 PEMOHON Ahmad Kallani 188-02-16- 22/PHPU.DPR-DPRD- XXII/2024	A23 PEMOHON La Ode Muhammad Rusliadi Suhi 188-02-16- 22/PHPU.DPR-DPRD- XXII/2024	A24 PEMOHON Ahmad Kallani 188-02-16- 22/PHPU.DPR-DPRD- XXII/2024	A25 PEMOHON Wahidul SH 203-01-09- 22/PHPU.DPR-DPRD- XXII/2024	A26 PEMOHON Fili Alimuryah SH 203-01-09- 22/PHPU.DPR-DPRD- XXII/2024	A27	A28	A29	A30	A31
---	--	---	--	---	--	-----	-----	-----	-----	-----

A32

A33

A34

A35

A36

ZONA A2

SIMPP MAHKAMAH KONSTITUSI

Jeklin Indriani Purba

- Setting
- Dashboard
- KALENDER KEGIATAN
- Akta & FILE
- PERMOHONAN
- PERKARA
- LAPORAN PHPU 2024
- KONSULTASI PHPU

Check in Ruang Sidang

Ruang Sidang : RUANG SIDANG PLENO

CHECK-IN RUANG SIDANG

Layout Sidang

- 1. CETAK DAFTAR HADIR
- 2. CETAK KONFIRMASI KEHADIRAN PARA PIHAK
- 3. CETAK KEHADIRAN PARA PIHAK
- 4. CETAK KEHADIRAN PER-PANEL

Download Layout

LAYOUT PERSIDANGAN

Hari: Senin, 10 Juni 2024 - Pukul 08:30 WIB s.d Selesai
Tempat: Gd. MKRI 11 Lantai 2
Acara: Pengesahan Putusan/Ketetapan

MAJELIS HAKIM

1. ANWAR USMAN
2. GUNTUR HAMZAH
3. DANIEL YUSMIC PANCASTAKI FOEKH
4. ARIEF HIDAYAT
5. SUHARTOYO
6. SALDI ISRA
7. ENNY NURBANINGSIH

SIMPP MAHKAMAH KONSTITUSI

Jeklin Indriani Purba

- Setting
- Dashboard
- KALENDER KEGIATAN
- Akta & FILE
- PERMOHONAN
- PERKARA
- LAPORAN PHPU 2024
- KONSULTASI PHPU

Banguk sidang sudah di plotting.

[e-Mail](#) [Whatsapp](#) [E-minutasi Ulang](#) [TTD Ulang](#) [Refresh](#)

[Kirim Manual](#) [Daftar Penerima\(WA\)](#) [Daftar Penerima\(Email\)](#) [Kirim Link Sidang](#)

Hal TTD : [Ubah](#)

Lampiran : [Choose File](#) No file chosen [Lampirkan](#)

Sudah Ditandatangani Secara Digital

6634eb172500e... 1 / 1 86%

**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 549/Sid.Pem/DPR-DPRD/Pan.MK/05/2024 03 Mei 2024
Hal : Panggilan Sidang

Yth. Dr. Mehbob, S.H., M.H., CN., dkk
sebagai Kuasa Hukum Pemohon
di Tempat

Dengan Hormat,
Mahkamah Konstitusi berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (PMK 2/2023), dengan ini menyampaikan panggilan sidang dalam perkara yang diajukan oleh:

Partai Demokrat, yang memberikan kuasanya kepada **Dr. Mehbob, S.H., M.H., CN., dkk**
Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon;
Terhadap

Komis Pemilihan Umum, yang memberikan kuasanya kepada **Dr. Petrus P. Eli, S.H., M.H.M Ph.D., dkk**
Selanjutnya disebut sebagai ----- Termohon;

Perihal perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024 yang telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik Nomor 09-01-14-11/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 pada hari Selasa, 23 April 2024 pukul 14:00 WIB, agar hadir dalam persidangan dimaksud yang akan diselenggarakan pada:

hari : Senin
tanggal : 13 Mei 2024
waktu : Pukul 13:30 WIB

SIMPP MAHKAMAH KONSTITUSI

Jeklin Indriani Purba

- Setting
- Dashboard
- KALENDER KEGIATAN
 - Kegiatan
- AKTA & FILE
 - Akta
 - File
 - Laporan Kinerja
 - Dashboard
- PERMOHONAN
 - Permohonan Online 9
 - Permohonan Pemohon 0
 - Permohonan Pihak Terkait
- PERKARA
 - Perkara Dalam Proses 31
 - Perkara Sudah Putusan
- LAPORAN PHPU 2024
 - Data Master
 - Permohonan
 - Para Pihak
 - Putusan 275
 - Dapil Lanjut
 - Perkara Lanjut
 - Laporan per Tahapan PMK
 - Laporan Juru Panggil
- KONSULTASI PHPU
 - Konsultasi Chat Online (Simpel)

Juru Panggil

Format -- Font family -- Font size -- B I U ABC x₁ x₂

REPUBLIC INDONESIA

Nomor : 549/Sid.Pem/DPR-DPRD/Pan.MK/05/2024 10 Juni 2024
Hal : Panggilan Sidang

Yth. Dr. Mehbob, S.H., M.H., CN., dkk
Kuasa Hukum Pemohon
di Tempat

Dengan Hormat,
Mahkamah Konstitusi berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (PMK 2/2023), dengan ini menyampaikan panggilan sidang dalam perkara yang diajukan oleh:

Partai Demokrat, yang memberikan kuasanya kepada **Dr. Mehbob, S.H., M.H., CN., dkk**
Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;
Terhadap

Komisi Pemilihan Umum, yang memberikan kuasanya kepada **Dr. Petrus P. Eli, S.H., M.H.M Ph.D., dkk**
Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Perihal perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024 yang telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik Nomor 09-01-14-11/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 pada hari Selasa, 23 April 2024 pukul 14:00 WIB. Berkenaan hal dimaksud, agar hadir dalam persidangan (sebagaimana jadwal terlampir) yang akan diselenggarakan pada:

hari : Senin
tanggal : 13 Mei 2024
waktu : Pukul 13:30 WIB
tempat : Ruang Sidang Gd. MKRI 1
Lantai 4
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6, Jakarta

acara : Mendengarkan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait dan Keterangan Bawaslu serta Pengesahan Alat Bukti Para Pihak

Demikian, panggilan sidang ini disampaikan oleh Panitera melalui Juru Panggil Mahkamah Konstitusi.

**Pt. Panitera
Muhidin**

Tembusan:

- Y.M. Ketua Mahkamah Konstitusi

Catatan: Para Pihak wajib hadir di ruang sidang 60 (enam puluh) menit sebelum persidangan dimulai.

Path:

SIMPAN

c. Setelah mengisi bangku selanjutnya adalah print atau kirim wa kartu bangku, kartu bangku ini yang akan di bawa ke Mahkamah Konstitusi pada saat ingin masuk keruang sidang.

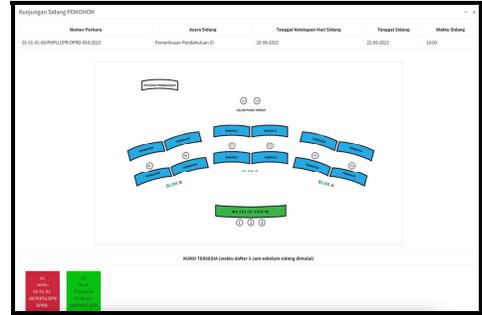


Gambar 12 Cetak Konfirmasi Kehadiran dan WA Qrcode bangku sidang untuk kehadiran



Petunjuk Pengisian Konfirmasi Kehadiran

a. Para pihak melakukan konfirmasi kehadiran dengan mengisi bangku yang tersedia di aplikasi dengan meng-klik bangku warna hijau



Gambar 10 Konfirmasi kehadiran

b. Setelah meng-klik nomor bangku maka selanjutnya isi nama yang akan hadir pada bangku tersebut.



Gambar 11 Form Konfirmasi Kehadiran Sesuai dengan kuota bangku sidang

**NOMOR A1
PEMOHON**

Data Pengunjung
 Nama :ERRY AYUDHIANSYAH, S.H, M.H.
 KTP :15.00454
 No. HP :08121045717
 Sebagai:KUASA
 Tanggal:2024-05-05 19:09:52
 Daftar

Info Sidang
 Waktu :2024-05-06, 15:30 WIB
 Sidang
 No :156-02-01-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
 Perkara
 Acara :Mendengarkan Jawaban Termohon, Keterangan
 Sidang Pihak Terkait dan Keterangan Bawaslu serta
 Pengesahan Alat Bukti Para Pihak
 Lokasi :Ruang Sidang PANEL 2



Catatan: Para Pihak wajib hadir di ruang sidang 60 menit sebelum persidangan dimulai.



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**



**LEMBAGA NEGARA
PENGAWAL KONSTITUSI**

PUTUSAN

PUTUSAN (INDEX.PHP?PAGE=WEB.PUTUSAN&ID=1&KAT=1&MENU=5)

PUTUSAN PUU (INDEX.PHP?PAGE=WEB.PUTUSAN&ID=1&KAT=1&MENU=5&JENIS=PUU&JNSPERKARA=1)

PUTUSAN SKLN (INDEX.PHP?PAGE=WEB.PUTUSAN&ID=1&KAT=1&MENU=5&JENIS=SKLN&JNSPERKARA=1)

PUTUSAN PHPU (INDEX.PHP?PAGE=WEB.PUTUSAN&ID=1&KAT=1&MENU=5&JENIS=PHPU&JNSPERKARA=1)

PUTUSAN PHPKADA (INDEX.PHP?PAGE=WEB.PUTUSAN&ID=1&KAT=1&MENU=5&JENIS=PHP&JNSPERKARA=1)

Rekapitulasi Putusan

No	Perkara	Jumlah	Persentase
1	PUU	1801	46%
2	SKLN	29	1%
3	PHPU	975	25%
4	PHPKADA	1136	29%
Total		3941	100%

Grafik PUU



FusionCharts XT Trial

Grafik SKLN



FusionCharts XT Trial

Grafik PHPU



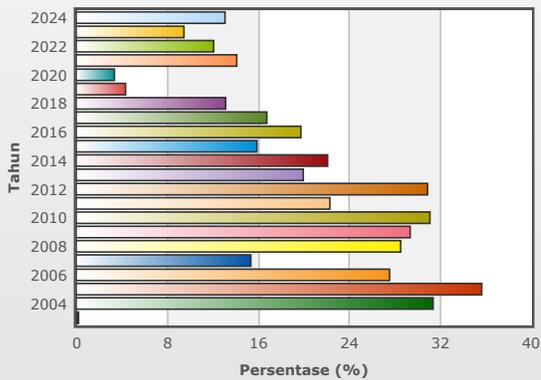
FusionCharts XT Trial

Grafik PHPKADA



FusionCharts XT Trial

Grafik Putusan PUU Kabul (317)
rata-rata: (17.60%)



FusionCharts XT Trial

BERANDA (INDEX.PHP?PAGE=WEB.BERANDA) > INFORMASI PERSIDANGAN > PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Sidang Pengucapan Putusan merupakan tahap akhir dalam proses persidangan di MK. Sidang Pengucapan Putusan dilaksanakan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum yang dihadiri paling sedikit 7 (tujuh) orang Hakim dan para pihak. Putusan MK, mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka. Putusan yang telah diucapkan dalam Sidang Pleno diunggah pada laman MK (www.mkri.id) dan dapat diakses oleh masyarakat.

Nomor

10
Jun
2024
17:36 WIB

Nomor : 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024
 Pokok Perkara : Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024
 Pemohon : Drs. H. Irman Gusman, MBA
 Amar Putusan : Dalam Eksepsi Menolak eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah, teggang waktu pengajuan permohonan, kedudukan hukum, dan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur; Dalam Pokok Permohonan 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan hasil perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Barat harus dilakukan pemungutan suara ulang; 3. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan

Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB sepanjang berkaitan dengan perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Barat; 4. Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang pemilihan umum calon anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024 Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan mengikutsertakan Pemohon sebagai peserta pemilihan umum calon anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Barat dan bagi Pemohon wajib mengumumkan secara jujur dan terbuka tentang jati dirinya termasuk pernah menjadi terpidana melalui media yang dapat dibaca secara luas oleh masyarakat termasuk pemilih, dalam waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari sejak Putusan a quo diucapkan dan menetapkan perolehan suara yang benar hasil pemungutan suara ulang tersebut tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah; 5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini; 6. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini; 7. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Daerah Sumatera Barat untuk melakukan pengamanan proses pemungutan suara ulang tersebut sesuai dengan kewenangannya;

Status : Mengabulkan Seluruhnya
 Di Unduh : 3585
 Kata Kunci : Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024
 File Pendukung : [Klik Disini \(index.php?page=download.Putusan&id=4567\)](#)

10
 Jun
 2024
 17:18 WIB

Nomor : 145-01-02-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
 Pokok Perkara : Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024
 Pemohon : Partai Gerakan Indonesia Raya
 Amar Putusan : Dalam Eksepsi Menolak eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah; Dalam Pokok Permohonan Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
 Status : Menolak Seluruhnya
 Di Unduh : 1860
 Kata Kunci : Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024
 File Pendukung : [Klik Disini \(index.php?page=download.Putusan&id=4561\)](#)

10
 Jun
 2024
 17:12 WIB

Nomor : 116-01-03-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
 Pokok Perkara : Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024
 Pemohon : Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
 Amar Putusan : Dalam Eksepsi
 1. Menolak eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah;
 2. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan Permohonan Pemohon kabur;
 Dalam Pokok Permohonan
 Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
 Status : Menolak Seluruhnya
 Di Unduh : 794
 Kata Kunci : Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024
 File Pendukung : [Klik Disini \(index.php?page=download.Putusan&id=4571\)](#)

10
Jun
2024
17:06 WIB

Nomor : 280-02-02-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
Pokok Perkara : Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI,DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Jawa Timur Dapil BANGKALAN 4 Tahun 2024
Pemohon : MUSLECH
Amar Putusan : Dalam Eksepsi Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya. Dalam Pokok Permohonan Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
Status : Menolak Seluruhnya
Di Unduh : 958
Kata Kunci : Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI,DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Jawa Timur Dapil BANGKALAN 4 Tahun 2024
File Pendukung : Klik Disini (<index.php?page=download.Putusan&id=4562>)

10
Jun
2024
16:53 WIB

Nomor : 269-01-08-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
Pokok Perkara : Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI,DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2024
Pemohon : Partai Keadilan Sejahtera
Amar Putusan : Dalam Eksepsi Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya. Dalam Pokok Permohonan 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian. 2. Menyatakan hasil perolehan suara partai politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangkalan sepanjang hasil pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangkalan Daerah Pemilihan Bangkalan 5 harus dilakukan penghitungan surat suara ulang. 3. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024, sepanjang untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Bangkalan di Daerah Pemilihan Bangkalan 5. 4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum in casu KPU Kabupaten Bangkalan untuk melakukan penghitungan surat suara ulang di TPS 1, TPS 3, TPS 5, TPS 6, TPS 11, TPS 12, TPS 15, TPS 18, TPS 19, dan TPS 22 Desa Langkap, Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan, dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari sejak pengucapan Putusan a quo. 5. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk menggabungkan perolehan suara hasil penghitungan surat suara ulang sebagaimana diperintahkan pada Amar Putusan angka 4 dengan perolehan suara pada TPS-TPS yang tidak dilakukan penghitungan surat suara ulang, serta menetapkan dan mengumumkan hasil penghitungan suara tersebut tanpa harus melaporkan kepada Mahkamah. 6. Memerintahkan Bawaslu, Bawaslu Provinsi Jawa Timur, dan Bawaslu Kabupaten Bangkalan, untuk melakukan pengawasan dalam pelaksanaan penghitungan surat suara ulang sebagaimana dimaksud pada amar angka 4 Putusan a quo. 7. Memerintahkan Kepolisian Negara Republik Indonesia atau jajarannya untuk melakukan pengamanan terhadap proses penghitungan surat suara ulang sesuai dengan kewenangannya. 8. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.
Status : Mengabulkan Sebagian
Di Unduh : 583
Kata Kunci : Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI,DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2024
File Pendukung : Klik Disini (<index.php?page=download.Putusan&id=4570>)

10
Jun
2024
16:37 WIB

Nomor : 261-01-12-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
Pokok Perkara : Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI,DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2024
Pemohon : Partai Amanat Nasional
Amar Putusan : Dalam Eksepsi Menolak eksepsi Termohon serta eksepsi Pihak Terkait I Partai Gerindra dan eksepsi Pihak Terkait II Partai Demokrat untuk seluruhnya; Dalam Pokok Permohonan 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian; 2. Menyatakan hasil perolehan suara partai politik dan calon anggota DPR sepanjang Dapil Jawa Timur IV dan calon

anggota DPRD Kabupaten Pamekasan sepanjang Dapil Pamekasan 2 harus dilakukan penghitungan surat suara ulang; 3. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024, sepanjang perolehan suara Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Jawa Timur IV dan sepanjang perolehan suara Anggota DPRD Kabupaten Pamekasan Daerah Pemilihan Pamekasan 2;

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum in casu Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur untuk melakukan penghitungan surat suara ulang dalam waktu paling lama 15 (lima belas) hari sejak pengucapan Putusan a quo pada 105 TPS di Kecamatan Sumberbaru untuk Anggota DPR RI Dapil Jawa Timur IV, sebagai berikut: Desa TPS Jamintoro 012 Jambesari 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017 Yosorati 001, 005, 006, 007, 009, 013, 017, 018, 019, 028, 032, 035, 037, 042, 043, 048, 051 Gelang 001, 002, 003, 005, 007, 008, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 018, 020, 026, 028, 029, 031, 038, 040, 045, 048, 050 Pringgowirawan 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 011, 012, 013, 015, 019, 020, 023, 024, 025, 026, 027, 028, 029, 030, 033, 035, 037, 038, 039, 040, 041 Karangbayat 001, 002, 003, 005, 006, 007, 008, 012, 013, 014, 017, 018, 022, 024, 025, 026, 029

5. memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum in casu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan untuk melakukan penghitungan surat suara ulang dalam waktu paling lama 15 (lima belas) hari sejak pengucapan Putusan a quo pada 15 TPS di Kecamatan Proppo dan Kecamatan Palengaan untuk Anggota DPRD Kabupaten Pamekasan Dapil Pamekasan 2, sebagai berikut: Desa TPS Tattangoh TPS 4 Larangan Badung TPS 22, TPS 25, TPS 26 Palengaan Dajah TPS 19 Bayupelle TPS 4, TPS 6, TPS 14, TPS 16, TPS 23, TPS 27 Potoan Laok TPS 903, TPS 904, TPS 905, TPS 906

6. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk menetapkan perolehan suara hasil penghitungan surat suara ulang sebagaimana angka 4 dan angka 5 di atas dan kemudian digabungkan dengan perolehan suara hasil pemungutan suara untuk Anggota DPR RI Dapil Jawa Timur IV dan Anggota DPRD Kabupaten Pamekasan Dapil Pamekasan 2 yang tidak dilakukan penghitungan surat suara ulang serta menetapkan dan mengumumkan hasil penghitungan surat suara ulang tanpa harus melaporkan kepada Mahkamah;

7. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu Provinsi Jawa Timur, dan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Pamekasan untuk melakukan pengawasan dalam pelaksanaan penghitungan surat suara ulang sebagaimana angka 4 dan angka 5 di atas;

8. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia atau jajarannya untuk melakukan pengamanan proses penghitungan surat suara ulang tersebut sesuai dengan kewenangannya.

9. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Status : Mengabulkan Sebagian

Di Unduh : 807

Kata Kunci : Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2024

File Pendukung : [Klik Disini \(index.php?page=download.Putusan&id=4564\)](#)

10
Jun
2024
16:16 WIB

Nomor : 118-01-14-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

Pokok Perkara : Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2024

Pemohon : Partai Demokrat

Amar Putusan : Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya;
Dalam Pokok Permohonan

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian.

2. Menyatakan hasil perolehan suara partai politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember sepanjang hasil pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten

Jember Daerah Pemilihan Jember 1 harus dilakukan pencermatan ulang hasil rekapitulasi.

3. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024, sepanjang perolehan suara Partai NasDem untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Jember di Daerah Pemilihan Jember 1.

4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum in casu KPU Kabupaten Jember untuk melakukan pencermatan ulang atas Formulir Model C.Hasil (plano) pada:

1) TPS 10, TPS 18, TPS 37, TPS 40, TPS 41, dan TPS 43 Kelurahan Jember Kidul, Kecamatan Kaliwates;

2) TPS 16, TPS 21, TPS 22, TPS 23, TPS 28, dan TPS 43 Kelurahan Kapatihan, Kecamatan Kaliwates;

3) TPS 1, TPS 3, TPS 7, TPS 10, dan TPS 12 Kelurahan Mangli, Kecamatan Kaliwates; serta

4) TPS 22 Kelurahan Sempusari, Kecamatan Kaliwates;

dan kemudian menyandingkan dengan Formulir Model D.Hasil PPK Kaliwates, Kabupaten Jember, untuk dilakukan koreksi/perbaikan secara berjenjang jika memang ditemukan kesalahan tulis dan/atau kesalahan rekapitulasi, dalam waktu paling lama 15 (lima belas) hari sejak pengucapan Putusan a quo.

5. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk menggabungkan perolehan suara hasil pencermatan ulang sebagaimana diperintahkan pada Amar Putusan angka 4 dengan perolehan suara pada TPS-TPS yang tidak dilakukan pencermatan ulang, serta menetapkan dan mengumumkan hasil penghitungan suara tersebut tanpa harus melaporkan kepada Mahkamah.

6. Memerintahkan Bawaslu, Bawaslu Provinsi Jawa Timur, dan Bawaslu Kabupaten Jember, untuk melakukan pengawasan dalam pelaksanaan pencermatan ulang sebagaimana dimaksud pada Amar Putusan angka 4.

7. Memerintahkan Kepolisian Negara Republik Indonesia atau jajarannya untuk melakukan pengamanan terhadap proses pencermatan ulang sesuai dengan kewenangannya.

8. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Status : Mengabulkan Sebagian

Di Unduh : 832

Kata Kunci : Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI,DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2024

File Pendukung : [Klik Disini \(index.php?page=download.Putusan&id=4572\)](#)

10
Jun
2024
16:01 WIB

Nomor : 221-01-12-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
Pokok Perkara : Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI,DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2024
Pemohon : Partai Amanat Nasional
Amar Putusan : **Dalam Eksepsi**
Menolak eksepsi Termohon berkenaan dengan Kewenangan Mahkamah;
Dalam Pokok Permohonan
1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan hasil perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Pegunungan (Provinsi) di Distrik Geya Daerah Pemilihan Papua Pegunungan 4, harus dilakukan Penghitungan Ulang Surat Suara (PUSS);
3. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret

2024, pukul 22.19 WIB sepanjang berkenaan dengan perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Pegunungan (Provinsi) di Distrik Geya Daerah Pemilihan Papua Pegunungan 4;

4. Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan penghitungan ulang surat suara untuk pemilihan umum calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Pegunungan (Provinsi) di 18 (delapan belas) TPS Distrik Geya Daerah Pemilihan Papua Pegunungan 4, sebagai berikut: TPS 1 Winalo, TPS 1 Timori, TPS 1 Tinagoga, TPS 2 Tinagoga, TPS 1 Alobaga, TPS 1 Wiyembi, TPS 1 Dimbara, TPS 2 Dimbara, TPS 1 Geya, TPS 2 Geya, TPS 3 Geya, TPS 4 Geya, TPS 5 Geya, TPS 1 Wunggilipur, TPS 2 Wunggilipur, TPS 1 Witipur, TPS 1 Nawu, dan TPS 1 Jelepele, dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Putusan a quo diucapkan dan menetapkan perolehan suara yang benar hasil Penghitungan Ulang Surat Suara (PUSS) tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah;

5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;

6. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara dalam rangka pelaksanaan amar Putusan ini;

7. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Daerah Papua dan Kepolisian Resor Tolikara untuk melakukan pengamanan proses Penghitungan Ulang Surat Suara (PUSS) tersebut sesuai dengan kewenangannya;

8. Menolak Permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Status : Mengabulkan Sebagian

Di Unduh : 1003

Kata Kunci : Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2024

File Pendukung : [Klik Disini \(index.php?page=download.Putusan&id=4551\)](#)

10
Jun
2024
15:52 WIB

Nomor : 231-01-05-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
Pokok Perkara : Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2024
Pemohon : Partai NasDem
Amar Putusan : Dalam Eksepsi 1. Menolak eksepsi Termohon mengenai kewenangan Mahkamah dan pokok Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (obscur). 2. Menolak eksepsi Pihak Terkait I mengenai kewenangan Mahkamah dan pokok Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (obscur). 3. Menolak eksepsi Pihak Terkait II mengenai mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan dan pokok Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (obscur). 4. Menolak eksepsi Pihak Terkait III mengenai kedudukan hukum Pemohon dan pokok Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (obscur). Dalam Pokok Permohonan Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
Status : Menolak Seluruhnya
Di Unduh : 849
Kata Kunci : Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2024
File Pendukung : [Klik Disini \(index.php?page=download.Putusan&id=4552\)](#)

10
Jun
2024
15:35 WIB

Nomor : 130-01-17-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
Pokok Perkara : Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2024
Pemohon : Partai Persatuan Pembangunan
Amar Putusan : Dalam Provisi Menyatakan sah Petikan Putusan Nomor 130-01-17-37/PS/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 22 Mei 2024. Dalam Eksepsi 1. Menolak eksepsi Termohon mengenai kewenangan Mahkamah dan pokok Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (obscur). 2. Menolak eksepsi Pihak Terkait mengenai permohonan Pemohon tidak jelas atau

kabur (obscur). Dalam Pokok Permohonan Menolak Permohonan Pemohon sepanjang perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten Yahukimo Dapil Yahukimo 5 untuk seluruhnya.

Status : Menolak Sebagian (Tidak Dapat Diterima)

Di Unduh : 625

Kata Kunci : Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2024

File Pendukung : Klik Disini (<index.php?page=download.Putusan&id=4553>)

1 2 ([/index.php?page=web.Putusan&id=2&kat=1&cari=&menu=5](index.php?page=web.Putusan&id=2&kat=1&cari=&menu=5)) 3 ([/index.php?page=web.Putusan&id=3&kat=1&cari=&menu=5](index.php?page=web.Putusan&id=3&kat=1&cari=&menu=5))
4 ([/index.php?page=web.Putusan&id=4&kat=1&cari=&menu=5](index.php?page=web.Putusan&id=4&kat=1&cari=&menu=5)) ... 417 ([/index.php?page=web.Putusan&id=417&kat=1&cari=&menu=5](index.php?page=web.Putusan&id=417&kat=1&cari=&menu=5))
> ([/index.php?page=web.Putusan&id=2&kat=1&cari=&menu=5](index.php?page=web.Putusan&id=2&kat=1&cari=&menu=5))

2352-9000

Jl. Medan Merdeka Barat No.6. Jakarta Pusat 10110 Fax: 021-3520177. Email: office@mkri.id (<mailto:office@mkri.id>)

KIRIM SURAT

(<index.php?page=web.SendEmail&menu=2>)

TANYA JAWAB

(<index.php?page=web.Pengaduan&id=1&kat=1&cari=&menu=7>)

WHISTLEBLOWING

(<http://wbs.mkri.id>)

HUBUNGI MK

(<https://contactmk.mkri.id/>)

MEDIA SOSIAL

(<http://www.facebook.com/officialMK>)

(<https://twitter.com/officialMKRI>)

(<http://www.youtube.com/mahkamal>)

(<https://www.instagram.com/mahkar>)

(<https://play.google.com/store/apps?id=mkri.go.id>)

(<https://itunes.apple.com/us/app/clicmk/id1448150873?ls=1&mt=8>)

PENGUNJUNG



Pengujian Materiil Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Tracking Perkara

Tracking Perkara



Detail Proses dan Dokumen

STEP	TANGGAL	PROSES	FILE
1	22-02-2024	Pengajuan Permohonan disertai Penerbitan AP3 dan DKPP dengan Nomor 30/PUU/PAN.MK/AP3/02/2024	Pemohonan AP3 dan DKPP
2	-	Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan	-
3	-	Perbaikan Permohonan	-
4	28-02-2024	Pemohonan sudah di Registrasi Mahkamah dengan Nomor 36/PUU-XXII/2024, dan telah di terbitkan ARPK dengan Nomor 36/PUU/PAN.MK/ARPK/02/2024	ARPK
5	28-02-2024	Telah diterbitkan surat penyampaian salinan permohonan dengan nomor 46.36/PUU/PAN.MK/SP/02/2024	1. Penyampaian Permohonan ke Ketua Dewan Perwakilan Daerah RI

Detail Perkara

No Perkara : 36/PUU-XXII/2024
 Pokok Perkara : Pengujian Materiil Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 Pemohon : Moh. Qusyari
 Kuasa Hukum : Dedy Rizaldy Arwin Gombo

Risalah Sidang

RISALAH SIDANG			
NO	TANGGAL	ACARA SIDANG	
			PDF AUDIO

Pengujian Undang Undang yang serupa

NO	NO PERKARA	POKOK PERKARA	PEMOHON	TRACKING



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

SURAT TUGAS Nomor 46/2700/03/2024

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum 2024 dan pemanfaatan web portal, web service dan IKD atas data kependudukan bagi pengembangan aplikasi SIMPPK dan e-bukutamu, maka perlu dilakukan *Proof of Concepts* (PoC) di Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri;
- b. bahwa untuk mendukung maksud sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu menerbitkan Surat Tugas kepada pegawai yang namanya ditunjuk dalam surat tugas dimaksud.
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kapaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 158);
2. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kapaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

Memberi Tugas:

NO	NAMA	JABATAN	KET.
1.	Mundiri	Kepala Bidang Sistem Informasi dan Layanan Data	-
2.	Rachman Karim	Pranata Komputer Ahli Pertama	-
3.	Ishak Purnama	Pranata Komputer Ahli Pertama	-
4.	Adam Waluyo	Penelaah Teknis Kebijakan	-

- Untuk : 1. Melakukan *Proof of Concepts* (PoC) secara langsung sistem aplikasi SIMPPK dan e_bukutamu pada :
- Hari, Tanggal : Senin, 18 Maret 2024
- Waktu : 09.00 WIB s.d. selesai
- Tempat : Kantor Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri



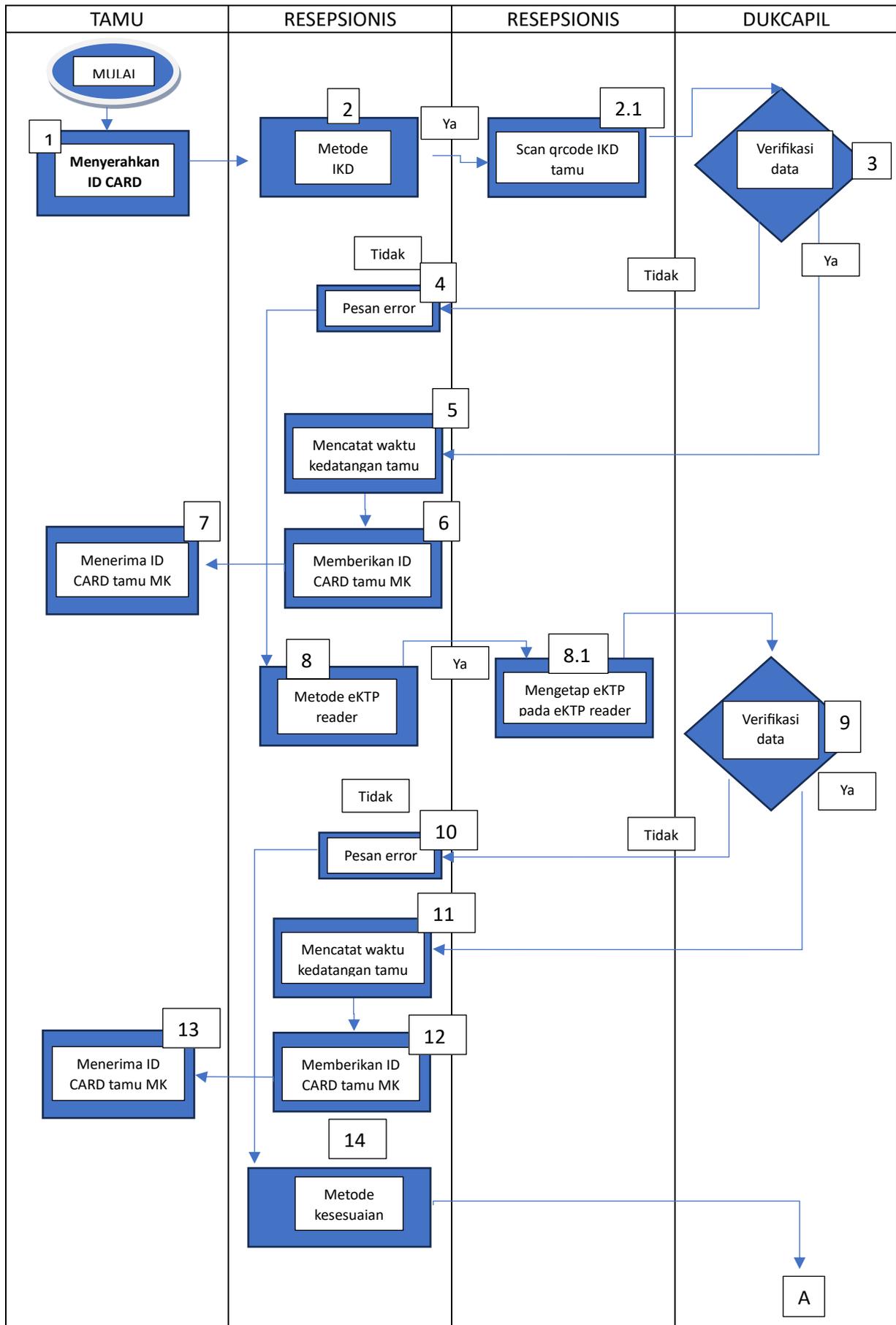
2. Kegiatan dimaksud akan diberikan hak keuangan sesuai dengan ketentuan.
3. Melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab.

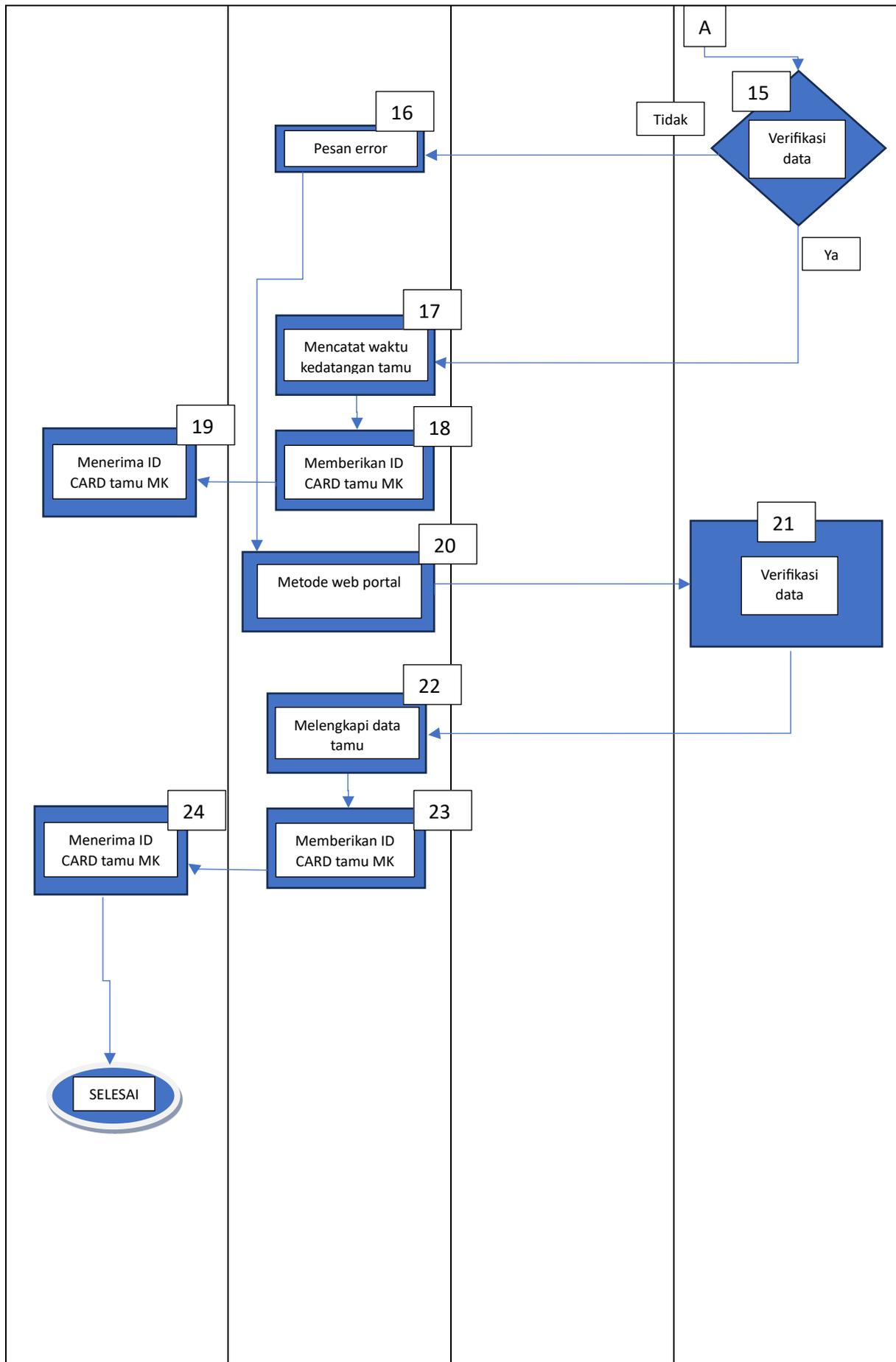
Jakarta, 18 Maret 2024
An. Sekretaris Jenderal,
Kepala Pusat TIK
Sigit Purnomo

Tembusan Yth.:

1. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Kepala Biro Renkeu;
3. Kepala Biro SDMO.







1. Tamu yang berkunjung ke mahkamah konstitusi menyerahkan ID CARD ke resepsionis.
2. Resepsionis menanyakan apakah pengunjung sudah menggunakan IKD, jika pengunjung sudah menggunakan IKD maka resepsionis memilih form input buku tamu pada aplikasi e-bukutamu.
 - 2.1. Resepsionis men-scan qrcode IKD tamu.
3. Setelah itu id ikd diteruskan ke dukcapil menggunakan API.
4. Jika tidak sesuai e-bukutamu akan menerima pesan error.
5. Jika sesuai maka e-bukutamu akan mendapatkan nilai balikan data penduduk dari api IKD yang akan ditampilkan pada e-bukutamu dan mencatat waktu kedatangan tamu.
6. Resepsionis akan memberikan ID CARD tamu MKRI.
7. Tamu menerima ID CARD tamu MKRI.
8. Jika tamu tidak memiliki akun IKD maka resepsionis akan men-scan eKTP pengunjung.
 - 8.1. Resepsionis menge-tap eKTP pengunjung pada mesin eKTP reader.
9. Setelah itu data akan di proses di server dukcapil.
10. Jika data dari eKTP reader tidak sesuai maka api dukcapil akan memberikan nilai balikan pesan error.
11. Jika data sesuai maka e-bukutamu akan menerima nilai balikan data pengunjung dari API DUKCAPIL dan mencatat waktu kedatangan tamu.
12. Resepsionis memberikan ID CARD tamu MKRI.
13. Tamu menerima ID CARD tamu MKRI.
14. Jika pengunjung/tamu tidak memiliki IKD dan eKTP tidak terbaca pada eKTP reader maka resepsionis akan menggunakan metode input manual dengan menggunakan API web service DUKCAPIL sesuai/tidak sesuai.
15. Jika sesuai maka API WEB SERVICE akan mengembalikan nilai balikan kesesuaian input.
16. Jika data tidak sesuai maka menampilkan pesan error dan menggunakan metode WEB PORTAL.
17. Jika data sesuai maka e-bukutamu akan menyimpan data tamu dan mencatat waktu kedatangan tamu pada e-bukutamu.
18. Resepsionis memberikan ID CARD tamu MKRI.
19. Tamu menerima ID CARD tamu MKRI.
20. Jika data tidak sesuai Ketika di verifikasi pada API WEB SERVICE sesuai/tidak sesuai maka resepsionis menggunakan WEB PORTAL untuk mengecek data pengunjung
21. SERVER DUKCAPIL akan memverifikasi data input dari web portal.
22. Jika sesuai maka akan tampil data pengunjung pada web portal dan resepsionis memperbaiki input data pengunjung.
23. Resepsionis memberikan ID CARD tamu MKRI
24. Tamu menerima ID CARD tamu MKRI.

LIST USER

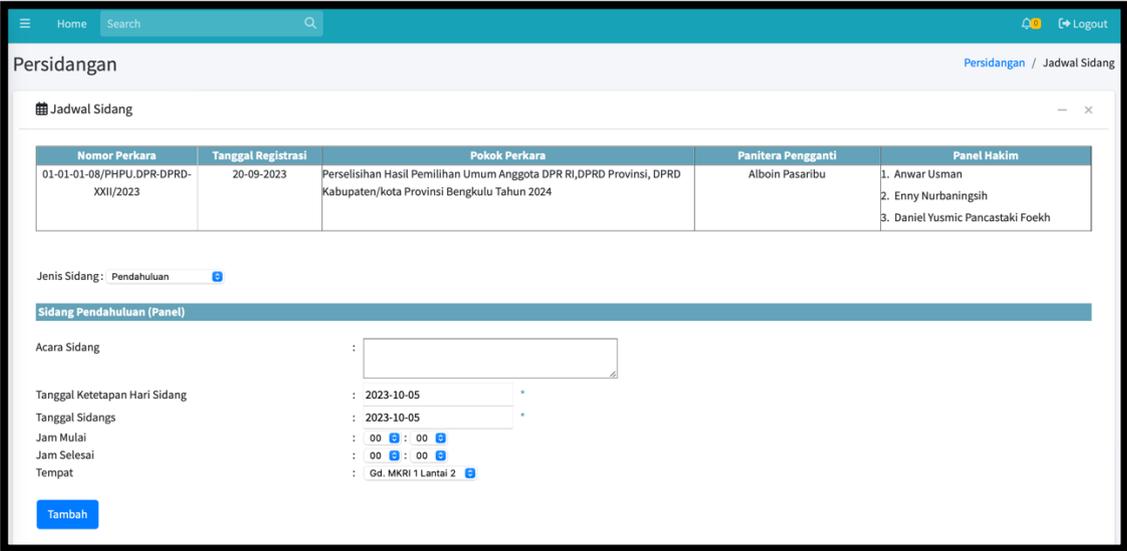
NO	USER NAME	HAK AKSES	NAMA
1	198508132023211011	SUPER ADMIN	Rachman Karim
2	198211172013126251	ADMIN	Rohimah Novia Ulfah
3	198708022008016255	ADMIN	Fitri Widiyawati
4	198203152008016254	ADMIN	Pricillia Carolina
5	198803172010046253	ADMIN	Nita Marlina Sari
6	198901272013026252	ADMIN	Riana Andam Dewi
7	196805181992031002	PIMPINAN	Sigit Purnomo
8	198611182018011001	STATISTIK	Indra Pandu Wibowo Purwanto
9	198909032015012002	STATISTIK	Haifa Arief Lubis
10	198509262009083023	STATISTIK	Ishak Purnama
11	198811222011014038	STATISTIK	Dewi Pertiwi
12	199802182022121001	SUPER ADMIN	Adam Waluyo

Laporan Pengembangan Sistem Informasi Penanganan Perkara

1. Fitur Jadwal Sidang

Fitur Jadwal Sidang sudah disesuaikan dengan kebutuhan perkara PHPU 2024, adapun beberapa penyesuaian dan penyempurnaan sebagai berikut:

- a. Jenis sidang sudah disesuaikan dengan perkara PHPU
- b. Tanggal Ketetapan sudah otomatis tercatat jika sebelumnya sudah diinput
- c. Tanggal sidang menampilkan tanggal sekarang
- d. Penambahan fitur tempat sidang atau ruang sidang dengan menu dropdown agar pencatatan informasi terkait ruang sidang seragam.
- e. Edit jadwal sidang sudah disesuaikan dengan penambahan-penambahan dan penyesuaian fitur diatas
- f. Adanya fitur pending untuk penjadwalan sidang
- g. Adanya fitur keterangan ketika jadwal sidang berubah dan notif WA ke petugas persidangan



Gambar 1 input jadwal sidang



Gambar 2 list jadwal sidang per perkara

Persidangan Layout Sidang

Layout Sidang - x

PANEL: ALL +

No	Tanggal	No Perkara	Judul Perkara	Pemohon	Kuasa Pemohon	Acara Sidang	Panel	Layout Sidang
1	22 September 2023, 10:00 WIB	01-01-01-08/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2023	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Bengkulu Tahun 2024	• Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	• rudi kurniawan	Pemeriksaan Pendahuluan (I)	1	Lihat Layout Sidang
2	22 September 2023, 12:00 WIB	01-02-19-11/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2023	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta (DKI Jakarta) Dapil DKI Jakarta II Tahun 2024	• YURI KEMAL FADLULLAH, SH, MH		Pemeriksaan Pendahuluan (I)	1	Setting Layout Sidang
3	04 Oktober 2023, 10:00 WIB	01-01-01-08/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2023	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Bengkulu Tahun 2024	• Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	• rudi kurniawan	Pemeriksaan Perkara (II)	1	Lihat Layout Sidang
4	10 Oktober 2023, 09:00 WIB	01-01-01-08/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2023	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Bengkulu Tahun 2024	• Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	• rudi kurniawan	Pembacaan Putusan (III)	PLENO	Setting Layout Sidang

Gambar 4 List jadwal sidang untuk Layout dipersidangan

Layout Sidang - x

Nomor Perkara	Acara Sidang	Tanggal Ketetapan Hari Sidang	Tanggal Sidang	Waktu Sidang
01-01-01-08/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2023	Pemeriksaan Pendahuluan (I)	20-09-2023	22-09-2023	10:00

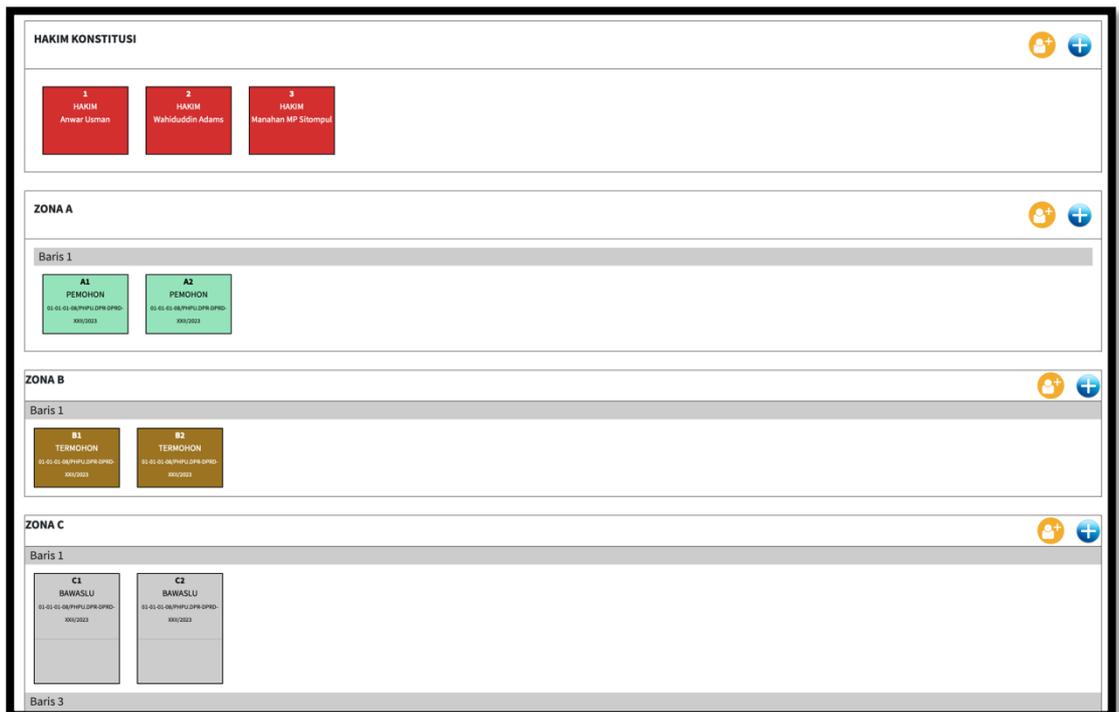
Setting Layout Ruang Sidang (Kuota Kursi Para Pihak)

Ruang Sidang: Pilih

Layout Sidang 1. CETAK LAYOUT 2. CETAK DAFTAR HADIR 3. CETAK DAFTAR BANGKU

The diagram illustrates the layout of the courtroom. At the top, there is a box for 'PETUGAS PERSIDANGAN'. Below it, 'CALON PIHAK TERKAIT' are seated. The main area is divided into three blocks: 'BLOK B' on the left, 'BLOK C' in the center, and 'BLOK A' on the right. Each block contains 'PEMOHON' (petitioners) and 'BANGSELU' (respondents). At the bottom, the 'MAJELIS HAKIM' (judicial panel) is seated.

Gambar 5 layout ruang sidang

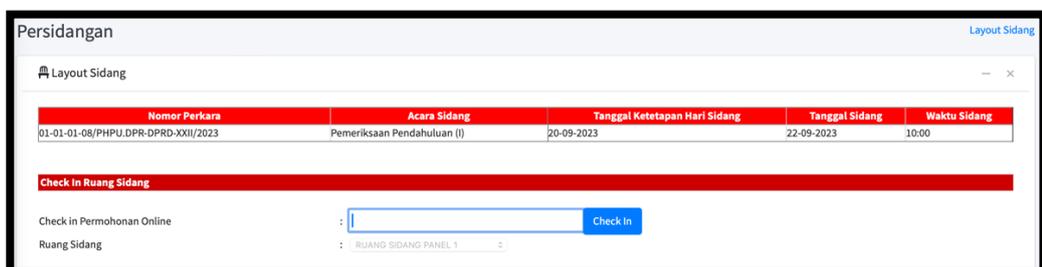


Gambar 6 Ploting kuota bangku sidang

3. Fitur Layout Sidang Gugus Tugas Kejurupanggilan

Layout Sidang Gugus Tugas Kejurupanggilan sudah disesuaikan dengan kebutuhan perkara PPHU 2024, adapun beberapa penyesuaian dan penyempurnaan sebagai berikut:

- List Jadwal Sidang pada fitur Layout sidang sudah disesuaikan dan dikelompokkan dengan panel dan jadwal yang sama, sehingga memungkinkan dalam satu ruang sidang terdapat beberapa perkara dan ada status apakah layout sidang sudah diploting atau belum.
- Untuk gambar layout sudah disesuaikan dengan kebutuhan perkara PPHU 2024
- Adanya fitur untuk tambah bangku dan pengurangan bangku, jadi aplikasi memungkinkan untuk mengikuti perubahan layout sidang sesuai dengan yang ada di ruang sidang sebenarnya
- Penambahan fitur checkin Para Pihak untuk masuk ke ruang sidang dengan scan barcode
- Adanya fitur untuk menyesuaikan para pihak yang hadir
- Adanya fitur mencetak daftar para pihak



Gambar 7 Checkin Kehadiran Sidang

Persidangan Layout Sidang

Layout Sidang

PANEL: ALL

No	Tanggal	No Perkara	Judul Perkara	Pemohon	Kuasa Pemohon	Acara Sidang	Panel	Layout Sidang
1	22 September 2023, 10:00 WIB	01-01-01-08/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2023	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Bengkulu Tahun 2024	• Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	• rudi kurniawan	Pemeriksaan Pendahuluan (I)	1	Lihat Layout Sidang
2	22 September 2023, 12:00 WIB	01-02-19-11/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2023	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta (DKI Jakarta) Dapil DKI Jakarta II Tahun 2024	• YURI KEMAL FADLULLAH, SH, MH		Pemeriksaan Pendahuluan (I)	1	Layout Sidang Belum Disetting
3	04 Oktober 2023, 10:00 WIB	01-01-01-08/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2023	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Bengkulu Tahun 2024	• Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	• rudi kurniawan	Pemeriksaan Perkara (II)	1	Lihat Layout Sidang
4	10 Oktober 2023, 09:00 WIB	01-01-01-08/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2023	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Bengkulu Tahun 2024	• Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	• rudi kurniawan	Pembacaan Putusan (III)	PLENO	Layout Sidang Belum Disetting

Gambar 8 List jadwal sidang kejurupanggilan

simpbaru.mkri.id/index.php?page=phpu.SetKuota2&idrsid=26570&idsid=7296

Jenis : TERMOHON

Nama : Joko Sampurna

No. HP : 80808121212

Sebagai : Kuasa Termohon

Nomor Perkara : 01-01-01-08/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2023

Nomor APPP : 01-01-01-08/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/09/2023

Simpan Sementara

Tombol ini hanya untuk check in

Check In UnRegister

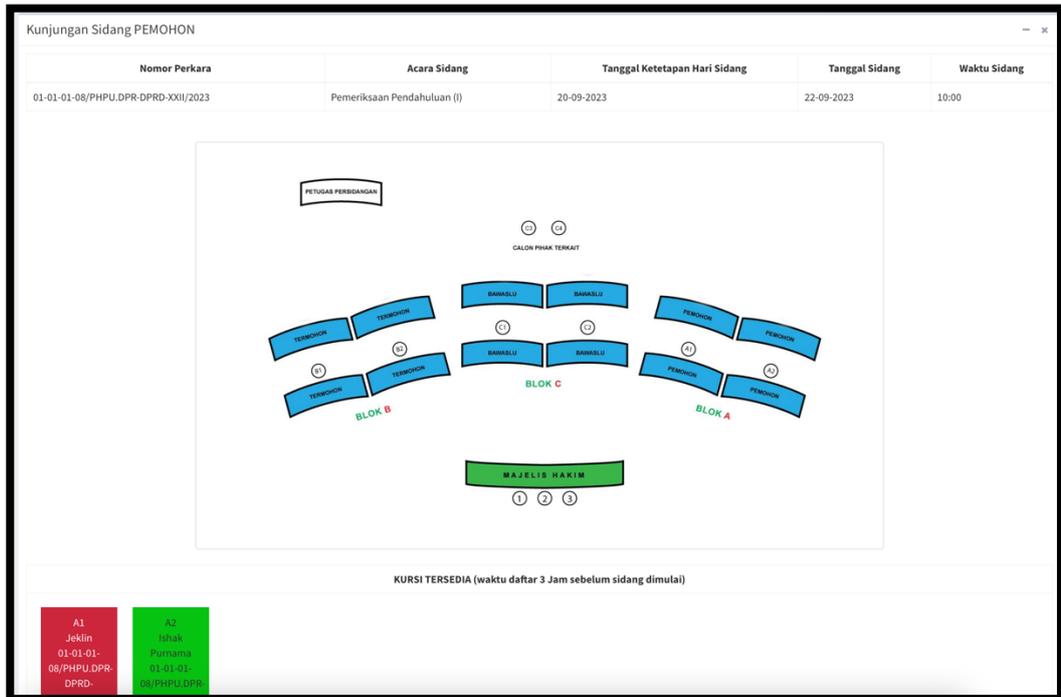
Gambar 9 Edit kehadiran para pihak

4. Fitur Konfirmasi Kehadiran Para Pihak

Fitur Konfirmasi Kehadiran Para Pihak adalah fitur baru untuk memudahkan para pihak untuk melakukan konfirmasi kehadiran sidang yang sudah terintegrasi dengan fitur panggilan persidangan dan checklist persidangan dan kejurupanggilan, adapun manfaat fitur ini adalah:

- Terintegrasinya konfirmasi kehadiran dengan panggilan persidangan dengan mengirimkan link untuk melakukan konfirmasi siapa saja yang akan hadir dalam ruang sidang. Fitur ini juga sudah terintegrasi dengan plotting layout sidang, sehingga para pihak hanya bisa mengisi bangku yang telah di berikan oleh bagian persidangan

- b. Terintegrasinya konfirmasi kehadiran dengan aplikasi checklist persidangan yang mana checklist persidangan akan terkoneksi dengan data konfirmasi kehadiran.
- c. Terintegrasinya konfirmasi kehadiran kedalam fitur kejurupanggilan, sehingga kejurupanggilan bisa mengetahui siapa saja yang sudah konfirmasi untuk hadir didalam persidangan nantinya, dan sudah terintegrasi dengan fitur checkin pada saat para pihak hadir kedalam ruang sidang
- d. Para pihak setelah melakukan konfirmasi kehadiran maka akan menerima WA yang berisi informasi sidang, bangku sidang, QRCode untuk kehadiran



Gambar 10 Konfirmasi kehadiran

Jenis : PEMOHON
 Nama : Ishak Purnama
 KTP : 3191281921212
 No. HP : 081210471812
 Sebagai : Kuasa Pemohon
 Nomor Perkara : 01-01-01-08/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2023
 Nomor APPP : 01-01-01-08/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/09/2023

Simpan

Gambar 11 Form Konfirmasi Kehadiran Sesuai dengan kuota bangku sidang

sidang.mkri.id/index.php?page=phpu.CetakKar

NOMOR A1 PEMOHON

Data Pengunjung
 Nama : Jeklin
 KTP : 127107670704001
 No. HP : 085658566768
 Sebagai : Pemohon
 Tanggal Daftar :

Info Sidang
 Waktu Sidang : 2023-09-22, 10:00 WIB
 No Perkar : 01-01-01-08/PHPU.DPR-
 DPRD-XXII/2023
 Acara Sidang : Pemeriksaan Pendahuluan (I)
 Lokasi : Ruang Sidang PANEL 1



[Cetak](#) [Kirim WA](#)

MKRI



INFORMASI BANGKU SIDANG

**NOMOR A2
PEMOHON**

Data Pengunjung
 Nama : Ishak Purnama
 KTP : [3191281921212](#)
 HP : [081210471812](#)
 Sebagai : Kuasa Pemohon
 Tanggal Daftar : .

Info Sidang
 Waktu Sidang : 2023-09-22, 10:00
 WIB
 No Perkar : 01-01-01-08/PHPU.DPR-
 DPRD-XXII/2023
 Acara Sidang : Pemeriksaan
 Pendahuluan (I)
 Lokasi : PEMOHON.

Notifikasi oleh sistem Aplikasi
SIMPP 16.44

Gambar 12 Cetak Konfirmasi Kehadiran dan WA Qrcode bangku sidang untuk kehadiran

5. Fitur Amicus Curiae

Fitur Amicus Curiae pada website MK, mengupload Amicus Curiae agar masyarakat dapat mengakses

**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIC INDONESIA**



**LEMBAGA NEGARA
PENGAWAL KONSTITUSI**

BERANDA PERADILAN HAKIM PERKARA PERATURAN ADMINISTRASI UMUM UNIT KERJA



BERANDA > AMICUS CURIAE

AMICUS CURIAE

No.	Tanggal Surat	Dari	Isi Ringkasan	File Pendukung
1	2024-04-22	Team Hukum Merah Putih & Rumah Juang Relawan Jokowi	Menolak Peradilan dengan Model Amicus Curiae	File Amicus Curiae
2	2024-04-22	DPP KAI Erman Umar	Amicus Curiae – Masukan Kepada YM Majelis Hakim Konstitusi atas Sengketa Pilpres	File Amicus Curiae
3	2024-04-20	Andri Prasetya	Pengajuan Amicus Curiae Perkara PHPU Presiden 2024	File Amicus Curiae
4	2024-04-19	Bambang Prasanto	Amicus Curiae – Bambang Prasanto	File Amicus Curiae
			Permohonan Konfederasi Pejuang Bela Negara (KPNB)	



**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

Jalan Medan Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Kotak Pos 999 Jakarta 10000
Telepon (62-21) 2352 9000, Faksimili (62-21) 3520177, 3520177 Laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id

DAFTAR KEHADIRAN SIDANG PARA PIHAK (PANEL 1)

Tanggal Sidang : 10 Juni 2024 08:30 WIB

Acara Sidang : Pengucapan Putusan/Ketetapan

NO.	JENIS	NO. PERKARA	NAMA	SEBAGAI
HAKIM KONSTITUSI				
1	HAKIM	-	ANWAR USMAN	
2	HAKIM	-	GUNTUR HAMZAH	
3	HAKIM	-	DANIEL YUSMIC PANCASTAKI FOEKH	
4	HAKIM	-	ARIEF HIDAYAT	
5	HAKIM	-	SUHARTOYO	
6	HAKIM	-	SALDI ISRA	
7	HAKIM	-	ENNY NURBANINGSIH	
8	HAKIM	-	RIDWAN MANSYUR	
9	HAKIM	-	ARSUL SANI	
ZONA A				
A1	PEMOHON	191-01-03-22/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	PUTU BRAVO TIMOTHY, S.H., M.H.	KUASA (ISLAM)
A2	PEMOHON	191-01-03-22/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024		
A3	PEMOHON	196-01-14-22/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	HARIMUDDIN S.H.	KUASA (ISLAM)
A4	PEMOHON	196-01-14-22/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	MUHAMAD RAZIV BAROKAH, S.H., M.H.	KUASA (ISLAM)
A5	PEMOHON	177-02-16-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	LA ODE MUHAMMAD RUSLIADI SUHI	KUASA (ISLAM)
A6	PEMOHON	177-02-16-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	AHMAD KAILANI	KUASA
A21	PEMOHON	185-02-16-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	LA ODE MUHAMMAD RUSLIADI SUHI	KUASA
A22	PEMOHON	185-02-16-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	AHMAD KAILANI	KUASA (ISLAM)
A23	PEMOHON	158-02-16-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	LA ODE MUHAMMAD RUSLIADI SUHI	KUASA
A24	PEMOHON	158-02-16-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	AHMAD KAILANI	KUASA (ISLAM)



**Mahkamah Konstitusi
Republik Indonesia**

Supported by :



Project Documentation

Perancangan dan pengembangan antarmuka laman mkri.id

Daftar Isi

Daftar Isi	1
Ringkasan Proyek	3
Nama	3
Deskripsi	3
Tujuan	3
Lingkup	3
Pengembang	4
Referensi Dokumen Digital	4
Timeline	5
Fase	5
UI/UX Design	5
Front-end Development & Integration	5
Testing	6
Production Deployment	6
Documentation & Handover	6
Progress Proyek	7
7 Maret 2024	7
8 Maret 2024	7
13 Maret 2024	7
15 Maret 2024	7
19 Maret 2024	7
25 Maret 2024	8
26 Maret 2024	8
28 Maret 2024	8
01 April 2024	8
03 April 2024	8
04 April 2024	8
05 April 2024	8
Perubahan Desain	9
Beranda	9
Video MKRI	12
Pengaduan	13
Pengaduan - Kirim Surat	14
Berita MKRI	15
Unit Kerja	17
Peradilan	18

Peradilan - Struktur Organisasi	19
Peradilan - Profil MKMK	21
Peradilan - Jadwal Sidang MKMK	22
Hakim	23
Perkara	24
Perkara - Jadwal Sidang	25
Perkara - Rekapitulasi PHPU	26
Administrasi Umum - Informasi Anggaran	27
Administrasi Umum - LHKPN	28
Administrasi Umum - Statistik Pegawai	29
Administrasi Umum - Kerjasama	30
Publikasi - Majalah Konstitusi	31
Pilkada Serentak	32
Dokumentasi Teknis	33
Framework & Libraries	33
Struktur Kode	34
Pengaturan Dasar	34
Struktur Folder Utama (folder src)	34
Folder App	36
Menyajikan Tampilan	37
File Layout	37
Konvensi Kode	37
Hasil Pengujian	38
Penutupan & Garansi	49

Ringkasan Proyek

Nama

Perancangan dan pengembangan antarmuka laman mkri.id.

Deskripsi

Perancangan tampilan baru dan pengembangan antarmuka depan (front-end) website mkri.id responsif terhadap mobile & desktop dengan teknologi React.js.

Tujuan

Berdasar pada Surat Pesanan Pengadaan Pengembangan Website mkri.id Tahun Anggaran 2024 nomor 69.5/PBJ/MK/2024 tanggal 08 Maret 2024.

Lingkup

Lingkup daripada proyek ini berdasar pada Kerangka Acuan Kerja yang telah diberikan, yaitu sebagai berikut:

1. Membuat pembaruan desain tata letak, warna, ikon, dan elemen desain website mkri.id dengan syarat tidak menghilangkan fitur yang sudah ada;
2. Mengembangkan antarmuka depan (Front-end development) dengan menggunakan framework Next.js;
3. Memastikan responsivitas dan kecepatan optimal untuk pengalaman pengguna yang lebih baik;
4. Menghubungkan front-end yang telah dikembangkan dengan back-end yang disediakan oleh tim internal MK;
5. Menambahkan fitur pencarian putusan dan konten website dari sisi desain dan antarmuka depan;
6. Mengintegrasikan fitur pencarian dengan bagian server;
7. Melaksanakan uji integrasi secara menyeluruh untuk memastikan semua komponen berinteraksi secara efektif;
8. Identifikasi dan perbaiki potensi masalah integrasi sebelum implementasi di lingkungan produksi;
9. Memastikan sistem beroperasi sesuai dengan harapan;
10. Menyusun dokumentasi tentang perubahan desain dan implementasi teknologi antarmuka;
11. Memberikan pelatihan terkait teknologi baru kepada tim terkait.
12. Maintenance selama 6 bulan.

Pengembang

Pengembang atau penyedia adalah PT. Iterasi Inovasi Teknologi, beralamat di MTH Square Ground Floor A4/A, Jl. Letjen MT Haryono, Bidara Cina, Jatinegara, Jakarta Timur, merupakan sebuah perusahaan yang melakukan aktivitas jasa teknologi informasi pemrograman dengan NIB: 0411230067394.

Perusahaan telah menetapkan 5 orang dalam proyek ini sebagai tim pengembang, dengan detail:

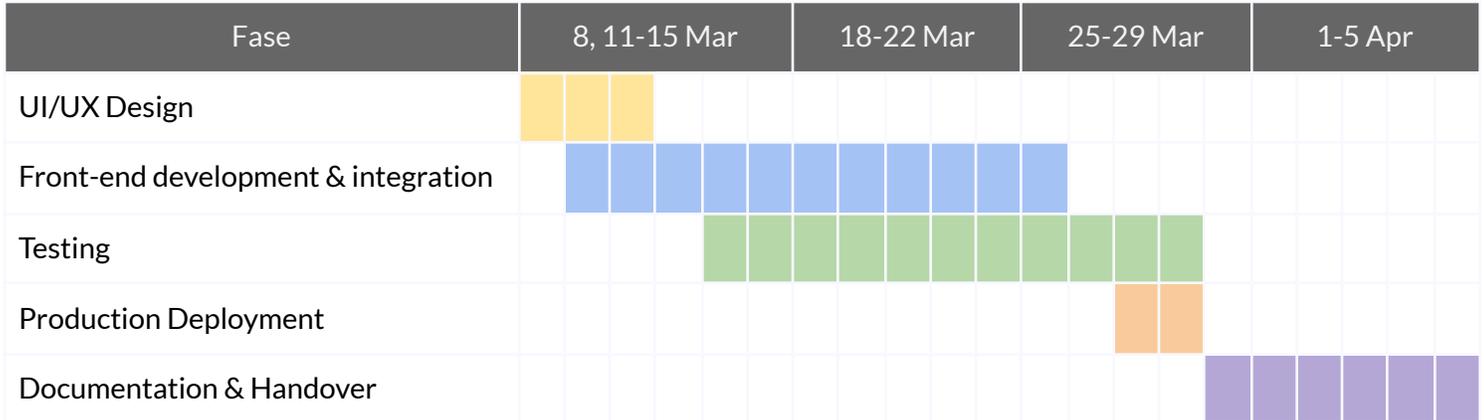
1. Luthfi Hariz, selaku Project Manager
2. Labib Imam Hidayat, selaku Lead Front-end Engineer
3. Kevin Ryan Hadi, selaku Lead UI/UX Designer
4. Anton Martono, selaku UI/UX Designer
5. Agung Nugraha, selaku Front-end Engineer

Referensi Dokumen Digital

No	Dokumen	Tautan
1	File Desain Figma	https://bit.ly/mkri-id-figma
2	Source Code	https://gitlab.mkri.id/luthfi/mkri-id-frontend
3	Petunjuk Instalasi	https://gitlab.mkri.id/luthfi/mkri-id-frontend/-/blob/main/README.md
4	Kontrak Integrasi API	https://docs.google.com/document/d/1BbVhvw_hmYm1Na45ilFcbzrwQVrwln_6PdGil-2Rf08/edit?usp=sharing

Timeline

Proyek dimulai pada 8 Maret 2024 dan selesai pada 5 April 2024, dengan masa maintenance selama 6 bulan, atau hingga 5 Oktober 2024.



Fase

UI/UX Design

Membuat pembaruan desain tata letak, warna, ikon, dan elemen desain website mkri.id dengan syarat tidak menghilangkan fitur yang sudah ada. Output berupa desain baru website mkri.id dalam format file Figma.

Front-end Development & Integration

1. Mengembangkan antarmuka depan (Front-end development) dengan menggunakan framework Next.js;
2. Memastikan responsivitas dan kecepatan optimal untuk pengalaman pengguna yang lebih baik;
3. Menghubungkan front-end yang telah dikembangkan dengan back-end yang disediakan oleh tim internal MK;
4. Menambahkan fitur pencarian putusan dan konten website dari sisi desain dan antarmuka depan;
5. Mengintegrasikan fitur pencarian dengan bagian server;

Output berupa source code front-end yang sudah terintegrasi dengan back-end yang disediakan oleh PusTIK MK, dan versi testing dari website terbaru mkri.id.

Testing

1. Melaksanakan uji integrasi secara menyeluruh untuk memastikan semua komponen berinteraksi secara efektif;
2. Identifikasi dan perbaiki potensi masalah integrasi sebelum implementasi di lingkungan produksi;
3. Memastikan sistem beroperasi sesuai dengan harapan;

Output berupa dokumentasi rencana pengujian dan juga hasil pengujian, serta website terbaru mkri.id yang siap untuk dirilis secara publik atau *production ready*.

Production Deployment

Proses mengunggah versi final dari website mkri.id terbaru ke lingkungan produksi agar dapat diakses dan digunakan oleh pengguna secara luas.

Output dari fase ini berupa mkri.id dengan desain dan teknologi terbaru.

Documentation & Handover

1. Menyusun dokumentasi tentang perubahan desain dan implementasi teknologi antarmuka;
2. Memberikan pelatihan terkait teknologi baru kepada tim terkait.

Output berupa dokumen dan pelatihan terkait.

Progress Proyek

7 Maret 2024

1. Kick off meeting dilakukan via Zoom
2. Project adalah perancangan dan pengembangan antarmuka laman mkri.id, dengan ruang lingkup yang tertera pada Kerangka Acuan Kerja.

8 Maret 2024

1. Berdasarkan kontrak, proyek secara resmi telah dimulai
2. Design guideline untuk website baru mkri.id sudah tersedia di file Figma
3. Memulai fase front-end development

13 Maret 2024

1. Integrasi dengan backend mulai dilakukan
2. Versi testing sementara dari website mkri.id dapat diakses di <https://mkri-id.onrender.com/>
3. Beberapa feedback terkait API untuk keperluan integrasi sudah disampaikan dan dicatat di dokumen MKRI.id Integrasi dan Test Plan
4. Finalisasi API akan dilakukan dalam 2 hari kedepan oleh tim IT MK
5. Terkait persiapan testing: deployment ke internal testing server MK sudah bisa dilakukan, langkah deployment tersedia di file README.md repository Gitlab MKRI

15 Maret 2024

1. Dilakukan rapat teknis via Zoom untuk membahas integrasi dan juga proses testing
2. Progress pengerjaan front-end 85%, proses testing sudah berjalan sekitar 50%.
3. Versi website mkri.id terbaru sudah tersedia di internal testing server MK yang bisa diakses melalui <https://testing.mkri.id>

19 Maret 2024

1. Proses testing mencapai 90%, dengan beberapa feedback terkait back-end dan juga front-end.
2. Direncanakan untuk melakukan presentasi ke hadapan pak Sekjen terkait hasil implementasi terbaru dari mkri.id, namun tertunda.
3. Menerima feedback terkait hasil implementasi terbaru yang terdokumentasi di link berikut <https://docs.google.com/document/d/15PA51egZ8isw2u52fRzT4yHGWWZSNbxxkdsbgMiMeu8/edit>

25 Maret 2024

1. Semua feedback selesai, kecuali fitur pencarian, karena menunggu proses pembuatan API dari backend selesai.
2. Menerima beberapa feedback lainnya terkait desain kemudian diselesaikan dalam hari yang sama.

26 Maret 2024

1. API pencarian sudah tersedia di backend, front-end mulai melakukan integrasi dan penyesuaian API.

28 Maret 2024

1. Fitur pencarian sudah berhasil terintegrasi dan tersedia di website testing.mkri.id

01 April 2024

1. Melakukan presentasi di hadapan Sekjen MK terkait website baru.
2. Menerima beberapa feedback terkait website baru:
 - a. Pilih bahasa agar dipindah ke atas
 - b. Tulisan perkara dan website agar dibuat lebih besar dengan logo kaca pembesar
 - c. Grafik informasi anggaran agar dibuat gradasi dan menyesuaikan nilainya
 - d. 3 tombol pilkada, pilpres dan puu di beranda agar dibuat gradasi tampak seperti background pengumuman
3. Perlunya dilakukan sosialisasi terhadap website baru dengan menampilkan banner di website lama mkri.id sebelum benar-benar mengganti mkri.id dengan laman baru.
4. Dilakukan nya sosialisasi

03 April 2024

1. Semua feedback dari Sekjen MK sudah selesai dan sosialisasi terhadap website baru siap dilakukan.
2. Menemukan beberapa *bug* di fitur pilih bahasa yang perlu diperbaiki dari sisi *front-end*

04 April 2024

1. *Bug* berhasil diperbaiki, serah terima siap dilakukan.

05 April 2024

1. Serah terima secara administratif telah dilakukan, termasuk *source code* dan juga dokumentasi proyek.
2. Masa maintenance dimulai dan akan berakhir pada 5 Oktober 2024.

Perubahan Desain

Beranda

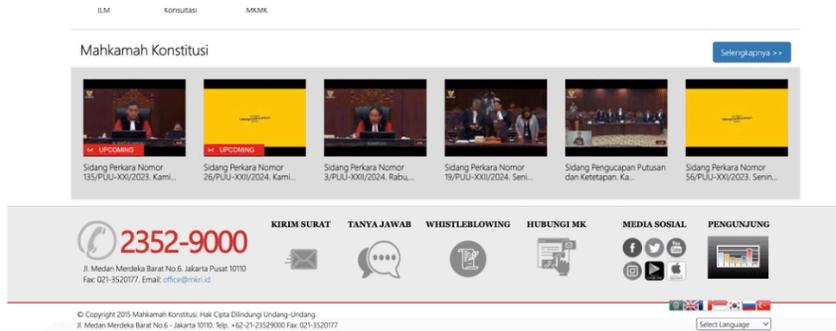
Before

The screenshot shows the old homepage of the Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. The layout is somewhat cluttered with a large central banner for a public catalog announcement. Below the banner, there are several sections: a calendar for March 2024, a 'Permohonan Online' section, a 'Berita' section with news items, and a grid of service icons like 'Agenda Sidang', 'Siaran Pers', and 'Balangan'. The navigation menu at the top includes 'BERANDA', 'PERADILAN', 'HAKIM', 'PERKARA', 'PERATURAN', 'ADMINISTRASI UMUM', and 'UNIT KERJA'. The date 'Jumat, 08 Maret 2024' is visible in the top left corner.

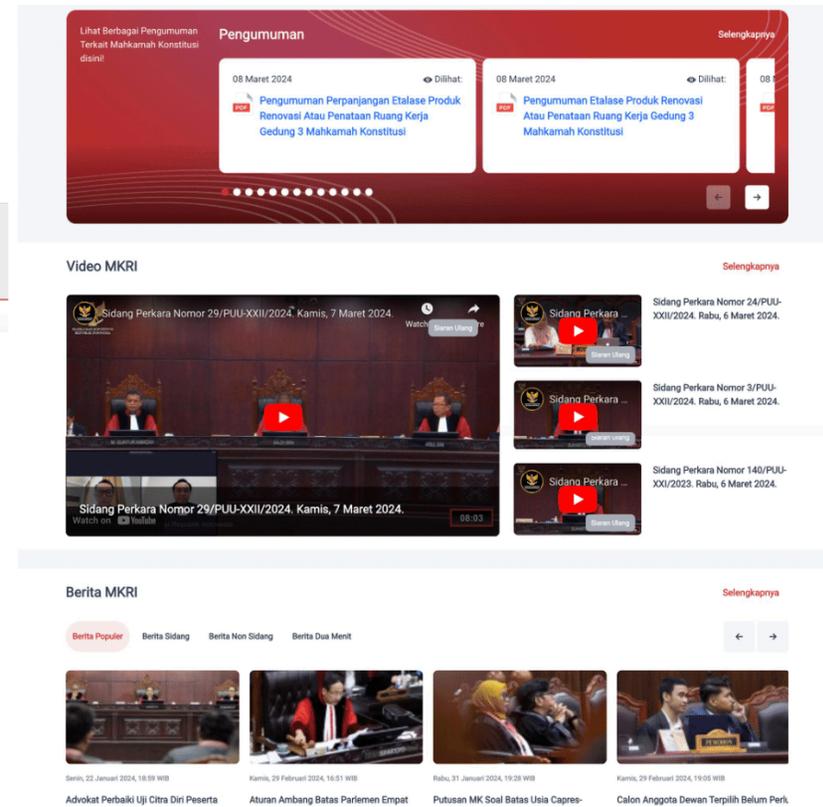
After

The screenshot shows the new, redesigned homepage of the Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. The design is more modern and user-friendly. The top navigation menu is simplified to 'BERANDA', 'PERADILAN', 'HAKIM', 'PERKARA', 'PERATURAN', 'ADMINISTRASI UMUM', and 'PUBLIKASI'. A large central banner features the text 'Mahlumat Pelayanan Publik dan Mahlumat Pelayanan Keterbukaan Informasi Publik' with a 'Lihat Selengkapnya' button. Below the banner, there is a search bar, a 'Putusan' section with a list of decisions, a 'Jadwal Sidang' calendar for March 2024, and a vertical sidebar on the right with service cards for 'Permohonan Online', 'Pengujian UUD & SKLN', 'Pilkada Serentak', and 'PILPRES & Pilpres'. The date '17 Januari 2024' is shown in the top left.

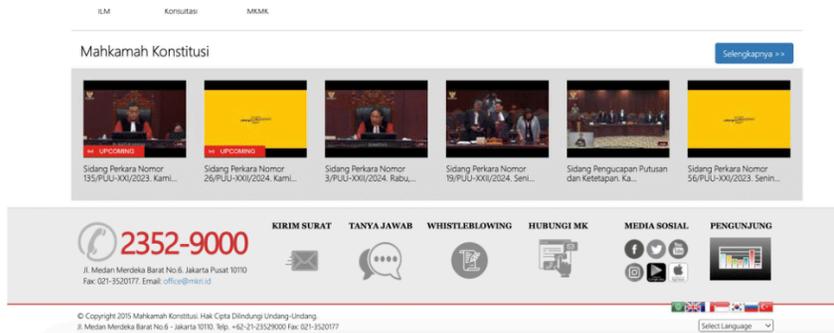
Before



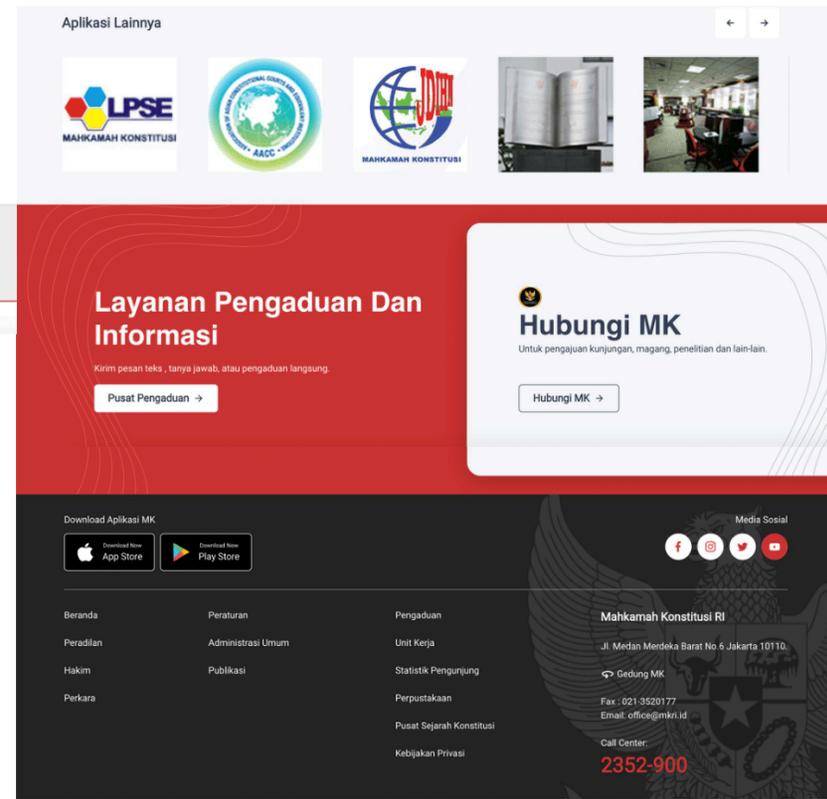
After



Before



After



Video MKRI

Before

The screenshot shows the old website layout. At the top, there is a header with the date 'Jumat, 08 Maret 2024', a search bar, and the logo of the Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Below the header is a navigation menu with categories: BERANDA, PERADILAN, HAKIM, PERKARA, PERATURAN, ADMINISTRASI UMUM, and UNITY KERJA. A sidebar on the left lists 'VIDEO CONFERENCE' with sub-items: LIVE STREAMING, JADWAL KUNJUNGAN MKRI, JADWAL KUNJUNGAN MKRI, and PENGELOLAAN VICON. The main content area features a large image of a courtroom and a video player for a live stream titled 'Sidang Perkara Nomor 135/PUU-XXI/2023, Kamis, 7 Maret 2024'. Below the video player are four tabs labeled 'Kanal 1' through 'Kanal 4'. At the bottom, there is a map titled 'LOKASI VIDEO CONFERENCE MAHKAMAH KONSTITUSI DI PERGURUAN TINGGI SELURUH INDONESIA'.

After

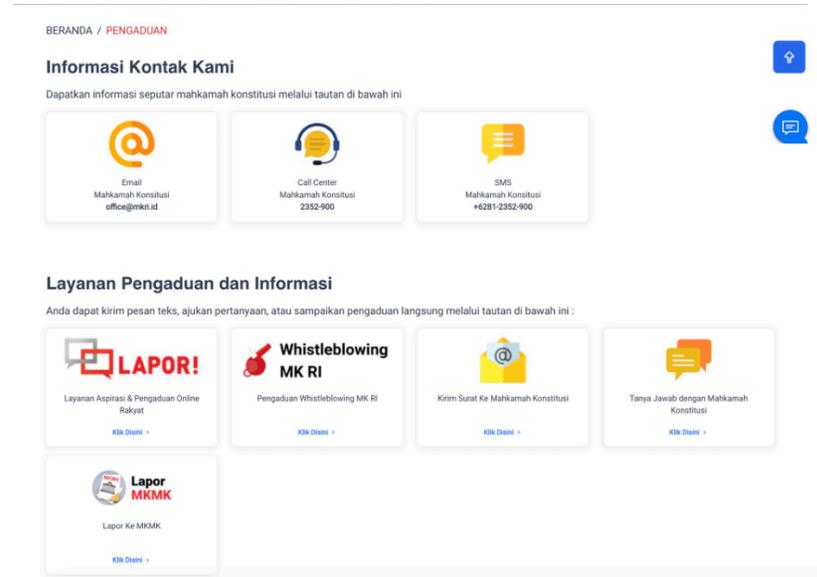
The screenshot shows the new website layout. The header includes the Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia logo, a search bar, and a 'Menu Internal' button. The navigation menu is simplified to: BERANDA, PERADILAN, HAKIM, PERKARA, PERATURAN, ADMINISTRASI UMUM, and PUBLIKASI. The main content area features a large dark banner with the text 'Video MKRI' and a red bar below it. Below the banner is a section with a 'Live Streaming' button and links for 'Jadwal Kunjungan MKRI', 'Jadwal Kuliah Umum', and 'Pengelolaan Vicon'. The main content area is titled 'Live Streaming Dan Video Conferene' with a 'Watch on Youtube' button. Below the title is a list of four rooms: 'Ruang Sidang 1', 'Ruang Sidang 2', 'Ruang Sidang 3', and 'Ruang Sidang 4'. A large grey box contains the message 'Saat ini video livestreaming tidak tersedia.' (Live streaming is currently unavailable).

Pengaduan

Before



After



Pengaduan - Kirim Surat

Before

The screenshot shows the old website interface for the Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. The header includes the date 'Kamis, 08 Maret 2024' and a language selector for 'English'. The main navigation bar contains links for BERANDA, PERADILAN, HAKIM, PERKARA, PERATURAN, ADMINISTRASI UMUM, and UNIT KERJA. A sidebar on the left lists various categories such as PERADILAN, DEWAN ETIK, MAJELIS KEHORMATAN MK, and KODE ETIK (SAPTA KARSAS HUTAMA). The main content area features a banner with the court's logo and the text 'LEMBAGA NEGARA PENGAWAL KONSTITUSI'. Below the banner, there is a section titled 'KIRIM SURAT' with a 'Catatan' (Note) section and a form for sending letters. The form includes fields for Name, Email, Phone, Isi Surat (letter content), File, Kode, and Keamanan. A 'Kirim' button is at the bottom of the form.

After

The screenshot shows the new website interface for the Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. The header includes the court's name and a language selector for 'English' and a 'Menu Internal' link. The main navigation bar contains links for BERANDA, PERADILAN, HAKIM, PERKARA, PERATURAN, ADMINISTRASI UMUM, and PUBLIKASI. The main content area features a large banner with the text 'Kirim Surat' and a blue button. Below the banner, there is a section titled 'Kirim Surat ke Mahkamah Konstitusi' with a 'Catatan' (Note) section and a form for sending letters. The form includes fields for Name, Email, Phone, Isi Surat (letter content), Upload File, Kode, and Keamanan. A 'Kirim' button is at the bottom of the form.

Berita MKRI

Before

The screenshot shows the old website layout. At the top, there is a header with the date 'Jumat, 08 Maret 2024' and a language selector 'English'. Below this is the main header with the logo of the Constitutional Court and the text 'LEMBAGA NEGARA PENGAWAL KONSTITUSI'. A navigation bar contains links for 'BERANDA', 'PERADILAN', 'HAKIM', 'PERKARA', 'PERATURAN', 'ADMINISTRASI UMUM', and 'UNIT KERJA'. The main content area is divided into sections: 'BERITA POPULER' (Popular News) with a featured article 'Serin, 22 Januari 2024 | 18:59 WIB' about an advocate's case, and 'BERITA SIDANG' (Court Proceedings) with a featured article 'Saksi Pasangan Aria-Erina Ungkap Politik Uang dalam Pilkada Pesisir Barat'. There is also a 'TERKINI' (Latest) section with several short news items. A sidebar on the right contains a WhatsApp icon. At the bottom, there is a footer with contact information: '2352-9000', 'KIRIM SURAT', 'TANYA JAWAB', 'WHISTLEBLOWING', 'HUBUNGI MK', 'MEDIA SOSIAL', and 'PENGUNJUNG'.

After

The screenshot shows the new website layout. At the top, there is a header with the logo and name of the Constitutional Court, and a language selector 'English' and 'Menu Internal'. Below this is a navigation bar with links for 'BERANDA', 'PERADILAN', 'HAKIM', 'PERKARA', 'PERATURAN', 'ADMINISTRASI UMUM', and 'PUBLIKASI'. The main content area features a large hero section with the text 'Berita MKRI' and a search bar. Below the hero section, there is a section for 'BERANDA / BERITA' with a search bar and a date filter '08 Mar 2024'. The main content area is a grid of news articles, each with a thumbnail image and a title. The articles include: 'Advokat Perbaiki Uji Citra Diri Peserta Pemilu', 'Aturan Ambang Batas Parlemen Empat Persen Konstitusional Bersyarat...', 'Putusan MK Soal Batas Usia Capres-Cawapres Final dan Mengikat', 'Calon Anggota Dewan Terpilih Belum Perlu Undur Diri Saat Maju Pilkada', 'Caleg Terpilih Harus Mundur Saat Maju dalam Pilkada?', 'Permohonan Pembatalan Putusan MK Soal Batas Usia Capres-Cawapres...', 'MK Tolak Upaya Pemisahan Ditjen Pajak dari Kementerian Keuangan', and 'Pakar dari The City University of New York Sebut Pasal 33 UUD 1945 Sebag...'. The footer contains the same contact information as the old version.

Unit Kerja

Before

The screenshot shows the old website layout. At the top, there is a header with the date 'Kamis, 08 Maret 2024' on the left and a logo on the right. Below the header, the main navigation bar includes 'MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA' on the left, the Garuda logo in the center, and 'LEMBAGA NEGARA PENGAWAL KONSTITUSI' on the right. A secondary navigation bar contains links for 'BERANDA', 'PERADILAN', 'HAKIM', 'PERKARA', 'PERATURAN', 'ADMINISTRASI UMUM', and 'UNIT KERJA'. The main content area is titled 'BERANDA-UNIT KERJA' and features a grid of 10 unit cards, each with an image and a title: 'Kepaniteraan', 'Biro Perencanaan dan Keuangan', 'Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi', 'Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan', 'Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol', 'Biro Umum', 'Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi', 'Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi', 'Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelola Perpustakaan', and 'Inspektorat'. At the bottom, there is a footer with a phone icon and the number '2352-9000', and several service links: 'KIRIM SURAT', 'TANYA JAWAB', 'WHISTLEBLOWING', 'HUBUNGI MK', 'MEDIA SOSIAL', and 'PENGUNJUNG'.

After

The screenshot shows the new website layout. The header features the 'Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia' logo on the left, and 'English' and 'Menu Internal' links on the right. The main navigation bar includes links for 'BERANDA', 'PERADILAN', 'HAKIM', 'PERKARA', 'PERATURAN', 'ADMINISTRASI UMUM', and 'PUBLIKASI'. Below the navigation bar, there is a dark banner with a blue accessibility icon on the left and a Garuda logo on the right. The main content area is titled 'BERANDA / UNIT KERJA' and features a section for 'Aplikasi Internal' with 10 unit cards, each with a title, description, and a 'Selengkapnya' link: 'KEPANITERAAN', 'BIRO RENKEU', 'BIRO SDMO', 'BIRO HAK', 'BIRO HP', 'BIRO UMUM', 'PUSTIK', 'PUSDIK MK', 'PUSLITKA', and 'INSPEKTORAT'. Below this section, there is a section for 'Aplikasi Lainnya'.

Peradilan

Before

The screenshot shows the old website interface for the Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. It features a top navigation bar with the date 'Jumat, 08 Maret 2024' and a language selector for 'English'. The main header includes the logo of the institution and the text 'LEMBAGA NEGARA PENGAWAL KONSTITUSI'. Below this is a secondary navigation bar with categories like BERANDA, PERADILAN, HAKIM, PERKARA, PERATURAN, ADMINISTRASI UMUM, and UNIT KERJA. The main content area is divided into several sections: PERADILAN (with sub-sections like SEJARAH DAN PERKEMBANGAN, VISI DAN MISI, etc.), DEWAN ETIK, MAJELIS KEHORMATAN MK, and KODE ETIK (SAPTA KARSAS HUTAMA). A central image shows the building facade with 'MAHKAMAH KONSTITUSI' written on it. Below this is a 'PERADILAN' section with icons for Sejarah dan Perkembangan, Visi dan Misi, Kedudukan dan Kewenangan, and Struktur Organisasi. A 'SEJARAH SINGKAT' section follows, containing a paragraph of text and a small image of a building.

After

The screenshot shows the new website interface for the Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. It features a top navigation bar with the date '08 Maret, 2024', a language selector for 'English', and a 'Menu Internal' button. The main header includes the logo and the text 'Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia'. Below this is a secondary navigation bar with categories like BERANDA, PERADILAN, HAKIM, PERKARA, PERATURAN, ADMINISTRASI UMUM, and PUBLIKASI. The main content area is divided into several sections: PERADILAN (with sub-sections like Sejarah dan Perkembangan, Visi & Misi, etc.), DEWAN ETIK, and MAJELIS KEHORMATAN MK. A central image shows the building facade with 'MAHKAMAH KONSTITUSI' written on it. Below this is a 'SEJARAH SINGKAT' section, which is a detailed text block about the institution's history. At the bottom, there are buttons for 'Download Aplikasi MK' and 'Media Sosial'.

Peradilan - Struktur Organisasi

Before

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

LEMBAGA NEGARA PENGAWAL KONSTITUSI

BERANDA PERADILAN HAKIM PERKARA PERATURAN ADMINISTRASI UMUM UNITY KERJA

PERADILAN

HAKIM KONSTITUSI

- SUHARTOYO (KETUA)
- SALDI ISRA (WAKIL)
- ANWAR USMAN
- ARIEF HEDAWI
- ENNY NURBANNINGSIH
- DANIEL YUSMICH PANGASTIKA FORDI
- M. GUNTUR HANZAH
- RIDWAN MANSYUR

• ARGUL SANI

SEKEN

• HERU SETIAWAN

PANITERA

• MUHIDIN

SEKEN PERIODE SEBELUMNYA

- M. GUNTUR HANZAH
- JANEDIRI M. GAFFAR
- A.A. OKA MAHENDRA

PANITERA PERIODE SEBELUMNYA

- MARCEL BUCHARI, S.H
- DR. H. AHMAD FADIL SUMADI, S.H., M. HUM.
- ZANAL ARIFAN HOESEN
- KASIANUR SIDALUK

BERANDA / PERADILAN / STRUKTUR ORGANISASI

STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Sebagai Berikut:

Untuk melihat tugas pokok dan fungsi Kepaniteraan dan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi [Klik Disini](#)

After

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

English Menu Internal

BERANDA PERADILAN HAKIM PERKARA PERATURAN ADMINISTRASI UMUM PUBLIKASI

Struktur Organisasi

Peradilan Dewan Etik Majelis Kehormatan MK

Peradilan Kerdudukan & Kewenangan Sumpah & Jangsi Hakim

Sejarah & Perkembangan **Struktur Organisasi** Emblem, Hymne & Mars

Visi & Misi Tugas Pokok & Fungsi Lokasi

BERANDA / PERADILAN / STRUKTUR ORGANISASI

KODE ETIK (SAPTA KARSA HUTAMA) PENGUMUMAN DEWAN ETIK

Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Sebagai Berikut:

Klik pada bagan organisasi untuk informasi lebih lanjut

KETUA & WAKIL KETUA

Before

The screenshot shows the official website of the Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. The header includes the date 'Jumat, 08 Maret 2024', a search bar, and the text 'MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA' and 'LEMBAGA NEGARA PENGAWAL KONSTITUSI'. A navigation menu lists 'BERANDA', 'PERADILAN', 'HAKIM', 'PERKARA', 'PERATURAN', 'ADMINISTRASI UMUM', and 'UNITY KERJA'. The main content area is titled 'STRUKTUR ORGANISASI' and includes a photograph of the building. Below the photo is a detailed organizational chart showing the hierarchy from the Chief Justice down to various departments and offices. A legend at the bottom of the chart explains the symbols used in the diagram.

After

This section displays a simplified organizational chart and a list of judges. The chart at the top shows a hierarchy with three levels: 'PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN' and 'KUMUNIKASI' at the top level, 'PUSAT PENDIDIKAN PANCIASILA DAN KONSTITUSI' in the middle, and a bottom level with three lines representing different types of reporting relationships. A legend below the chart defines these lines: a solid line for 'Garis Komando', a dashed line for 'Garis Koordinasi', and a dotted line for 'Garis Pengawas'. Below the chart is a grid of eight judge portraits. The first four are in the top row, and the last four are in the bottom row. Each portrait is accompanied by the judge's name and title. The first four judges are: Dr. Suhartoyo S.H., M.H. (Hakim Konstitusi); Prof. Dr. Saldi Isra, S.H. (Hakim Konstitusi); Prof. Dr. Anwar Usman, S.H., M.H. (Hakim Konstitusi RI); and Prof. Dr. Arief Hidayat S.H., M.S. (Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi RI). The last four judges in the bottom row have their names and titles obscured by a grey bar.

Peradilan - Profil MKMK

Before

The screenshot shows the old website layout. At the top, there is a header with the date 'Jumat, 08 Maret 2024' and the logo of the Constitutional Court. Below the header is a navigation menu with items: BERANDA, PERADILAN, HAKIM, PERKARA, PERATURAN, ADMINISTRASI UMUM, and UNIT KERJA. The main content area is divided into several sections: PERADILAN (with sub-items like SEBARAH DAN PERKEMBANGAN, VISI DAN MISI, etc.), DEWAN ETIK, MAJELIS KEHORMATAN MK, and KODE ETIK (SAPTA KARSAS HUTAMA). A large image of a courtroom is featured, and below it is a profile section for Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., including his photo, name, and a detailed biography.

After

The screenshot shows the new website layout. At the top, there is a header with the logo of the Constitutional Court and the text 'Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia'. Below the header is a navigation menu with items: BERANDA, PERADILAN, HAKIM, PERKARA, PERATURAN, ADMINISTRASI UMUM, and PUBLIKASI. The main content area is a large dark banner with the title 'Profil MKMK' and a sub-menu with items: Peradilan, Dewan Etik, and Majelis Kehormatan MK. Below the banner is a grid of links for various sections: Profil MKMK, Jadwal Sidang MKMK, Peraturan MKMK, Risetah Sidang MKMK, Pelaporan MKMK, and Keputusan MKMK. Below this is a profile section for Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., including his photo, name, and a detailed biography.

Peradilan - Jadwal Sidang MKMK

Before

After

Hakim

Before

April 08 Maret 2024

English

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

LEMBAGA NEGARA PENGAWAL KONSTITUSI

BERANDA PERADILAN **HAKIM** PERKARA PERATURAN ADMINISTRASI UMUM UNIT KERJA

HAKIM

HAKIM KONSTITUSI

- SUHARTOYO (KETUA)
- SALDI ISRA (WAKIL)
- ANWAR USMAN
- ARIEF HIDAYAT
- ENNY NURBANINGSIH
- DANIEL YUSMID PRACASTAJO FORBID
- M. GUNTUR HAMZAH
- RIDWAN MANDYUR
- ARISU SANI

HAKIM PERIODE SEBELUMNYA

- KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI
- WAKIL KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI
- HAKIM KONSTITUSI

HAKIM KONSTITUSI

No.	Foto	Nama	Masa Jabatan	Lembaga Pengusul
1		Dr. Suhartoyo S.H., M.H. Ketua Mahkamah Konstitusi (09 November 2023 s/d 09 November 2028)	Periode 1: 07 Januari 2020 s/d 07 Januari 2020 Periode 2: 07 Januari 2020 s/d 13 November 2029	Mahkamah Agung Mahkamah Agung
2		Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	11 April 2017 s/d 11 April 2022	Presiden
3		Prof. Dr. Anwar Usman, S.H., M.H.	Periode 1: 06 April 2011 s/d 06 April 2016 Periode 2: 07 April 2016 s/d 07 April 2026	Mahkamah Agung Mahkamah Agung
4		Prof. Dr. Arief Hidayat S.H., M.S.	Periode 1: 01 April 2013 s/d 01 April 2018 Periode 2: 27 Maret 2018 s/d 03 Februari 2026	Dewan Perwakilan Rakyat Dewan Perwakilan Rakyat

After

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

English Menu Internal

BERANDA PERADILAN **HAKIM** PERKARA PERATURAN ADMINISTRASI UMUM PUBLIKASI

Hakim Konstitusi

HAKIM

Hakim Konstitusi Hakim Periode Sebelumnya

BERANDA / HAKIM / HAKIM KONSTITUSI

Hakim Konstitusi

Dr. Suhartoyo S.H., M.H.

Jabatan :
Hakim Konstitusi

Masa Jabatan :
Periode 1 : 01 Januari 2020 s/d 01 Januari 2029
Periode 2 : 01 Januari 2023 s/d 01 Januari 2028
Periode 3 : 01 Januari 2015 s/d 01 Januari 2020

Lembaga Pengusul :
Periode 1 : Mahkamah Agung
Periode 2 : Mahkamah Agung
Periode 3 : Mahkamah Agung

Profil :
[Klik Disini](#)

Perkara

Before

LEMBAHA NEGARA PENGAWAL KONSTITUSI

BERANDA PERADILAN HAKIM PERKARA PERATURAN ADMINISTRASI UMUM UNIT KERJA

PERKARA

PROSEDUR PERMOHONAN PERMOHONAN ONLINE TAHAPAN PERKARA

- PENGALUAN PERMOHONAN
- PEMERIKSAAN KELENGKAPAN
- PERUBAHAN PERMOHONAN
- REGISTRASI
- PENYAMPILAN SALINAN PERMOHONAN DAN PEMBERTAHAN SIDANG PERTAMA
- PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
- PEMERIKSAAN PERSIDANGAN
- SIDANG PENGUCAPAN PUTUSAN
- PENYERAHAN SALINAN PUTUSAN

PERSIDANGAN

- JADWAL SIDANG
- RISALAH
- ANDALAH

REKAPITULASI PERKARA

- REKAPITULASI PERKARA PLU
- REKAPITULASI PERKARA SKN
- REKAPITULASI PERKARA PHPKADA
- REKAPITULASI PERKARA PHPU

Rekapitulasi Putusan

No	Jenis	Jumlah	Persentase
1	PLU	1781	49.17%
2	SKN	29	0.80%
3	PHPU	676	18.66%
4	PHPKADA	1136	31.36%
Total		3622	100%

TAHAPAN PERKARA

START

Pengajuan Permohonan Pemeriksaan Kelengkapan Perbaikan Permohonan

Permohonan Online (simplon.mki.id)

Registrasi Penyampaian Salinan Permohonan dan Pemeriksaan Pendahuluan Pemeriksaan Persidangan

After

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

BERANDA PERADILAN HAKIM PERKARA PERATURAN ADMINISTRASI UMUM PUBLIKASI

Perkara

TAHAPAN KERJA PERSIDANGAN REKAPITULASI PERKARA

Perkara

Pengajuan Permohonan Perkara Registrasi

BERANDA / TAHAPAN KERJA

Prosedur Permohonan
Klik prosedur permohonan untuk mengetahui langkah-langkah pendaftaran permohonan secara langsung dan secara online

Permohonan Online
Klik permohonan online untuk melakukan permohonan melalui website <https://simplon.mki.id/> Sistem Informasi Manajemen Perkara Elektronik

10 UNDANG-UNDANG YANG SERING DIUJI

NO	NAMA UNDANG-UNDANG	JUMLAH
1	Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	137
2	Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana	83
3	Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang	48
4	Undang-undang Nomor 8 tahun 2015 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota	39

Perkara - Jadwal Sidang

Before

The 'Before' screenshot shows a complex and cluttered interface. At the top, there is a header with the date 'Minggu, 10 Maret 2024', a logo, and an 'English' language selector. Below this is a main navigation bar with categories like BERANDA, PERADILAN, HAKIM, PERKARA, PERATURAN, ADMINISTRASI UMUM, and UNIT KERJA. A secondary navigation bar on the left lists various case-related actions such as 'PROSEDUR PERMOHONAN', 'PERMOHONAN ONLINE', and 'TAHAPAN PERKARA'. The main content area features a large image of a courtroom and a table titled 'JADWAL SIDANG' (Court Schedule). This table lists cases with columns for 'Tanggal' (Date), 'Perkara' (Case Name), 'Pemohon' (Petitioner), 'Kuasa' (Authorized Person), 'Acara' (Event), and 'Keterangan' (Remarks). Below the table is a 'Rekapitulasi Putusan' (Case Summary) table.

Tanggal	Perkara	Pemohon	Kuasa	Acara	Keterangan
Rabu 13 Maret 2024, 10:30 WIB	135/PUU-X00/2023 Penggajian Materi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi	Dr. Teguh Satya Braks, S.H., M.H.	Viktor Santoso Tardasa Harato Setyadi Rajah, S.H. Nur Rizqi Khaffan Rutina Haryati, S.H.	Mendengarkan Keterangan DPR, Atas Pemohon dan Ahli/Saksi Presiden (V)	Tempat: Gd. M081 Lantai 2 Tracking Perkara: Tracking
Rabu 13 Maret 2024, 13:00 WIB	36/PUU-X00/2024 Penggajian Materi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	Moh. Quiyati	Dedy Ridadi Arain Sommo	Pemeriksaan Pendahuluan (I)	Tempat: Gd. M081 Lantai 2 Tracking Perkara: Tracking
Rabu 13 Maret 2024, 14:00 WIB	30/PUU-X00/2024 Penggajian Materi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketersediaan Umum dan Tata Cara Persajikan	Puguh Suwono	Aif Suherly Mayono, S.H.	Perbaikan Pemohonan (I)	Tempat: Gd. M081 Lantai 4 Tracking Perkara: Tracking

After

The 'After' screenshot shows a modernized and simplified interface. The top header includes the logo and 'Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia' with an 'English' language selector and a 'Menu Internal' button. The main navigation bar is streamlined with categories like BERANDA, PERADILAN, HAKIM, PERKARA, PERATURAN, ADMINISTRASI UMUM, and PUBLIKASI. A large, dark banner with the text 'Jadwal Sidang' and a Garuda logo is the central focus. Below the banner is a secondary navigation bar with 'TAHAPAN KERJA', 'PERSIDANGAN', and 'REKAPITULASI PERKARA'. The main content area features a 'Jadwal Sidang' section with a search bar and buttons for 'PRINT', 'COPY', and 'CSV'. Below this is a table with columns for 'TANGGAL', 'PERKARA', 'PEMOHON', 'KUASA', 'ACARA', and 'KETERANGAN'. The table lists a case on 'Selasa, 19 Maret 2024, 14:00 WIB' regarding 'Perindungan terhadap Hak Dasar Anak untuk Memperoleh Gizi Sehat'.

TANGGAL	PERKARA	PEMOHON	KUASA	ACARA	KETERANGAN
Selasa, 19 Maret 2024, 14:00 WIB	40/PUU-XXII/2024	Indonesia Food Security Review, dll.		Pemeriksaan Pendahuluan (I)	Tempat: - Tempat:

Perkara - Rekapitulasi PHPU

Before

The old website layout is cluttered with multiple navigation menus. The main content area features a table titled "REKAPITULASI PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM" with the following data:

Tahun	Dalam Proses yang lalu	Diregistrasi	Jumlah	Amat Putusan	Jumlah Putusan	Dalam Proses Tahun Ini	Keterangan
2004	0	44	44	Kabul : 15 Tolak : 13 Tidak Diterima : 16 Tarik Kembali : 0 Gugur : 0 Tidak Berwenang : 0	44	0	
2009	0	70	70	Kabul : 24 Tolak : 37 Tidak Diterima : 8 Tarik Kembali : 1 Gugur : 0 Tidak Berwenang : 0	70	0	
2014	0	297	297	Kabul : 1 Tolak : 291 Tidak Diterima : 2 Tarik Kembali : 2 Gugur : 0 Tidak Berwenang : 0	296	1	
2019	1	261	262	Kabul : 13 Tolak : 82 Tidak Diterima : 122 Tarik Kembali : 10 Gugur : 34 Tidak Berwenang : 0	261	1	
2024	1	0	1	Kabul : 0 Tolak : 0 Tidak Diterima : 0 Tarik Kembali : 0 Gugur : 0 Tidak Berwenang : 0	0	1	
				Kabul : 53 Tolak : 423			

Below the table is a "Rekapitulasi Putusan" table:

No	Perkara	Jumlah	Persentase
1	PUU	1781	49,17%
2	SKN	29	0,80%
3	PHPU	676	18,66%
4	PHPKADA	1196	31,36%
	Total	3622	100%

After

The new website layout is clean and modern. The main content area features a prominent "Rekapitulasi Perkara" header and a clear table of case statistics:

Tahun	Dalam Proses Yang Lalu	Diregistrasi	Jumlah	Amat Putusan	Jumlah Putusan	Dalam Proses Tahun Ini	Keterangan
2004	0	44	44	Kabul : 15 Tolak : 13 Tidak diterima : 16 Tarik Kembali : 0 Gugur : 0 Tidak Berwenang : 0	44	0	
2009	0	70	70	Kabul : 24 Tolak : 37 Tidak diterima : 8 Tarik Kembali : 1	70	0	

The new interface also includes a "Rekapitulasi Putusan" table and a "Prosedur Permohonan" section with a "Permohonan Online" button.

Administrasi Umum - Informasi Anggaran

Before

The old interface features a top navigation bar with a menu: BERANDA, PERADILAN, HAKIM, PERKARA, PERATURAN, ADMINISTRASI UMUM, and UNIT KERJA. A sidebar on the left lists various administrative categories. The main content area includes a header with the court's name and logo, followed by a 'GRAFIK INFORMASI ANGGARAN' section. This section contains two bar charts: 'Penyerapan Anggaran' (Annual Budget Absorption) and 'Penyerapan Anggaran Per-Biro' (Monthly Budget Absorption by Office).

Tahun	Penyerapan (%)
2020	9.82%
2021	15.23%
2022	21.85%
2023	28.39%
2024	34.71%
2025	42.89%
2026	50.09%
2027	54.39%
2028	63.56%
2029	72.03%
2030	85.17%
2031	98.74%

Bulan	Penyerapan (%)
Januari	98.56%
Februari	95.36%
Maret	95.82%
April	95.43%
Mei	96.21%
Juni	99%
Juli	99.8%
Agustus	99.98%
September	99.91%
Oktober	99.81%
November	99.81%
Desember	99.81%

After

The new interface has a modern, clean design. The top navigation bar is simplified to: BERANDA, PERADILAN, HAKIM, PERKARA, PERATURAN, ADMINISTRASI UMUM, and PUBLIKASI. A prominent dark header with the title 'Informasi Anggaran' is featured. Below it, a secondary navigation bar highlights 'AKUNTABILITAS PUBLIK'. The main content area includes a grid of menu items: Rencana Strategis, Laporan Keuangan, Pelayanan Publik, Informasi Anggaran, Daftar Inventaris Barang, PPD, and LAKIP. A 'GRAFIK Informasi Anggaran' section is present, featuring a 'Penyerapan Anggaran' bar chart for the year 2020.

Bulan	Penyerapan (%)
Januari	~10%
Februari	~15%
Maret	~20%
April	~25%
Mei	~30%
Juni	~35%
Juli	~40%
Agustus	~45%
September	~50%
Oktober	~55%
November	~60%
Desember	~65%

Administrasi Umum - LHKPN

Before

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

LEMBAGA NEGARA PENGAWAL KONSTITUSI

BERANDA PERADILAN HAKIM PERKARA PERATURAN ADMINISTRASI UMUM UNIT KERJA

ADMINISTRASI UMUM

AKUNTABILITAS PUBLIK

- RENCANA STRATEGIS
- INFORMASI ANGGARAN
- LKAP
- LAPORAN KEUANGAN
- DAFTAR INVENTARIS BARANG
- DAFTAR PNBP
- PELAYANAN PUBLIK
- PPD

KEPEGAWAIAN

- LHKPN
- STATISTIK PEGAWAI
- DATA PEGAWAI

RESEARCH

- HASIL PENELITIAN

KEHUMASAN

- KERJASAMA
- SIPRM MK
- LINK

REFORMASI BIROKRASI

- EMBLEM, HIMNE DAN MARS

INFORMASI

- INFORMASI LELANG
- PENGUMUMAN
- LPSE MAHKAMAH KONSTITUSI RI

e-Announcement

Lapor LHKPN

Tabel LHKPN 2022

No	Unit Kerja	Jumlah Wajib Lapor	Jumlah yang Telah Melaporkan Kekayaan	%
1	Hakim Konstitusi	9	7	78%
2	Pegawai Penyelenggara Negara Wajib LHKPN	46	45	98%
3	Pegawai/ASN	223	220	99%

Tabel LHKPN 2021

No	Unit Kerja	Jumlah Wajib Lapor	Jumlah yang Telah Melaporkan Kekayaan	%
1	Hakim Konstitusi	9	7	78%
2	Pegawai Penyelenggara Negara Wajib LHKPN	46	46	100%
3	Pegawai/ASN	223	221	99%

After

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

BERANDA PERADILAN HAKIM PERKARA PERATURAN ADMINISTRASI UMUM PUBLIKASI

LHKPN

AKUNTABILITAS PUBLIK KEPEGAWAIAN KEHUMASAN SIARAN PERS INFO PUBLIK

LHKPN Data Pegawai Statistik Pegawai

BERANDA / KEPEGAWAIAN

LHKPN

e-Announcement Lapor LHKPN

Tabel LHKPN 2022

NO	UNIT KERJA	JUMLAH WAJIB LAPOR	JUMLAH YANG TELAH MELAPORKAN KEKAYAAN	%
1	Hakim Konstitusi	9	7	78%
2	Pegawai Penyelenggara Negara Wajib LHKPN	46	45	98%
3	Pegawai/ASN	223	220	99%

Bar chart showing the percentage of reporting for each unit: Hakim Konstitusi (78%), Pegawai Penyelenggara Negara (98%), and Pegawai/ASN (99%).

Administrasi Umum - Statistik Pegawai

Before

The screenshot shows the old website interface. At the top, it says 'Minggu, 10 Maret 2024' and 'English'. The main header includes the logo of the Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia and the text 'LEMBAGA NEGARA PENGAWAL KONSTITUSI'. Below this is a navigation bar with categories: BERANDA, PERADILAN, HAKIM, PERKARA, PERATURAN, ADMINISTRASI UMUM, and UNIT KERJA. A sidebar on the left lists various administrative functions under 'ADMINISTRASI UMUM'. The main content area features a large image of documents and a pie chart titled 'Grafik Pegawai di Mahkamah Konstitusi'. The chart shows the following data:

Kategori	Jumlah
Pegawai Kontrak	283
Pegawai PNS	286
Pegawai Polri	51
Pegawai PPPK	18
Pegawai PPNPN	84

After

The screenshot shows the new website interface. The header includes the logo and 'Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia' with 'English' and 'Menu Internal' options. The navigation bar is simplified to: BERANDA, PERADILAN, HAKIM, PERKARA, PERATURAN, ADMINISTRASI UMUM, and PUBLIKASI. The main content area has a dark background with the title 'Statistik Pegawai' and a large image of the Garuda Pancasila. Below this is a navigation bar with categories: AKUNTABILITAS PUBLIK, KEPEGAWAIAN, KEHUMASAN, SIARAN PERS, and INFO PUBLIK. The main content area features a large image of documents and a donut chart titled 'Grafik Pegawai di Mahkamah Konstitusi'. The chart shows the following data:

Kategori	Jumlah
Pegawai Polri	51
Pegawai PNS	286
Pegawai Kontrak	283
Pegawai PPPK	18
Pegawai PPNPN	84

Administrasi Umum - Kerjasama

Before

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

LEMBAGA NEGARA PENGAWAL KONSTITUSI

BERANDA PERADILAN HAKIM PERKARA PERATURAN ADMINISTRASI UMUM UNIT KERJA

ADMINISTRASI UMUM

AKUNTABILITAS PUBLIK

- RENCANA STRATEGIS
- INFORMASI ANGGARAN
- LAMP
- LAPORAN KEUANGAN
- DAFTAR INVENTARIS BARANG
- DAFTAR PNBP
- PELAYANAN PUBLIK
- PIPD

KEPEGAWAIAN

- LINKIN
- STATISTIK PEGAWAI

DATA/CGHAIN

PENELITIAN

- HASIL PENELITIAN

KEHUMASAN

- KERJASAMA
- SIPRAME
- LINK
- REFORMASI BIKESKAD
- EMBLEM, HYMNE DAN MARS

INFORMASI

- INFORMASI LELANG
- PENJUALAN
- IPSI MAHKAMAH KONSTITUSI RI

BERANDA > INFORMASI ADMINISTRASI > KERJASAMA

KERJASAMA

Nota Kesepahaman : 279 Tanda Tangan Digital : 36 Tanda Tangan Basah : 243

No.	Modul	Tentang	Tanggal	Di Unduh
1	Nota Kesepahaman Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan Universitas Ahmad Dahlan	Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara dan Mutu Pendidikan Tinggi Hukum	Jum'at, 15 Desember 2023	Di Unduh : 49
2	NOTA KESEPAHAMAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA DAN UNIVERSITAS WIDYADARMA MALANG	PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA DAN MUTU PENDIDIKAN TINGGI HUKUM	Kamis, 14 Desember 2023	Di Unduh : 124
3	NOTA KESEPAHAMAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA DAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA	PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA DAN MUTU PENDIDIKAN TINGGI HUKUM	Kamis, 14 Desember 2023	Di Unduh : 120
4	NOTA KESEPAHAMAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA DAN UNIVERSITAS WIDYADARMA MALANG	PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA DAN MUTU PENDIDIKAN TINGGI HUKUM	Senin, 27 November 2023	Di Unduh : 376
5	NOTA KESEPAHAMAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA DAN UNIVERSITAS SIKRANTJARA MARESKAL SURYADARMA (SUNDRYA)	PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA DAN MUTU PENDIDIKAN TINGGI HUKUM	Senin, 16 Oktober 2023	Di Unduh : 203
-	Nota Kesepahaman Mahkamah Konstitusi Dan Kementerian	Penguatan Pelaksanaan Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pengendalian Kebijakan Kementerian Dan Lembaga Melalui	Selasa,	Di ...

After

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

BERANDA PERADILAN HAKIM PERKARA PERATURAN ADMINISTRASI UMUM PUBLIKASI

AKUNTABILITAS PUBLIK KEPEGAWAJAN KEHUMASAN SIARAN PERS INFO PUBLIK

Kerjasama

BERANDA / KEHUMASAN

Kerjasama

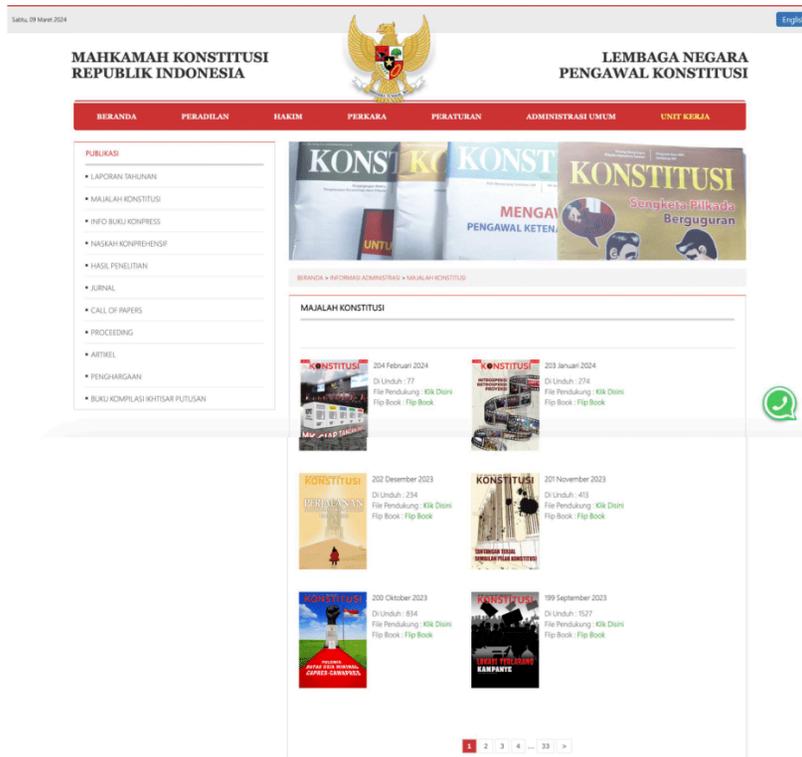
Nota Kesepahaman : 279 Tanda Tangan Digital : 36 Tanda Tangan Basah : 243

Cari kerjasama...

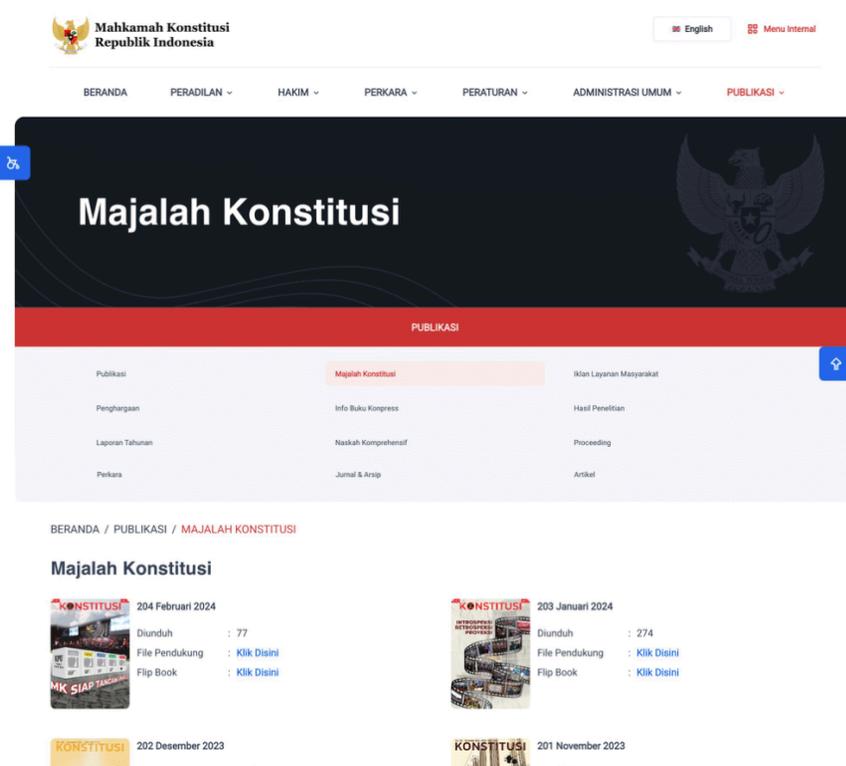
NO	JUDUL	TENTANG	TANGGAL	DI UNDUH
136/PK/2023	Nota Kesepahaman Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan Universitas Ahmad Dahlan	Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara dan Mutu Pendidikan Tinggi Hukum	Jumat, 15 Desember 2023	49
135/PK/2023 & 0331/C.6-VIII/XII/2023	NOTA KESEPAHAMAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA DAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA	PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA DAN MUTU PENDIDIKAN TINGGI HUKUM	Kamis, 14 Desember 2023	120

Publikasi - Majalah Konstitusi

Before



After



Pilkada Serentak

Before

Home | Daftar Pemohonan | Peraturan | Info Wilayah | Form Dan Akta | Alur Perkara | Tahapan | Jadwal Sidang | Jadwal Sidang Sebelumnya | Streaming

Mahkamah Konstitusi RI

Daftar Pemohonan Perkara Pilkada Serentak Tahun 2020

PERMOHONAN

Gubernur	Bupati	Walikota	Total
OL: 19 OFF: 4	OL: 74 OFF: 16	OL: 10 OFF: 2	OL: 61 OFF: 18

PERKARA

Gubernur	Bupati	Walikota	Total
OL: 19 OFF: 4	OL: 74 OFF: 16	OL: 10 OFF: 2	OL: 61 OFF: 18

Gubernur Bupati Walikota

Perkara Gubernur

Show: 10 entries

TANGGAL	PERMOHONAN/PERKARA	PARA PIHAK	FILE	PUTUSAN
Rabu, 25 Agustus 2021 10:44:40 WIB (Online)	PHP Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020 APPP Nomor : 155/PAN.LMK Registrasi Ni : 151/PHP.PGU	Pemohon: • Khairil Anwar Kuasa Pemohon: -	<ul style="list-style-type: none"> Pemohonan Pemohonan di Registrasi Perbaikan Pemohonan Jawaban Pemohonan Keterangan Bawaslu 	
Senin, 21 Juni 2021 14:14:52 WIB (Online)	PHP Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020 APPP Nomor : 150/PAN.MKAP/3/06/2021 Registrasi Nomor : 146/PHP.PGUB-XXX/2021	Pemohon: • Prof H Denny Indragana, S.H., LL.M., Ph.D. • Drs H DIFRIADI Kuasa Pemohon: • Dr. Bambang Widodo, S.H. • T.M. Luthfi Yazid, S.H., LL.M., CLU, CIL • Dr. Hanu Widodo, S.H., M.Hum • Tareq Muhammad Aziz Elyen, S.H. • Iskandar Sonhadji, S.H. • Iwan Satriawan, S.H., MCL., Ph.D. • Daniel Alim, S.H., M.Kn. • Febril Dianayah, S.H. • Donald Fariz, S.H., M.H. • Henjanto, S.H., M.H. • Dra. Wigati Ningsih, S.H., LL.M. • Zamrony, S.H., M.Kn., CKA • Harimuddin, S.H. • Muhammad Rizki	<ul style="list-style-type: none"> Pemohonan Pemohonan di Registrasi Pemohonan Pihak Terkait Jawaban Pemohonan Keterangan Bawaslu Keterangan Pihak Terkait 	

After

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

BERANDA PERADILAN HAKIM PERKARA PERATURAN ADMINISTRASI UMUM PUBLIKASI

English Menu Internal

Pengujian UUD & SKLN, Pilkada Serentak & PPHU Pilpres

PENGUJIAN UUD & SKLN PILKADA SERENTAK PPHU & PILPRES

Daftar Pemohonan Peraturan Info Wilayah
Form dan Akta Alur Perkara Tahapan
Jadwal Sidang Streaming

BERANDA / PILKADA SERENTAK / DAFTAR PERMOHONAN

Nomor APPP / Registrasi 2020

Daftar Pemohonan Perkara Pilkada Serentak Tahun 2020

Pemohonan

Gubernur	Bupati	Walikota	Total
OL : 97 OFF : 33	OL : 68 OFF : 31	OL : 70 OFF : 13	OL : 100 OFF : 62

Perkara

Gubernur	Bupati	Walikota	Total
: 48	: 6	: 100	: 69

Dokumentasi Teknis

Framework & Libraries

Berikut adalah beberapa *framework & libraries* utama yang digunakan dalam proyek ini.

	Nama	Versi	Tautan Dokumentasi Resmi	Deskripsi
Framework	Next.js	14.0.3	https://nextjs.org/docs	
UI Libraries	Chakra UI	2.8.2	https://chakra-ui.com/	
Utility Tools	Chart JS	4.4.1	https://www.chartjs.org/	Menampilkan chart
	D3 Org Chart	3.1.1	https://github.com/bumbeishvili/org-chart	Bagan Struktur Organisasi
	Day JS	1.11.10	https://day.js.org/	Format tanggal
	React Hook Form	7.49.2	https://react-hook-form.com/	Validasi formulir
	Sanitize HTML	2.11.0	https://github.com/apostrophecms/sanitize-html	Membersihkan html untuk ditampilkan dari respon api, menghindari serangan XSS
	swiper	11.0.5	https://swiperjs.com/	Sliding images
	ofetch	1.3.3	https://github.com/unjs/ofetch	API Requests

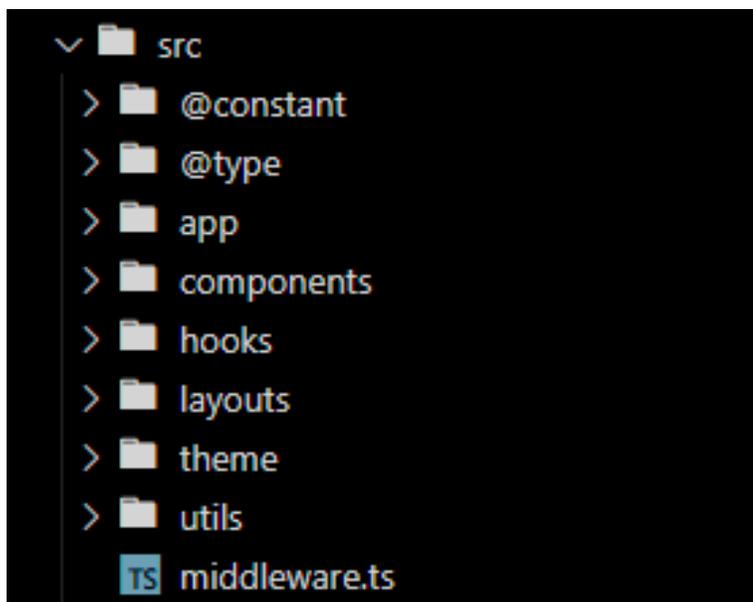
Struktur Kode

Pengaturan Dasar

Dalam mengatur kode agar sesuai dengan standard, kami menerapkan beberapa pengaturan seperti dibawah ini:

Nama	Path	Tujuan
Eslint Config	.eslintrc.json	Validasi konvensi kode agar seluruh kode mengikuti peraturan dan standar
Typescript Config	tsconfig.json	Pengaturan Typescript
Next Config	next.config.js	Pengaturan Next JS
Prettier Config	.prettierrc.json	Pengaturan indent dan baris baru
Package JSON	package.json	Daftar semua <i>framework & libraries</i> pendukung

Struktur Folder Utama (folder src)

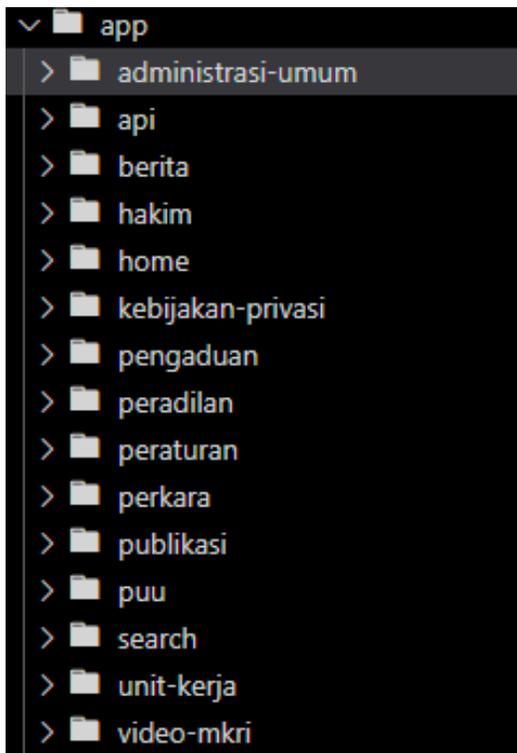


Nama Folder	Deskripsi
@constant	Semua konstanta, yaitu variabel yang tidak dapat diubah
@type	Seluruh deklarasi tipe dan antarmuka
app	Folder utama Next JS routing. Lebih lengkap mengenai app folder, dapat melihat dokumentasi disini https://nextjs.org/docs/app
components	Komponen yang dapat digunakan kembali secara global, tidak terikat dengan konteks bisnis tertentu.
hooks	Hooks global, tidak terikat dengan konteks bisnis tertentu.
layouts	Komponen dasar dari keseluruhan layout yang ada di website, terdiri dari Navbar, Main Content, Footer.
theme	Kustomisasi tema Chakra UI
utils	<i>Utility function.</i>
middleware.ts	Next JS HTTP Middleware, lihat dokumentasi lebih lengkap: https://nextjs.org/docs/app/building-your-application/routing/middleware

Folder App

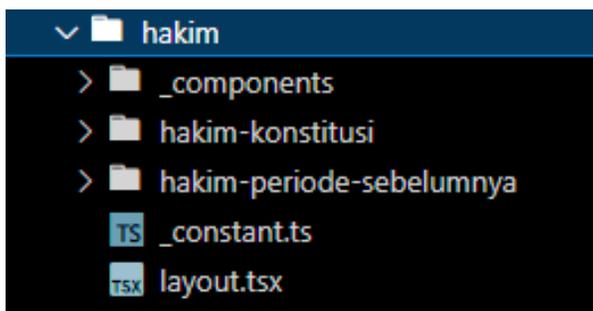
Berdasar pada konvensi daripada framework NextJS, semua yang ada didalam folder app akan menjadi url level 1, sebagai contoh:

- `{base_url}/administrasi-umum`
- `{base_url}/berita`
- `{base_url}/hakim, etc`



Kemudian, semua folder yang berada di dalam subfolder level 1 akan menjadi url level 2 dan seterusnya, sebagai contoh:

- `{base_url}/hakim/hakim-konstitusi`
- `{base_url}/hakim/hakim-periode-sebelumnya`



Menyajikan Tampilan

Jika dalam app folder tersebut memiliki file `page.tsx`, NextJs akan menyajikan tampilan sebuah laman, sebagai contoh untuk `{base_url}/unit-kerja`:



Folder unit kerja tersebut akan menyajikan tampilan karena memiliki file `page.tsx`. Jika tidak ada file `page.tsx` saat kita mengunjungi url `{base_url}/unit-kerja` di browser maka akan memunculkan laman 404 not found.

Dalam proyek ini, folder `Screen` digunakan untuk menempatkan view yang akan dirender oleh `page.tsx`. Sehingga jika di dalamnya terdapat `page.tsx`, maka folder `Screen` pun harus ada.

Dokumentasi lebih lengkap dapat dilihat melalui link ini:

<https://nextjs.org/docs/app/building-your-application/routing/pages-and-layouts>

File Layout

Jika di dalam subfolder terdapat file `layout.tsx`, pastikan bahwa seluruh subfolder atau url path selanjutnya akan menggunakan struktur layout antar muka yang sama, lebih jelasnya silahkan lihat <https://nextjs.org/docs/app/building-your-application/routing/pages-and-layouts>

Konvensi Kode

Untuk konvensi kode kami menggunakan *tools* seperti `eslint`, `prettier` dan `tsconfig`. Pengaturan dapat dilihat dalam file `.eslintrc.json`, `.prettierrc.json` and `tsconfig.json`. *Tools* tersebut akan berjalan saat kita melakukan `commit` dan `push` ke repository. Selain itu, saat kita sedang melakukan koding, mereka akan memberitahu kita tentang kesalahan dan akan mengeluarkan error.

Proyek ini juga mempunyai standar untuk *commit message*, dimana untuk *commit* diharapkan seluruh pengembang mengikuti standar yang sesuai agar nantinya memudahkan pengembang lain untuk melihat *git commit history*, silahkan lihat ke `.husky/commit-msg` untuk pengaturan konvensi nya.

Hasil Pengujian

Menu	Judul	Case	QA
Beranda	Banner	Banner tampil dengan kondisi: 1. Jumlah banner sesuai dengan response dari API 2. Judul, subjudul dan tombol (jika ada) akan tampil 3. Jika tombol di klik akan mengarahkan ke halaman yang dituju	PASS
	Search	1. Pencarian perkara mengarah pada tracking.mkri.id 2. Pencarian website mengarah pada halaman Search Result	PASS
	Tab Perkara	Tab putusan, risalah, ikhtisar dan anotasi tampil	PASS
	Putusan	Tab putusan tampil dengan kondisi: 1. menampilkan 5 item putusan terakhir 2. Tombol selengkapnya yang akan mengarah pada menu Perkara -> Putusan	PASS
	Risalah	Tab risalah tampil dengan kondisi: 1. Menampilkan 5 item risalah terakhir 2. Setiap item risalah memiliki file pdf dan juga file audio yang dapat di putar 3. Tombol selengkapnya yang akan mengarah pada halaman Perkara -> Ikhtisar	PASS
	Ikhtisar	Ikhtisar	PASS
	Anotasi	Tab anotasi tampil dengan kondisi: 1. Menampilkan 5 item anotasi terakhir 3. Tombol selengkapnya yang akan mengarah pada halaman Perkara -> Anotasi	PASS
	Kalendar Jadwal Sidang	Kalendar jadwal sidang tampil dengan kondisi: 1. Menampilkan bulan berjalan 2. Memberikan tanda pada hari ini dan hari libur 3. Memberikan tanda pada sidang, putusan, tunda dan keduanya 4. Terdapat tombol untuk mengganti bulan 5. Pada tanggal yang terdapat kegiatan jika di klik mengarah pada halaman Jadwal Sidang dengan filter tanggal terpilih 6. Pada hari libur jika di klik menampilkan Jadwal Hari Libur 7. Terdapat tombolnya Selengkapnya yang akan mengarah pada halaman Jadwal Sidang	PASS
Menu Permohonan Online	Tampil menu permohonan online yang mengarah pada simpler.mkri.id	PASS	

	Menu Pengujian UUD & SKLN	Jika di klik mengarah pada halaman Pengujian UUD & SKLN > Peraturan dengan filter tahun terpilih	PASS
	Menu Pilkada Serentak	Jika di klik mengarah pada halaman Pilkada Serentak > Daftar Pemohon dengan filter tahun terpilih	PASS
	Menu PHPU & Pilpres	Jika di klik mengarah pada halaman PHPU Pilpres > Daftar Pemohon dengan filter tahun terpilih	PASS
	Pengumuman	Menampilkan pengumuman dengan kondisi: 1. Tanggal pengumuman dan statistik dilihat 2. Icon menyesuaikan tipe pengumuman (PDF, IMAGE) 3. Jika di klik mengarah ke halaman yang dituju 4. Terdapat tombol selengkapnya yang mengarah pada halaman Administrasi Umum > Info Publik > Pengumuman	PASS
	Video MKRI	Menampilkan video mkri dengan kondisi: 1. 4 Video dengan 1 video besar 2. Dapat di play secara langsung 3. Tombol selengkapnya yang mengarah pada halaman Video MKRI 4. Terdapat label LIVE atau Siaran Ulang	PASS
	Berita MKRI	Menampilkan berita mkri dengan kondisi: 1. Terdapat 4 tab (berita populer, berita sidang, berita non sidang, berita 2 menit) 2. Berita tampil sesuai tab yang dipilih 3. Terdapat tombol selengkapnya dan tombol slide kiri dan kanan	PASS
	Aplikasi Lainnya	Menampilkan aplikasi aplikasi external yang dapat di klik dan akan mengarah ke halaman aplikasi tersebut	PASS
	Layanan Pengaduan dan Informasi	Menampilkan tombol Pusat Pengaduan yang mengarah ke halaman Pengaduan	PASS
	Hubungi MK	Menampilkan tombol Hubungi MK yang akan mengarah ke contactmk.mkri.id	PASS
	English	Menampilkan tombol yang akan mengarah ke en.mkri.id	PASS
	Tombol Internal	Menampilkan tombol yang akan mengarah ke website internal mkri.id	PASS
Footer	Footer	Menampilkan footer sesuai dengan desain dan juga menu yang bisa di klik mengarah pada halaman masing-masing	PASS
Video MKRI	Live Streaming	- Menampilkan video streaming sesuai dengan ruang sidang - Menampilkan 4 video siaran ulang - Menampilkan lokasi video conference dalam bentuk peta dan table	PASS

		- Terdapat tombol menuju ke youtube channel MKRI	
	Jadwal Kuliah Umum	https://contactmk.mkri.id/id/kuliah_umum	PASS
	Jadwal Kunjungan MKRI	https://contactmk.mkri.id/id/kunjungan/aktif	PASS
	Pengelolaan Vicon	Menampilkan tabel pengelolaan vicon	PASS
Hakim	Hakim Konstitusi	- Menampilkan list hakim yang sedang menjabat saat ini (ketua, wakil dan anggota) - Setiap hakim memiliki informasi nama, jabatan, masa jabatan, lembaga pengusul - Terdapat tombol profil yang jika di klik akan menampilkan detail profil hakim	PASS
	Profil Hakim	- Menampilkan profil hakim berdasarkan yang di pilih	PASS
	Hakim Periode Sebelumnya	- Menampilkan list hakim yang sedang menjabat sebelumnya - Terdapat tab Ketua, Wakil, Hakim Konstitusi - Setiap hakim memiliki informasi nama, jabatan, masa jabatan, lembaga pengusul	PASS
Perkara	Perkara	- Menampilkan 10 undang-undang yang sering diuji dan rekapitulasi utusan dalam bentuk tabel - Grafik PUU, SKLN, PHPU, dan PHPKADA - Grafik putusan kabul	PASS
	Prosedur Permohonan	Menampilkan informasi untuk pendaftaran permohonan langsung dan pendaftaran permohonan online	PASS
	Permohonan Online	simpler.mkri.id	PASS
	Pengajuan Permohonan	- Menampilkan list pengajuan permohonan berdasarkan jenis dalam bentuk tab (PUU, SKLN, PHPU, PHPKADA) - Terdapat tombol contoh permohonan dan sistematika permohonan untuk jenis masing-masing - Dapat melakukan pencarian berdasarkan jenis masing-masing - Nomor AP3 pada masing-masing item dapat di klik dan mengarah pada file tersebut - Jika memiliki Dokumen, terdapat link menuju dokumen tersebut - Terdapat pagination	PASS

Perkara Registrasi	<ul style="list-style-type: none"> - Menampilkan list perkara registrasi berdasarkan jenis dalam bentuk tab (PUU, SKLN, PHPU, PHPKADA) - Dapat melakukan pencarian di masing-masing jenis - Terdapat file yang di lihat (Permohonan dan Permohonan Registrasi) - Terdapat pagination 	PASS
Jadwal Sidang	<ul style="list-style-type: none"> - Menampilkan jadwal sidang mulai dari hari ini dan seterusnya (tanggal, perkara, pemohon, kuasa, acara dan keterangan) - Terdapat pagination sesuai dengan jumlah sidang (10 untuk 1 page) - Dapat melakukan pencarian - Dapat mencetak, download dalam bentuk CSV dan copy ke clipboard - Terdapat tombol tracking yang mengarah pada tracking.mkri.id - Terdapat pagination 	PASS
Putusan	<ul style="list-style-type: none"> - Menampilkan putusan berdasarkan jenis (PUU, SKLN, PHPU, PHPKADA) dalam bentuk tab - Setiap item putusan terdapat Tanggal, No AP3, Pokok Perkara, Pemohon, Amar Putusan, Status, Di Unduh, Kata Kunci dan File Pendukung - Dapat melihat File Pendukung - Dapat melakukan pencarian di masing-masing jenis - Terdapat pagination 	PASS
Risalah	<ul style="list-style-type: none"> - Menampilkan risalah berdasarkan jenis (PUU, SKLN, PHPU, PHPKADA) dalam bentuk tab - Setiap item putusan terdapat Tanggal, Nomor Perkara, Pokok Perkara, Acara Sidang, Di Unduh, File Pendukung dan File Audio - File Pendukung dan File Audio dapat di klik - Dapat melakukan pencarian di masing-masing jenis - Terdapat pagination 	PASS
Ikhtisar	<ul style="list-style-type: none"> - Menampilkan ikhtisar berdasarkan jenis (PUU, SKLN, PHPU, PHPKADA) dalam bentuk tab - Setiap item putusan terdapat Tanggal, Nomor Perkara, Pokok Perkara, Di Unduh dan File Pendukung - File Pendukung dapat di klik - Dapat melakukan pencarian di masing-masing jenis - Terdapat pagination 	PASS
Anotasi	<ul style="list-style-type: none"> - Setiap item anotasi terdapat judul yang dapat di klik - Terdapat pagination - Dapat melakukan pencarian 	PASS

	Rekapitulasi Perkara PUU	- Terdapat tabel rekapitulasi perkara PUU dengan pagination - Setiap item rekapitulasi perkara terdapat Tahun, Dalam Proses Yang Lalu, Diregistrasi, Jumlah, Amar Putusan, Jumlah Putusan, Dalam Proses Yang Ini, Keterangan	PASS
	Rekapitulasi Perkara PHPU	- Terdapat tabel rekapitulasi perkara PHPU dengan pagination - Setiap item rekapitulasi perkara terdapat Tahun, Dalam Proses Yang Lalu, Diregistrasi, Jumlah, Amar Putusan, Jumlah Putusan, Dalam Proses Yang Ini, Keterangan	PASS
	Rekapitulasi Perkara SKLN	- Terdapat tabel rekapitulasi perkara SKLN dengan pagination - Setiap item rekapitulasi perkara terdapat Tahun, Dalam Proses Yang Lalu, Diregistrasi, Jumlah, Amar Putusan, Jumlah Putusan, Dalam Proses Yang Ini, Keterangan	PASS
	Rekapitulasi Perkara PHPKADA	- Terdapat tabel rekapitulasi perkara PHPKADA dengan pagination - Setiap item rekapitulasi perkara terdapat Tahun, Dalam Proses Yang Lalu, Diregistrasi, Jumlah, Amar Putusan, Jumlah Putusan, Dalam Proses Yang Ini, Keterangan	PASS
Peraturan	Peraturan	Menampilkan statistik seluruh peraturan MK dalam bentuk pie chart	PASS
	Peraturan MK	- Menampilkan tabel peraturan MK dengan item Judul, Tentang, Di Unduh, File Pendukung dengan pagination - File Pendukung dapat di klik	PASS
	Peraturan Ketua MK	- Menampilkan tabel peraturan Ketua MK dengan item Judul, Tentang, Di Unduh, File Pendukung dengan pagination - File Pendukung dapat di klik	PASS
	Peraturan dan Keputusan Sekjen	- Menampilkan tabel peraturan dan keputusan Sekjen dengan item Judul, Tentang, Di Unduh, File Pendukung dengan pagination - File Pendukung dapat di klik	PASS
Publikasi	Publikasi	Menampilkan grafik jumlah publikasi dan download file publikasi	PASS
	Penghargaan	Menampilkan list penghargaan dengan pagination dan dapat di klik untuk melihat gambar penghargaan lebih besar	PASS
	Laporan Tahunan	Menampilkan list laporan tahunan dengan gambar, judul, di unduh, file pendukung, link video, flip book disertai pagination	PASS
	Perkara	- Menampilkan list perkara dengan tab Putusan Landmark, Buku Kompilasi Ikhtisar Putusan, Ikon HKWN disertai pagination - Masing-masing item dapat di klik	PASS
	Majalah Konstitusi	- Menampilkan list majalah konstitusi disertai pagination - File pendukung dan Flip Book dapat di klik	PASS

	Info Buku Konpress	- Menampilkan list Info Buku Konpress dengan pagination - File pendukung dapat di klik	PASS
	Naskah Komprehensif	- Menampilkan list Info Naskah Komprehensif dengan pagination - File pendukung dapat di klik	PASS
	Jurnal & Arsip	- Menampilkan list jurnal yang dapat di klik - Menampilkan list arsip dengan pagination yang dapat klik	PASS
	Iklan Layanan Masyarakat	- Menampilkan video iklan layanan masyarakat dengan pagination yang dapat di play	PASS
	Hasil Penelitian	- Menampilkan table hasil penelitian dengan judul yang dapat di klik	PASS
	Proceeding	- Menampilkan list proceeding dengan pagination - File pendukung dapat di klik	PASS
	Artikel	- Menampilkan list artikel dengan pagination - File pendukung dapat di klik	PASS
Pengaduan	Pengaduan	- Terdapat Informasi Kontak Kami dengan tautan Email, Call Center, SMS - Terdapat Layanan Pengaduan dan Informasi dengan tautan Lapor, Whistleblowing, Kirim Surat ke MK, Tanya Jawab dengan MK, Lapor ke MKMK - Lapor -> https://mk.lapor.go.id/ - Whisteblowing -> https://wbs.mkri.id/ - Hubungi via Whatsapp	PASS
	Tanya Jawab	- Terdapat form (nama, email, pertanyaan) dan code captcha - Terdapat list tanya jawab dengan filter pencarian, tanggal dan tombol reset - Terdapat pesan sukses jika form telah tersubmit	PASS
	Kirim Surat ke MK	- Terdapat form (nama, email, perihal, isi surat, upload file) dan code captcha - Terdapat pesan sukses jika form telah tersubmit	PASS
	Laporan Ke MKMK	- Terdapat form dengan nama, alamat, profesi/pekerjaan, jenis kelamin, telpon/nomor hp, email, nomor ktp, isi laporan dengan rich text editor, upload file ktp dan file laporan, juga kode captcha - Terdapat tautan menuju Peraturan MKMK dan Keputusan MKMK	PASS
Berita MKRI	Berita MKRI	- Terdapat list berita dengan tab Berita Populer, Berita Sidang, Berita Non Sidang, Berita Dua Menit - Terdapat fitur pencarian dan index tanggal dengan pagination	PASS

Berita
MKRI

	Detail Berita MKRI	<ul style="list-style-type: none"> - Menampilkan beberapa gambar disertai caption - Terdapat tanggal, statistik dilihat, tombol cetak dan konten berita 	PASS
Peradilan	Peradilan	<ul style="list-style-type: none"> - Menampilkan konten sejarah singkat - Menampilkan tautan kode etik dan pengumuman dewan etik 	PASS
	Sejarah & Perkembangan	Menampilkan konten Sejarah & Perkembangan	PASS
	Visi Misi	Menampilkan konten Visi Misi	PASS
	Kedudukan & Kewenangan	Menampilkan konten Kedudukan & kewenangan	PASS
	Struktur Organisasi > Bagan	Struktur Organisasi > Bagan	PASS
	Struktur Organisasi	<ul style="list-style-type: none"> - Menampilkan Hakim Konstitusi dengan jabatan masing-masing - Masing-masing hakim dapat di klik dan mengarah pada halaman Detail Hakim - Menampilkan pejabat Sekjen dan Sekjen Periode Sebelumnya - Menampilkan pejabat Panitera dan Panitera Periode Sebelumnya - Masing-masing pejabat dapat di klik dan mengarah pada halaman Profil Pejabat 	PASS
	Struktur Organisasi > Profil Pejabat	<ul style="list-style-type: none"> - Menampilkan profil Sekjen dan Sekjen Periode Sebelumnya - Menampilkan profil Panitera dan Panitera Period Sebelumnya - Menampilkan LHKPN di masing-masing pejabat 	PASS
	Tugas Pokok & Fungsi	Menampilkan konten tugas pokok dan fungsi	PASS
	Sumpah & Janji Hakim	Menampilkan konten Sumpah dan Janji Hakim	PASS
	Emblem, Hymne & Mars	Menampilkan konten Emblem, Hymne & Mars	PASS
	Lokasi	Menampilkan konten Lokasi dengan tombol yang mengarah ke Google Map	PASS
	Profil Dewan Etik	Menampilkan seluruh profil dewan etik	PASS
Peraturan Dewan Etik	Menampilkan tabel peraturan dewan etik	PASS	

	Keputusan Dewan Etik	- Menampilkan tabel keputusan dewan etik - No dan Tentang dapat di klik	PASS
	Profil MKMK	Menampilkan seluruh profil MKMK	PASS
	Peraturan MKMK	Menampilkan tabel peraturan MKMK dengan pencarian File pendukung dapat di klik	PASS
	Pelaporan MKMK	Menampilkan tabel pelaporan MKMK dengan pagination dan pencarian, serta Dokumen yang dapat di buka	PASS
	Jadwal Sidang MKMK	Menampilkan tabel jadwal sidang MKMK dengan pagination dan pencarian	PASS
	Risalah Sidang MKMK	Menampilkan tabel risalah sidang MKMK dengan pagination dan pencarian, serta Risalah Sidang dan Risalah Audio yang dapat dibuka	PASS
	Keputusan MKMK	Menampilkan tabel keputusan MKMK dengan pagination dan pencarian, dengan nomor keterangan dan putusan yang dapat dibuka	PASS
Administra si Umum	Rencana Strategis	Menampilkan tabel rencana strategis dengan pagination dan pencarian, serta file pendukung yang dapat dibuka	PASS
	Grafik Informasi Anggaran	- Menampilkan grafik informasi anggaran tahunan (pagu dan penyerapan), dan juga setiap tahunnya dari 5 tahun kebelakang	PASS
	Informasi Anggaran	- Menampilkan tabel informasi anggaran dengan pagination - Setiap kolom terdapat file yang bisa di unduh, juga menampilkan statistik di unduh	PASS
	LAKIP	- Menampilkan LAKIP dengan pencarian dan pagination - File pendukung dapat di unduh	PASS
	Laporan Keuangan	- Menampilkan tabel laporan keuangan dengan pagination - Judul dapat di klik dan laporan keuangan dapat di unduh	PASS
	Daftar Inventaris Barang	- Menampilkan tabel daftar inventaris barang dengan pencarian dan pagination	PASS
	Daftar PNBP	- Menampilkan tabel laporan penerimaan negara bukan pajak dengan pagination - Judul dapat di klik dan laporan dapat di unduh	PASS
	Pelayanan Publik	- Menampilkan tabel pelayanan publik dengan pagination - Judul dapat di klik dan laporan dapat di unduh	PASS
	PPID	- Menampilkan konten PPID - Terdapat tombol Permohonan Informasi, Pengajuan Keberatan Informasi dan Sengketa Informasi Publik yang dapat di unduh	PASS

		- Terdapat tabel Profil, Regulasi dan Laporan, yang masing-masing file nya dapat di unduh	
	Formulir Permohonan Informasi	- Terdapat form nama, alamat, no hp, email dan nomor identitas, juga upload file identitas, rincian informasi yang dibutuhkan, tujuan penggunaan informasi, cara memperoleh informasi dan cara mendapatkan salinan informasi - Terdapat pesan sukses jika form berhasil di submit	PASS
	Formulir Pengajuan Keberatan Informasi	- Terdapat tombol untuk cek nomor permohonan informasi - Ketika di klik, informasi akan otomatis terisi pada form - User dapat mengubah data pada bagian kecuali (nama, alamat, no hp, email, nomor identitas) - Terdapat pesan sukses jika form berhasil di submit	PASS
	LHKPN	- Terdapat tabel & grafik LHKPN dari tahun ke tahun - Grafik dapat di hover untuk menampilkan value	PASS
	Statistik Pegawai	- Menampilkan statistik pegawai dalam bentuk pie chart - Setiap item dalam chart dapat di klik untuk melihat informasi lebih detail dalam bentuk grafik - Dalam statistik pegawai detail, dapat melihat grafik menurut jenis kelamin, pendidikan, usia, agama dan status nikah	PASS
	Data Pegawai	Mengarah ke website https://apps.mkri.id/datapegawai/	PASS
	Kerjasama	- Menampilkan statistik jumlah kerjasama (nota kesepahaman, tanda tangan digital, tanda tangan basah) - Menampilkan tabel kerjasama (judul, tentang, tanggal, diunduh) dengan pencarian dan pagination	PASS
	Link	- Menampilkan tautan website lembaga negara dan mahkamah konstitusi	PASS
	Siaran Pers & Newsletter	- Menampilkan tabel siaran pers dengan pagination, dan judul yang bisa di buka - Menampilkan tabel news letter dengan pagination, dan judul yang bisa di buka	PASS
	Pengumuman	- Menampilkan tabel pengumuman dengan pagination dan judul yang bisa di buka - menampilkan tabel WTP sebanyak 14 kali	PASS
	Informasi Lelang	- Menampilkan informasi lelang dengan tab Pengumuman, Pengumuman PL dan Pengumuman GU disertai pagination dan fitur pencarian	PASS
	LPSE	Mengarah ke website lpse.mkri.id	PASS
	Reformasi Birokrasi	- Menampilkan halaman reformasi birokrasi, dengan tab Laporan Pelaksanaan, Laporan Quick Wins, Laporan Survey Pelaksanaan, Road Map dan Grand Design	PASS

		- Setiap tab terdapat tabel dengan judul yang bisa di klik, pagination dan fitur pencarian	
Unit Kerja	Unit Kerja	- Menampilkan tautan unit kerja - Menampilkan aplikasi lainnya	PASS
Pengujian UUD & SKLN	Peraturan	- Menampilkan fitur searching yang akan mengarah ke tracking.mkri.id - Menampilkan peraturan terkait pengujian undang-undang (UU RI & PMK)	PASS
	Permohonan Diterima	Menampilkan tabel permohonan diterima dengan filter tahun dan pagination, dengan file dan ap3 file yang dapat di buka	PASS
	Form	Menampilkan tabel form dan akta penanganan perkara (mahkamah dan pemohon)	PASS
	Alur	Menampilkan konten alur perkara PUU	PASS
	Jadwal	Menampilkan konten jadwal sidang dengan filter tahun dan pagination, jenis: PUU	PASS
	Streaming	Menampilkan konten live streaming sidang seperti dalam halaman Video MKRI	PASS
Pilkada Serentak	Permohonan Diterima	Menampilkan fitur searching yang akan mengarah ke tracking.mkri.id Menampilkan Daftar Permohonan Perkara Pilkada dengan jenis Gubernur, Bupati dan Walikota Menampilkan tabel untuk masing-masing jenis dengan fitur pencarian, dan file-file yang bisa di unduh (AP3, Registrasi, File lainnya)	PASS
	Statistik Daftar Permohonan	Menampilkan statistik Permohonan dan Perkara untuk masing-masing jenis	PASS
	Peraturan	Menampilkan peraturan terkait pilkada serentak dengan filter tahun (UU RI, PMK, PKPU, KKPU, Peraturan Bawaslu)	PASS
	Form dan Fakta	Menampilkan tabel form dan akta penanganan perkara (mahkamah dan pemohon) dengan filter tahun	PASS
	Alur Perkara	Menampilkan konten alur perkara PUU dengan filter tahun	PASS
	Jadwal Sidang	Menampilkan konten jadwal sidang dengan filter tahun dan pagination, jenis: PHPKADA	PASS
	Streaming	Menampilkan konten live streaming sidang seperti dalam halaman Video MKRI	PASS
PHPU & Pilpres	Permohonan Diterima	Menampilkan fitur searching yang akan mengarah ke tracking.mkri.id Menampilkan Daftar Permohonan Perkara PHPU dengan jenis Perkara DPR/DPRD, Perkara DPD, Perkara Presiden/Wapres	PASS

		Menampilkan tabel untuk masing-masing jenis dengan filter pencarian dan tahun, dan file-file yang bisa di unduh (AP3, Registrasi, File lainnya)	
	Peraturan	Menampilkan peraturan terkait pilkada serentak dengan filter tahun (UU RI, PMK, PKPU, KKPU, Peraturan Bawaslu)	PASS
	Form dan Fakta	Menampilkan tabel form dan akta penanganan perkara (mahkamah, pemohon, termohon, pihak terkait dan bawaslu, serta pemilihan umum legislatif DPD) dengan filter tahun untuk masing-masing jenis	PASS
	Alur Perkara	Menampilkan konten alur perkara PUU dengan filter tahun	PASS
	Jadwal Sidang	Menampilkan konten jadwal sidang dengan filter tahun dan pagination, jenis: PHPU	PASS
	Streaming	Menampilkan konten live streaming sidang seperti dalam halaman Video MKRI	PASS
Fitur Aksesibilitas	Fitur Aksesibilitas	Fitur aksesibilitas mode suara, perbesar dan perkecil teks.	PASS
Navigasi	Navigasi Utama	Menampilkan menu navigasi utama sesuai desain	PASS
	Navigasi Level 2 dan Level 3	Menampilkan navigasi level 2 dan level 3 sesuai dengan menu utama yang dipilih	PASS

Penutupan & Garansi

Proyek ini dinyatakan selesai dan diserahkan pada tanggal 5 April 2024, sesuai dengan timeline yang telah ditetapkan.

Garansi untuk proyek ini berlaku selama 6 bulan, dimulai dari tanggal penyelesaian proyek pada 5 April 2024, dan berakhir pada 5 Oktober 2024. Garansi mencakup penyelesaian masalah yang terkait dengan kode di front-end yang dapat mengganggu fungsionalitas atau tampilan website. Namun, garansi tidak mencakup pengembangan fitur baru yang tidak termasuk dalam lingkup pengembangan proyek sebelumnya.

Jika memiliki pertanyaan lebih lanjut atau memerlukan bantuan selama periode garansi, dapat menghubungi Luthfi Hariz sebagai Project Manager, melalui nomor handphone +6285697586581 atau email di luthfihariz@gmail.com.



KEPUTUSAN
SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI
476 TAHUN 2023

TENTANG

TIM PEMBANGUNAN APLIKASI SISTEM PUBLIKASI DAN PENYEBARLUASAN
INFORMASI MAHKAMAH KONSTITUSI (SIPPI MK)
DI LINGKUNGAN KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL
MAHKAMAH KONSTITUSI

SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- Bahwa Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 28 Tahun 2019 tentang Pedoman Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 28 tahun 2019 tentang Pedoman Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi dipandang tidak sesuai lagi dengan perkembangan ruang lingkup pelayanan publik dan kebutuhan masyarakat, khususnya terkait layanan cepat dengan penggunaan layanan dalam jaringan (daring/online), sehingga perlu diganti dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi yang baru;
 - bahwa dalam rangka penyusunan aksi perubahan sebagai salah satu syarat kelulusan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) dengan judul Sistem Publikasi dan Penyebarluasan Informasi Mahkamah Konstitusi (SIPPI MK);
 - bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu membentuk dan menetapkan Tim Kerja aksi perubahan Sistem Publikasi dan

Penyebarluasan Informasi Mahkamah Konstitusi (SIPPI MK);

- d. nama nama yang tercantum pada keputusan ini, dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Tim Kerja Aksi Perubahan Sistem Publikasi dan Penyebarluasan Informasi Mahkamah Konstitusi (SIPPI MK);

- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6554);
 - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 215 Tahun 2012, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2010, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 - Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 111) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2017



PERTAMA : Menetapkan Tim Pembangunan Aplikasi Sistem Publikasi dan Penyebarluasan Informasi Mahkamah Konstitusi (SIPPI MK) di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pembangunan Aplikasi Sistem Publikasi dan Penyebarluasan Informasi Mahkamah Konstitusi (SIPPI MK) di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi melaksanakan tugas sebagai berikut:

- Melaksanakan tahapan perencanaan pembangunan aplikasi, antara lain melaksanakan rapat persiapan dan penyusunan jadwal/timeline pelaksanaan pembangunan aplikasi;
- Melaksanakan tahapan pembangunan aplikasi, antara lain mengembangkan program dalam aplikasi, melaksanakan rapat pembahasan progress pembangunan aplikasi, melaksanakan uji sistem aplikasi;
- Melaksanakan tahapan akhir pembangunan aplikasi, antara lain Menyusun petunjuk penggunaan aplikasi, Menyusun modul aplikasi, mengadakan sosialisasi dan bimbingan teknis penggunaan aplikasi;
- Melaksanakan tahapan perbaikan dan pengembangan aplikasi secara berkala.

KETIGA : Menetapkan uraian tugas Tim Pembangunan Aplikasi Sistem Publikasi dan Penyebarluasan Informasi Mahkamah Konstitusi (SIPPI MK) di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

KEEMPAT : Segala biaya yang terkait dengan pelaksanaan pembangunan aplikasi Sistem Publikasi dan Penyebarluasan Informasi Mahkamah Konstitusi (SIPPI MK) di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Mahkamah Konstitusi

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2024, dengan ketentuan apabila di kemudian hari

terang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 158);

- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
- Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
- Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 111) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 158);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG TIM PEMBANGUNAN APLIKASI SISTEM PUBLIKASI DAN PENYEBARLUASAN INFORMASI MAHKAMAH KONSTITUSI (SIPPI MK) DI LINGKUNGAN KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI.



Lampiran I
Keputusan Sekretaris Jenderal
Nomor : 476 Tahun 2023
Tanggal : 10 Oktober 2023

terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth:
1. Ketua Mahkamah Konstitusi;

**SUSUNAN TIM PEMBANGUNAN APLIKASI SISTEM PUBLIKASI DAN
PENYEBARLUASAN INFORMASI MAHKAMAH KONSTITUSI (SIPPI MK)
DI LINGKUNGAN KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL
MAHKAMAH KONSTITUSI**

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 10 Oktober 2023

SEKRETARIS JENDERAL,
HERU SETIAWAN

1. Pengarah : Heru Setiawan
2. Penanggung Jawab : Budi Wijayanto
3. Wakil Penanggung Jawab : Sigit Purnomo
4. Mentor : Fajar Laksono
5. Coach : Syam Wahidin
6. Ketua : Mutia Fria Darsini
7. Anggota Tim Administrasi :
 1. Tiara Agustina
 2. Fitri Yuliana
 3. Andhini Sayu Fauzia
 4. Raisa Ayuditha
6. Anggota Tim Konten :
 1. Lulu Anjarsari
 2. Sri Pujianti
 3. Utami Argawati
 4. Ifa Dwi Septian
 5. Fauzan Febryan
 6. R. Widjaja Saputra
 7. Ilham Wiryadi
 8. Yuwandi
 9. Muhammad Nur
 10. Hermanto



Lampiran II
Keputusan Sekretaris Jenderal
Nomor : 476 Tahun 2023
Tanggal : 10 Oktober 2023

7. Anggota Tim IT (Programer) :
 1. Jefryanto
 2. Ishak Purnama

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 10 Oktober 2023

SEKRETARIS JENDERAL,
HERU SETIAWAN

**URAIAN TUGAS TIM PEMBANGUNAN APLIKASI SISTEM PUBLIKASI DAN
PENYEBARLUASAN INFORMASI MAHKAMAH KONSTITUSI (SIPPI MK)
DI LINGKUNGAN KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL
MAHKAMAH KONSTITUSI**

NO	JABATAN	URAIAN TUGAS
1.	Pengarah	: Memberikan arahan kebijakan pembangunan pembangunan aplikasi SIPPI MK.
2.	Penanggung Jawab	: Bertanggungjawab atas terselenggaranya pembangunan pembangunan aplikasi SIPPI MK.
3.	Wakil Penanggung Jawab	: Membantu penanggungjawab atas terselenggaranya pembangunan aplikasi SIPPI MK.
4.	Ketua	: <ol style="list-style-type: none">1. Memimpin pelaksanaan pembangunan aplikasi SIPPI MK.2. Menyusun konsep dan rencana pembangunan aplikasi SIPPI MK.3. Melakukan koordinasi dan komunikasi dengan pihak terkait dalam pembangunan aplikasi SIPPI MK.4. Melaporkan perkembangan pelaksanaan pembangunan aplikasi SIPPI MK.
5.	Anggota Tim Administrasi	: <ol style="list-style-type: none">1. Membantu menyusun jadwal dan rencana serta mengadministrasikan kegiatan pelaksanaan pembangunan aplikasi SIPPI MK.



		<ul style="list-style-type: none"> 2. Melakukan tugas kesekretariatan dan tugas lain yang diberikan oleh Ketua. 3. Membantu menyiapkan materi pembahasan dalam melakukan koordinasi baik secara internal maupun eksternal terkait pembentukan pedoman.
6.	Anggota Tim Konten	<ul style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pengumpulan data dan informasi, serta koordinasi dan fasilitasi dengan pihak terkait terhadap data yang akan dimasukkan dalam aplikasi SIPPI MK. 2. Melakukan input data awal dan update data pada aplikasi SIPPI MK. 3. Membantu Menyusun laporan proses pelaksanaan pembangunan aplikasi SIPPI MK.
7.	Anggota Tim IT (Programer)	<ul style="list-style-type: none"> 1. Membantu ketua dalam melaksanakan pembangunan aplikasi SIPPI MK di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi. 2. Membantu melakukan evaluasi dan perbaikan serta pengembangan aplikasi SIPPI MK.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 10 Oktober 2023

**SEKRETARIS JENDERAL,
HERU SETIAWAN**



Sekretaris Jenderal
Heru Setiawan - NIP:19690091993031001
Digital Signature
mk380679937231010013240

Jln. Medan Merdeka Barat No.6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-25329000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id



**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

**SURAT TUGAS
NOMOR 908/ST.SPD/2000/11/2023**

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Mahkamah Konstitusi menugaskan kepada yang tersebut dibawah ini untuk melaksanakan Perjalanan Dinas sebagai berikut:

Daftar Nama Terlampir

Dari : Kota Asal Terlampir

Tempat, Kota Tujuan : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor.

Dalam rangka : Melaksanakan tugas sebagai Narasumber, Moderator, dan Panitia Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 Bagi Komisi Pemilihan Umum Angkatan IV di Hotel Grand Mercure Jakarta Harmoni pada tanggal 14 s.d. 16 November 2023.

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Jakarta, 14 November 2023
an. Ketua Mahkamah Konstitusi,
Sekretaris Jenderal,
Heru Setiawan

Tembusan Yth.
Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi



Digital Signature
mk1899946070231115013333

Lampiran Surat Tugas

Nomor : 908/ST.SPD/2000/11/2023

Tanggal : 13 November 2023

**NARASUMBER DAN MODERATOR KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS HUKUM
ACARA PENYELESAIAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024 BAGI KOMISI PEMILIHAN UMUM ANGKATAN IV**

NO	NAMA	PENUGASAN	TANGGAL	KOTA ASAL
1	Dr. Suhartoyo, S.H., M.H.	Narasumber	14 November 2023	Jakarta
2	Prof. Dr. Saldi Isra, S.H., M.H.	Narasumber	14 November 2023	Jakarta
3	Dr. Fajar Laksono, S.Sos. M.H.	Narasumber	15 November 2023	Jakarta
4	Triyono Edy Budhiarto, S.H.	Narasumber	15 November 2023	Jakarta
5	Mochammad Afifuddin	Narasumber	16 November 2023	Jakarta
6	Saiful Anwar, S.H., M.H.	Narasumber	15 November 2023	Jakarta
7	Yunita Rhamadani, S.H., M.H.	Narasumber	15 November 2023	Jakarta
8	M. Mahrus Ali, S.H., M.H.	Narasumber	15 November 2023	Jakarta
9	Titis Anindyajati, S.E., S.H., M.H.	Narasumber	15 November 2023	Jakarta
10	Sigit Purnomo, S.IP., M.M.	Narasumber	15 November 2023	Jakarta
11	Ishak Purnama, S.Kom.	Narasumber	15 November 2023	Jakarta
12	Dr. Achmad Edi Subiyanto, S.H., M.H.	Narasumber	16 November 2023	Jakarta
13	Anak Agung Dian Onita, S.H., M.H.	Narasumber	16 November 2023	Jakarta
14	Dr. Irfan Nur Rachman, S.H., M.H.	Narasumber	16 November 2023	Jakarta
15	Dr. Anna Triningsih, S.H., M.H.	Narasumber	16 November 2023	Jakarta
16	Dr. Wiryanto, S.H., M.Hum.	Koordinator	16 November 2023	Jakarta
17	Nanang Subekti	Moderator dan Panitia	14 s.d. 16 November 2023	Bogor
18	Santhy Kustrihardiani	Moderator dan Panitia	14 s.d. 16 November 2023	Bogor



19	Bambang Sukmadi	Moderator dan Panitia	14 s.d. 16 November 2023	Bogor
20	Fazlur Rahman El Islamy	Moderator dan Panitia	14 s.d. 16 November 2023	Bogor
21	Angga Putri Gardina	Moderator dan Panitia	14 s.d. 16 November 2023	Bogor
22	Chafid Sugianto	Moderator dan Panitia	14 s.d. 16 November 2023	Bogor
23	Yahya Amarullah Taufik	Moderator dan Panitia	14 s.d. 16 November 2023	Bogor
24	Andy Fahri	Panitia	14 s.d. 16 November 2023	Bogor
25	Edho Rizky Ermansyah	Moderator	16 November 2023	Jakarta

